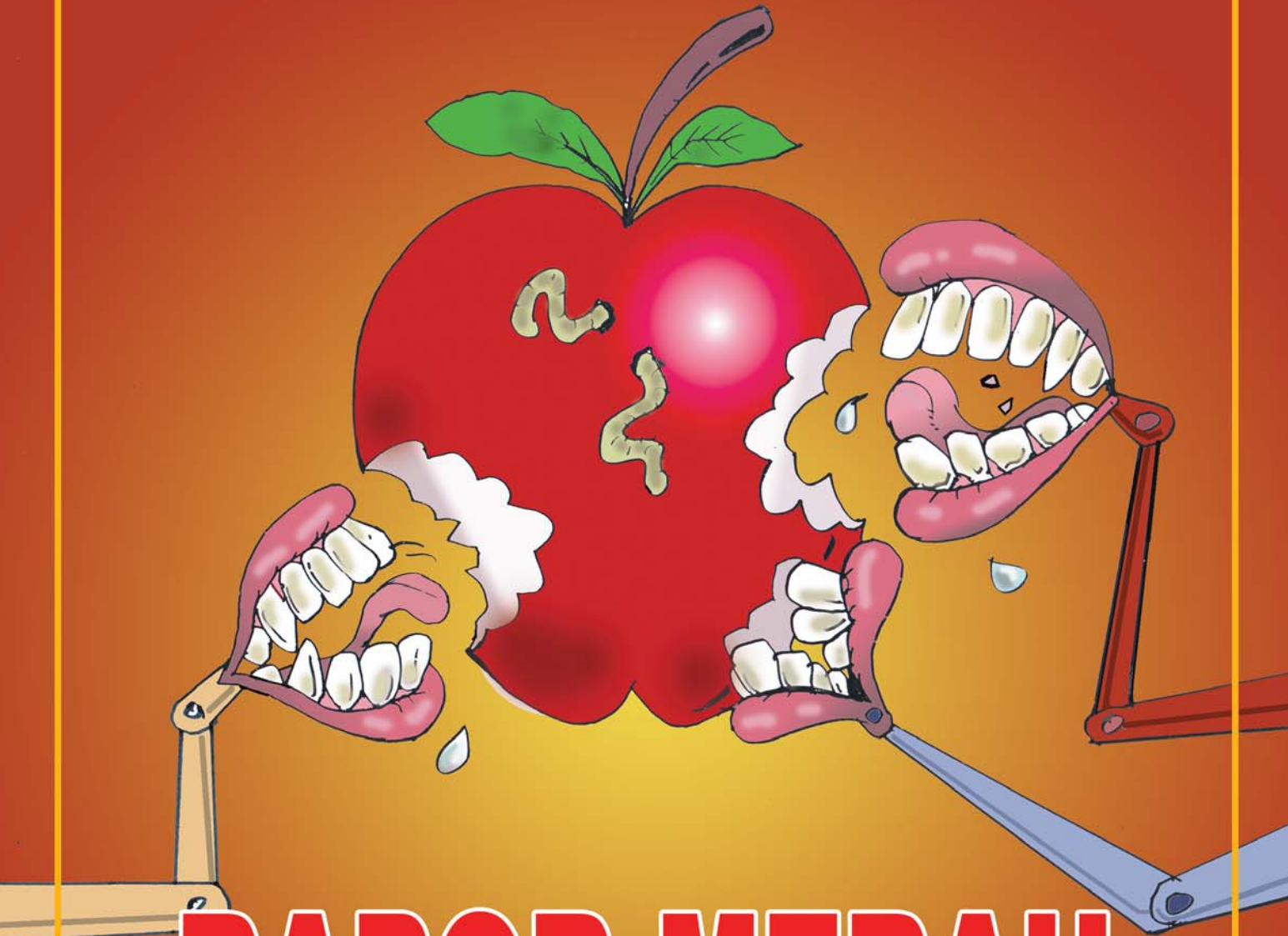


HKBP TEBET NIKMATI DAMAI DI AL-ZAYTUN

# BERITA INDONESIA<sup>®</sup>

EDISI 74 TAHUN V ★ FEBRUARI 2010

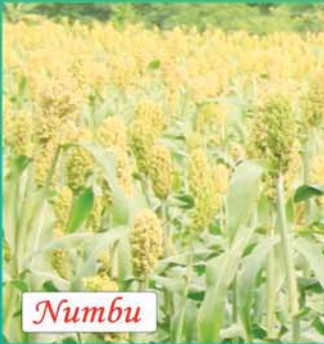
Rp 16.000 (Luar Jabodetabek Rp 17.500)



## RAPOR MERAH PEMBERANTASAN KORUPSI

Tersedia

# BIBIT SORGUM VARIETAS NASIONAL DI AL-ZAYTUN



## VARIETAS : NUMBU

Umur : 105 - 110 hari

Harga :

1. Packing 5 kg : Rp. 100.000
2. Packing 1 kg : Rp. 30.000
3. Packing 250 gr : Rp. 15.000
4. Packing 100 gr : Rp. 10.000

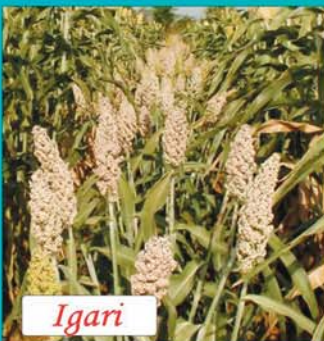


## VARIETAS : KAWALI

Umur : 110 Hari

Harga :

1. Packing 5 kg : Rp. 100.000
2. Packing 1 kg : Rp. 30.000
3. Packing 250 gr : Rp. 15.000
4. Packing 100 gr : Rp. 10.000



## VARIETAS : IGARI

Umur : 75 - 80 hari

Harga :

1. Packing 5 kg : Rp. 100.000
2. Packing 1 kg : Rp. 30.000
3. Packing 250 gr : Rp. 15.000
4. Packing 100 gr : Rp. 10.000



Sampul  
desain:esero  
karikatur:dendy

Edisi No.74/Th.VI/Februari 2010

DARI REDAKSI ..... 4  
 VISI BERITA ..... 5  
 BERITA TERDEPAN ..... 6  
 BUNG WARTO ..... 8  
 HIGHLIGHT/KARIKATUR BERITA ..... 9

**BERITA UTAMA**

**RAPOR MERAH PEMBERANTASAN KORUPSI | 12**

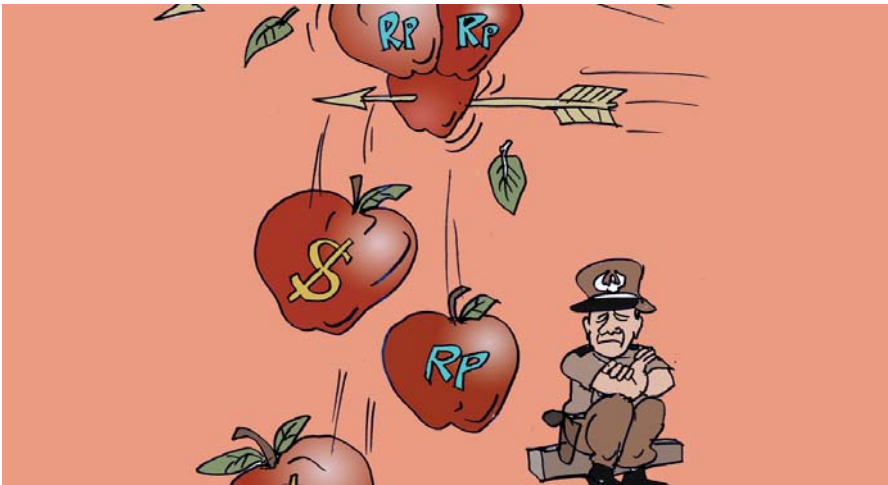
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan segenap lingkaran kekuasaannya menilai sendiri kinerjanya, terutama dalam pemberantasan korupsi, sangat berhasil. Presiden juga menyatakan puas atas pencapaian program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu 2 (KIB 2). Namun, banyak pihak, di luar pemerintahan, justru menilai sebaliknya, gagal, rapor merah, yang antara lain tereksperesikan dalam demonstrasi 28 Januari 2010, bertepatan 100 hari KIB 2. Api semangat pemberantasan korupsi pun kini memudar.

**LENTERA**



**SYAYKH AS PANJI GUMILANG HADAPI TANTANGAN GLOBAL DENGAN KEARIFAN LOKAL**

Selaras isu pemanasan global yang sedang hangat dibicarakan di dunia internasional, Syaykh al-Zaytun menyerukan upaya menghadapi tantangan alam tersebut dengan kearifan lokal.....34



Pemerintah Selalu Klaim Prestasi KPK ..... 18  
 Taktik Lemahkan KPK ..... 20  
 Korupsi Semakin Ganggih ..... 25

**BERITA KHAS**

Dua Mata Pisau ACFTA ..... 28



**BERITA NASIONAL**

Sedikit Titik Terang ..... 30  
 Ibarat Luka Disiram Air Cuka ..... 32  
 Dana Raib via ATM ..... 50



**BERITA TOKOH**

BJ Habibie ..... 51  
 Dahlan Iskan ..... 51  
 Boediono ..... 51  
 Jimly Asshidiqie ..... 51

**BERITA HUKUM**

Hukum Masih Pilih Kasih ..... 52

**BERITA PUBLIK**

Peduli Ekonomi Mikro ..... 54



JR Cabang Jatim Raih 'Cabang Award' ..... 55  
 Balik Desa Bangun Desa ..... 55

**BERITA DAERAH**

Purwakarta Berbangga Hati ..... 57  
 Disambut Baik Kaum Ibu ..... 57  
 Mengadilii Bantuan Sosial ..... 58

**BERITA MANCANEGARA**

Kisah Skandal yang Tak Pernah Putus ..... 59



Memulihkan Haiti ..... 60

**BERITA IPTEK**



Nikmatnya TV Digital ..... 61

**BERITA KESEHATAN**



Belum Tentu DBD ..... 62

**BERITA OLAHRAGA**

Meraih Kembali Kejayaan ..... 64

**BERITA Hiburan**

Nyala Dian tak Kunjung Padam ..... 66

### ► Demokrasi, Toleransi dan Perdamaian

**PEMIMPIN UMUM:**

Syaykh Dr AS Panji Gumilang

**PEMIMPIN REDAKSI:**

Ch Robin Simanullang

**REDAKTUR SENIOR:**

MYR Agung Sidayu  
Imam Prawoto  
Dendy Hendrias  
Suryo Pranoto

**IN HEADNEWS (LIPUTAN, LITBANG & PUSDAT):**

Mangatur Lorieclide Paniroy (Redaktur Eksekutif)

**REDAKTUR:**

Samsuri, Marjuka Situmorang, Dian Gina Rahayu

**SEKRETARIS REDAKSI**

Bantu Hotsan

**STAF REDAKSI:**

Nawawi, Ikhwan Triatmo, Sarjiman,  
Doan Adikara Pudan, Budi Rahardjo

**WARTAWAN FOTO:**

Wilson Edward

**KARIKATURIS:**

Dendy Hendrias

**KONTRIBUTOR:**

Syahbuddin Hamzah, Anis Fuadi, Chusnato,  
Retno Handayani

**DESAIN GRAFIS:**

ESERO Design, Arief Maulana

**BIRO REDAKSI:**

Medan: Bontor Simanullang, Humbahas: Parasian  
Manalu, Palembang: Sri Windayani, Jawa Barat:  
Ade Wiharyana (Kepala), Bernard Sihite, Tarakan:  
Sudirman Leonard Pohan, Amerika Serikat: Milsam  
Bahanan (Maryland), Rukyal Basri (Philadelphia)

**PENERBIT:**

PT Berita Satria Wiratama

Bekerjasama dengan Yayasan Pesantren Indonesia dan PT. Asasira

**KOMISARIS:**

Syaykh Dr AS Panji Gumilang

**DIREKTUR/PEMIMPIN PERUSAHAAN:**

Ch Robin Simanullang

**WAKIL PEMIMPIN PERUSAHAAN:**

Samsuri

**IKLAN DAN PROMOSI:**

Imam Prawoto, Dian Gina Rahayu, Budi Rahardjo

**KEUANGAN DAN UMUM:**

Mangatur Lorieclide Paniroy

**SIRKULASI DAN DISTRIBUSI:**

Abdul Halim, Marjuka Situmorang, Bantu Hotsan

**ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA:**

Jl. Bukit Duri Tanjakan IX No. 8A Jakarta Selatan.  
Telp. (021) 8292735, 8293113, 70930474  
Fax. (021) 83787235

**E-MAIL:**

redaksi@berindo.com - iklan@berindo.com

**WEBSITE:**

www.beritaindonesia.co.id

**ISSN: 1907-977X**

**MEREK: Ditijen HAKI Sertifikat IDM No. 000.108.028**

**PERCETAKAN:**

PT Gramedia (Isi di luar tanggung jawab percetakan)



Arif Maulana sudah empat tahun menekuni profesinya sebagai layouter di Berita Indonesia

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*  
Salam Sejahtera

Sidang Pembaca yang budiman,

Pada 28 Januari lalu, massa dari berbagai elemen masyarakat menggelar aksi demo mengkritisi hasil 100 hari pemerintahan SBY-Boediono yang jauh dari harapan. Demonstran menilai pemerintah lamban dalam menyelesaikan sejumlah masalah yang sedang dihadapi bangsa ini khususnya penegakan hukum yang ditandai dengan adanya upaya untuk melemahkan KPK atau skandal Bank Century yang berusaha ditutup-tutupi kebenarannya.

Protes dalam aksi-aksi demo yang makin marak belakangan ini tidak lepas dari pernyataan Presiden SBY yang dalam berbagai kesempatan terutama saat kampanye, menjadikan pemberantasan korupsi sebagai ikon, prioritas utama. Demi menyokong komitmennya itu, pemerintah mengklaim sudah meraih sejumlah prestasi dalam upaya pemberantasan korupsi. Klaim itu sebenarnya salah alamat sebab prestasi tersebut sepenuhnya milik KPK sebagai lembaga independen. Namun dengan berbagai teknik politik pencitraan, pemerintah berusaha 'membodohi' rakyat bahwa prestasi itu milik mereka demi melanggengkan kekuasaannya. Untuk ulasan lebih lengkapnya bisa Anda baca dalam rubrik Berita Utama.

Sedangkan dalam rubrik *Lentera*, kami membaginya dalam empat judul dimana dua judul pertama merupakan tulisan lanjutan dari laporan perayaan 1 Muharram di Al-Zaytun yang dimuat di edisi sebelumnya. Dalam tulisan pertama, Anda bisa mengetahui lebih jauh isu pemanasan global yang menurut Syaykh AS Panji Gumilang perlu disikapi dengan kearifan lokal. Sedangkan dalam tulisan kedua, mantan Menteri Koperasi dan UKM pada Kabinet Reformasi Pembangunan, Adi Sasono, memperkuat gagasan-gagasan yang disampaikan Syaykh AS Panji Gumilang. Pada tulisan ketiga, Anda akan membaca Reportase Kunjungan HKBP Tebet ke Al-Zaytun awal Februari lalu. Terakhir, tulisan keempat, mengedepankan peran Al-Zaytun dalam memberdayakan masyarakat sekitar dan luar untuk terlibat dalam berbagai kegiatan khususnya mengelola lahan pertanian.

Sementara itu dalam *Berita Terdepan* kami mengulas tentang rancangan peraturan menteri (RPM) konten multimedia yang dinilai mengekang kebebasan berpendapat dan berbicara. *Berita Khas* tentang pesimisme dan optimisme seputar pemberlakuan ACFTA. *Berita Hukum* tentang penegakan hukum yang masih pilih kasih dan mengabaikan rasa keadilan masyarakat. Dan masih banyak berita-berita menarik lainnya.

Akhir kata, kami ucapkan selamat membaca,

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

# Pemimpin Pemberantas Korupsi

Publik berharap, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan selalu tampil sebagai pemimpin pemberantasan korupsi. Sebagai pemimpin, diharapkan Presiden SBY punya komitmen, melebihi komitmen pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberantas korupsi yang masih merajalela di Indonesia.

Ekspektasi publik ini bukan tanpa alasan. Sebab, SBY sendiri, dalam berbagai kesempatan terutama saat kampanye, menjadikan pemberantasan korupsi sebagai ikon, prioritas utama. Baik dalam kampanye Pilpres 2004 maupun Pilpres 2009, rakyat masih mengingat kata-kata SBY bahwa pemerintahannya akan menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi, dan upaya itu akan dipimpinnya sendiri.

Dalam kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2009, juga ditampilkan iklan yang mengampunayakan keberhasilan pemerintahan SBY memberantas korupsi di Indonesia. Di iklan itu ditampilkan video maupun slide berupa gedung KPK dan Pengadilan Tipikor, lengkap dengan grafik Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia, dari 2 pada tahun 2004 menjadi 2,8 tahun 2009, yang menggambarkan penurunan kasus korupsi selama pemerintahan SBY.

Namun, setelah terungkapnya kasus kriminalisasi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan upaya-upaya pelemahan KPK serta kasus Bank Century, publik mulai merasakan bertolak belakangnya janji dengan aksi. Publik mulai mempertanyakan janji, komitmen dan prestasi pemerintahan SBY dalam pemberantasan korupsi.

Publik, tampaknya mulai risau dan ragu. Apalagi setelah memahami bahwa Presiden SBY tidak sepatutnya mengklaim prestasi KPK sebagai keberhasilan pemerintahannya dalam memberantas korupsi. Sebab, KPK adalah lembaga negara yang independen, bebas dari kekuasaan manapun, termasuk Presiden (eksekutif). Prestasi KPK bukanlah prestasi pemerintah atau Presiden. Apalagi, sebagaimana diungkap ICW bahwa dari 500 ijin pemeriksaan yang diajukan kepada Presiden, baru sekitar 134 yang disetujui.

Selama ini, bagi masyarakat awam (yang tidak mengetahui eksistensi KPK sebagai lembaga negara yang independen, bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun, termasuk Presiden) klaim itu ditelan bulat-bulat. Belakangan, mulai banyak rakyat yang memahami bahwa ketidaktahuan masyarakat awam ini pulalah yang dimanfaatkan untuk pencitraan (tebar pesona) demi kepentingan politik melanggengkan kekuasaan.

Ketidaktahuan yang membuat masyarakat terkesima, bahkan mengamini hal ini sebagai etika politik yang santun. Ketidaktahuan yang selama ini telah menutup penglihatan bahwa hal itu suatu rangkaian dari proses pembodohan, melengkapai politik bantuan langsung tunai yang menggerus semangat kemandirian rakyat dan bangsa.

Namun, politik pencitraan, tebar pesona, yang memanfaatkan ketidaktahuan (untuk tidak disebut kebodohan) masyarakat, seperti itu, pasti ada batasnya. Sepandai-pandai tupai meloncat pasti akan jatuh ke tanah jua. Rilis beberapa LSM antikorupsi seperti Indonesia Corruption Watch (ICW),

Transparency International Indonesia (TII), Indonesia Budget Center (IBC) dan YAPIKA secara bersama sebagai Kado Hari Anti Korupsi, 9 Desember 2009 bertajuk Politik Pelemahan KPK di Era Presiden SBY, tampaknya telah mencolokkan mata publik.

Menurut mereka, di era pemerintahan SBY, tercatat sejumlah upaya pelemahan KPK oleh berbagai pihak. Namun mereka menyatakan: "Kita tentu tidak bisa terlalu cepat mengatakan otoritas politik ikut dalam upaya pelemahan tersebut. Namun, fenomena pelemahan yang terkesam dibiarkan ini, dinilai sangat paradoks sekaligus aneh, karena Presiden SBY sendiri dari awal naik dan didukung oleh pemilihnya karena isu antikorupsi. Bahkan janji-janji politik SBY adalah janji tentang pemerintahan yang bersih dan pemberantasan korupsi. Bagaimana mungkin, KPK sebagai aktor yang memberi harapan dalam pemberantasan korupsi, di tengah kegagalan dan potret buram Kepolisian dan Kejaksaan, KPK justru didelegitimasi dan dilemahkan?"

Kita sependapat dengan pernyataan keempat LSM antikorupsi ini. Walaupun, tak terbantahkan, bahwa kita juga sudah mulai meragukan komitmen kuat Presiden untuk memberantas korupsi, tetapi kita masih menyimpan harapan bahwa otoritas politik, apalagi Presiden SBY, tidak ikut terlibat dalam upaya pelemahan KPK, juga dalam kasus rekayasa pengucuran dana talangan Bank Century.

Kita berharap, Presiden SBY akan mendorong secara sungguh-sungguh pengungkapan kriminalisasi dan pelemahan KPK, terutama pengungkapan secara tuntas dan terang benderang kasus Bank Century, baik mengenai kebijakannya maupun kucuran dananya. Sehingga kepercayaan publik dapat pulih kembali, bahwa Presiden SBY adalah seorang pemimpin terdepan dalam pemberantasan korupsi. Tak masalah, apakah itu dilakukan oleh lembaga independen KPK atau dilakukan Kepolisian dan Kejaksaan yang berada di bawah otoritas Presiden. **Redaksi**





Surat atau komentar tentang apa saja baik berkenaan dengan isi majalah Berita Indonesia maupun ide/gagasan/pandangan tentang isu-isu aktual dapat dikirimkan ke Redaksi Berita Indonesia, dengan alamat sebagai berikut:

• email : redaksi@berindo.com  
 • surat : Jl. Bukit Duri Tanjakan IX No. 8A Jakarta Selatan 12840  
 Telp. (021) 8292735, 8293113, 70930474  
 Fax. (021) 83787235

**Arena Balas Dendam Politik**

Kasus bailout Century yang tadinya hanya sayup-sayup kini telah menjadi tontonan rakyat Indonesia setiap hari bahkan beberapa televisi swasta menyiarkan secara terus-menerus. Kasus Bank Century ini seolah menjadi timah panas bagi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Rakyat dapat melihat dengan secara jelas apa dan bagaimana reaksi serta aksi para anggota dewan dalam menangani kasus bailout Century termasuk sejumlah saksi yang sudah dihadirkan. Rakyat jadi bertanya-tanya benarkah ini wakil rakyat hasil pemilihan tahun lalu. Proses penyelidikan oleh pansus terlihat sekali partai dominan mewakili ambisi po-

litiknya. Intrik yang dibangun hanya sedadar mencari bagaimana caranya untuk membelah dan merebut kue kekuasaan negeri dengan pisau Century. Dan kasus Century terkesan hanya sebagai arena balas dendam partai politik yang kalah pada pemilu tahun lalu. Kalau benar adanya demikian, maka rakyat telah salah memberikan kepercayaan selama ini kepada mereka-mereka yang duduk di parlemen. Apabila tidak ada perubahan sikap yang mendasar dan tidak bersedia menanggalkan agenda politik kelompoknya, jangan berharap pada pemilu-pemilu mendatang, rakyat akan bersimpati menentukan pilihannya kembali.

**Riris Herawati**  
*ririsherawati@yahoo.com*

**Pemakzulan Bukan Solusi**

Aksi para mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Nusantara, 29 Januari lalu, sepakat menyetujui adanya pemakzulan terhadap presiden. Mereka mengatakan tiga serangkai yakni SBY, Boediono, dan Sri Mulyani adalah orang yang keji dan munafik. Mereka menilai ketiga orang itu telah mencuri uang negara dengan mengeluarkan bailout Rp6,7 triliun untuk Bank Century. Sebenarnya isu pemakzulan (impeachment) terhadap Presiden atau Wapres tidak

relevan untuk dibicarakan. Pemakzulan bukanlah masalah yang remeh karena diatur dalam undang-undang secara spesifik. Dan syarat apa saja yang memungkinkan presiden ataupun wakil presiden dimakzulkan sangat jelas dalam konstitusi. Tidak mudah memang keputusan pahit itu diambil, namun bukanlah sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Apabila terjadi salah guna kekuasaan yang melanggar UUD 1945, maka seorang presiden bisa diturunkan dari jabatannya. Kita berharap seluruh komponen bangsa untuk membangun demokrasi yang lebih sehat, bukan saling jegal untuk memuluskan kepentingan masing-masing. Tanpa mau melihat kepentingan bangsa secara luas. Pemakzulan bukanlah solusi dalam memperbaiki keadaan bangsa, mungkin akan sebaliknya, malah muncul konflik antar masyarakat itu sendiri. Bila ingin memimpin negeri tunggu pemilu yang akan datang.

**Hasanuddin**  
*hasan\_200@plasa.com*

**Demonstrasi Tidak Efektif**

Demo-demo makin marak terjadi beberapa bulan belakangan ini. Saya dan mungkin sebagian kelompok masyarakat tidak anti terhadap demo asalkan jelas arah dan tujuannya dan dilakukan secara tertib dan tidak mengganggu orang lain. Namun saya mempertanyakan efektivitas dari demo itu sendiri, apa menguntungkan bagi si pendemo? Seharusnya ketidakpuasan oleh mahasiswa atau intelektual kampus dapat ditunjukkan dengan aksi nyata dengan upaya memberdayakan masyarakat. Misalnya dengan memberikan pendidikan kepada masyarakat sesuai bidang akademisnya, semisal pemberantasan buta huruf, pendidikan akuntansi sederhana untuk UKM PKL, penerangan hukum untuk masyarakat awam. Kalau ini dijalankan akan lebih dapat menuai simpati masyarakat dan nama anda akan menjadi harum. Ketimbang melakukan demo untuk menaikkan popularitas secara instan, apalagi kalau diliput media dan berpotensi diwawancarai oleh media. Saya harap, saran saya bisa sebagai masukan untuk kalangan aktivis karena saya melihat masyarakat sekarang sudah lebih cerdas dibandingkan tahun 1998 dan tidak mudah terprovokasi.

**Slamet Riyanto**  
*ryanto\_sudomo@yahoo.co.id*

PASTIKAN

TARIF IKLAN BERITA INDONESIA

Halaman	Ukuran	Harga
Jacket Cover	204 x 268 mm	Rp. 40.000.000
Cover 2	204 x 268 mm	Rp. 20.000.000
Cover 2 Plus	408 x 268 mm	Rp. 35.000.000
Cover 3	204 x 268 mm	Rp. 17.000.000
Cover 3 Plus	408 x 268 mm	Rp. 30.000.000
Cover 4 (Kulit Belakang Luar)	204 x 268 mm	Rp. 25.000.000
1 Hlm Dalam (Full Page)	204 x 268 mm	Rp. 12.000.000
1 Hlm Dalam Berhadapan (Facial Page)	408 x 268 mm	Rp. 25.000.000
1 Hlm Dalam Tengah (Center Page)	408 x 268 mm	Rp. 32.000.000
Advertorial / Pariwara	204 x 268 mm	Rp. 12.000.000
2/3 Hlm Vertical Trimmed	204 x 213 mm	Rp. 9.000.000
2/3 Hlm Horizontal Trimmed	153 x 268 mm	Rp. 8.000.000
1/2 Hlm Horizontal Trimmed	102 x 268 mm	Rp. 7.000.000
1/2 Hlm Vertical Trimmed	204 x 134 mm	Rp. 6.000.000
1/3 Hlm Vertical Trimmed	204 x 67 mm	Rp. 4.000.000
1/3 Hlm Horizontal Trimmed	51 x 268 mm	Rp. 3.000.000

Iklan kuping (kanan & kiri) minimal lima kali pemuatan ⊗ Rp. 5.000.000

PEMASANGAN IKLAN:

Telp. (021) 83701736, 8292735, 70930474

Fax. (021) 83787235



## Tempat Anda untuk Berlangganan Majalah BERITAINDONESIA

Anda yang berada di luar Pulau Jawa dapat menghubungi alamat di bawah ini :

**BANDA ACEH** : BTN Ajuen, Lr Melati No. 118 Kec, Peukan Bada, Banda Aceh 23351. Tlp (0651)41093, **MEDAN** : Komplek Vila Palm Kencana Blok R No. 10 KM 12, Medan-Binjai 20351. Tlp (061)8460646, **SIANTAR** : Jl. Ramping No. 18, Pematang Siantar, **LABUHAN BATU** : Jl. Padang Bulan No. 28, Rantau Prapat. **KARO** : Jl. Sangab Enlau No. 51 Kaler Jahe. **RIAU** : Jl. Ababil No. 15B Rt 07 Rw. 07, Kel. Kampung Melayu, Kec. Sukajadi Pekanbaru 28124, Riau. Telp (02761) 26578, **RIAU UTARA** : Perum Beringin Patra Gg. Poros No. 3 Rt 02/09, Bukit Datuk, Dumai 28825. Telp (0765)36219. **RIAU SELATAN** : Jl. Pattimura No. 28C Rt. 06/02, Kel. Skip Hilir, Rengat Timur, INHU, Riau. Telp (0769)21932, **RIAU KEPULAUAN** : Jl. Sri Pulau Gg. Kayu Manis No. 129W Rt. 03/02, Kel. Bengkalis Riau. Telp (0766)22924, **PADANG** : Jl. Pamancingan I No. 1Rt. 006/02 Kel. Pasar Gadang, Padang Selatan, Sum-Bar 25210. Telp (0751)27289, **JAMBI** : Jl. Depati Purbo, Komplek Karya Telawai Permai II No. 06 B, Kel. Pematang Sulur RT 16, Kec. Telanaipura, Kota Jambi. Telp 081366106709, **BENGKULU** : Jl. Kemang Manis No. 8 Rt. 08/Rw. 2, Kel. Sawah Lebar, Kec. Gading Cempaka, Kodya Bengkulu 38228. Telp (0736)20663, **PALEMBANG** : Perum Mas Karebet Blok A1 No. 15 Palembang 30154. Telp (0711)416545, **MUARA ENIM** : Perum Gunung Ibul Blok C2 No. 8 Kab. Prabumulih Sumatera Selatan Telp (0713)322420, **PANGKAL PINANG**: Achmad Effendi, Jl. Sriwijaya RT.001/001, Gedung Nasional, Taman Sari. **LAMPUNG** : Jl. Wiraswasta No. 23 Rt. 02 Lk. I Kel. Gedong Meneng, Kec. Kedaton, Bandar Lampung 35145. Telp (0721)701281, **KOTABUMI** : Jl. Jend. Sudirman No. 49 Kota Gapura Kotabumi Lampung Utara. Telp (0724)328369, **PONTIANAK** : Jl. Karimata No. 19, Kelurahan Sui Bangkong Pontianak 78116, **SINGKAWANG** : Jl. Pembangunan Gg. Sukaramah No. 27A Singkawang Kal-Bar, **SINTANG** : Jl. Imam Bonjol No. 54 Sintang 78611. Telp (0562)21544, **KETAPANG** : Jl. Kol. Sugiono No. 48 Ketapang, **BALIKPAPAN** : Jl. Sepinggan XI, Rt 33 No. 6, Kel. Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan, Kodya Balikpapan 76115. Telp (0542) 764365, **PASIR** : Jl. Ki Hajar Dewantara No. 12 Rt. 05 Rw. 02 Tanah Groboti Kab. Pasir, Kal-Tim. Telp (0543)22335, **SAMARINDA** : Jl. Laisitarada III, Perum Bukit Indah Blok B No. 6, Kel. Sel Kunjang Samarinda. Telp (0541)273035, **BERAU** : Jl. SM Aminuddin No. 749 Tanjungredep Kab. Berau Kal-Tim. Tlp (0554)23130, **BANJARMASIN** : Komplek Kayu Tangi I No. 28 Rt. 45, Kec. Banjar Utara Banjarmasin 70123. Telp (0511)304396, **PALANGKARAYA** : Jl. Karanggan No. 1 Kelurahan Tanjung Pinang, Kec. Pahandut, Kodya Palangkaraya 73113, Kalimantan Tengah. Telp (0536)38958, **PANGKALAN BUN** : Jl. Perwira No. 1 Rt/Rw 05, Kel. Mendawai, Kec. Arsel, Pangkalan Bun Kal-Teng. Telp (0532)24452, **KAPUAS** : Jl. Seroja No. 2 Selat Dalam, Kuala Kapuas, Kal-Teng. Telp (0513)24082, **BUNTOK** : Jl. Ampah Buntok, No. 24 Rt. 40. Ampah, Barito Selatan, Kal-Teng. Telp (0622)31334, **MANADO** : BTN Nusantara Permai Blok C No. 11 Mapanget Barat, Manado 9524, **MAKASSAR** : Komplek Mangasa Permai Jl. Tallasalapang II Blok J1 No. 12, Makassar, Sul-Sel. Telp (0411)863655, **PAREPARE** : Jl. Wakke'e No. 5 Parepare Sul-Sel. Telp (0421)22785, **GOWA** : Jl. Syekh Yusuf V/I Gowa. Telp (0411)861661, **BONE** : Jl. Hussain Jeddawi Baru No. 9A, Bone, Sul-Sel. Telp (0481)2000041, **PALOPO** : Jl. Imam Bonjol No. 3 Palopo. Telp (0471)24310, **PALU** : Jl. Tulip II No. 1, Perumnas Balaroa, Palu, Sul-Teng. Telp (0451)460717, Fax. (0451)460717, E-mail: ypi\_calebaswustho@yahoo.com. **KENDARI** : Jl. A. Yani 204 Kendari, Telp (0401) 390913, HP. 081320696320 a/n. S. Edi Nurrahman. **BUTON** : Jl. MH. Thamrin No. 32A, **AMBON** : BTN Kanawa Indah Blok C-3 No. 12 Air Kuning, Ds. Batumerah Kodya Ambon, Maluku 97128. Telp (0911)310427, **TIMIKA** : Jl. Pendidikan No. 10, Desa Kopra Kopa, Kec. Mimika Baru, Kab. Mimika/Timika, Irian Jaya, **KUPANG** : Jl. Trikora No. 16 Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Air Mata, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang NTT 85000, **BELU** : Perum Ray Belu Permai A/9, Belu. Telp (0389)22408, **MATARAM** : Jl. R. Suprpto No. 37 Ampenan, Kodya Mataram 83000. Telp (0370)632331, **LOMBOK** : Jl. Pejangik No. 66 Pancor. Lombok. Telp (0376)21718, **SUMBAWA** : Jl. Hasanuddin Gg. Teratai, Sumbawa. Telp (0371)21070, **BALI** : Jl. Buana Raya Gg. Buana Kerti No. 3 Pd.Sambian Denpasar Barat 80117. Telp (0361)485890, **MALAYSIA** : 32 Jalan Tengku Ampuan Zabedah 9/A, 40100 Shah Alam, Selangor. Telp (03)55137009, **NEW ZEALAND** : Ikhwani Triatmo. **JAWA BARAT** : Ade Wiharyana, Jl. Purnawarman No.5, Bandung – **TARAKAN** : S.L. Pohan, Jl. Gereja Rt.17 No.59, Markoni, Tarakan - Kaltim 771211 – **PURWAKARTA** : Bernard Sihite, Kantor Perwakilan PWI, Jl. KK Singawinata No.23, Purwakarta, Tlp. (0264) 205081

# Kesalahan Fatal RPM

**Rancangan Peraturan Menteri (RPM) tentang Konten Multimedia berparadigma otoriter, melanggar UU Pers dan UU Penyiaran serta ingin melangkahi UU kebebasan berpendapat dan berbicara.**

**E**ntah berniat baik atau hendak membelenggu, rencana Kementerian Komunikasi dan Informatika menerbitkan Rancangan Peraturan Menteri (RPM) untuk melindungi para pengguna internet dari konten-konten yang merugikan, menuai kontroversi dan penolakan dari masyarakat khususnya para pengguna internet. Peraturan ini dianggap membatasi kebebasan publik dalam melakukan interaksi di internet dan sebuah kemunduran demokrasi yang mengarah pada cara-cara masa Orde Baru yang mengekang kebebasan berpendapat.

Pada dasarnya rancangan peraturan ini bersifat sensor. Sejumlah pasalnya melarang penyelenggara jasa multimedia mendistribusikan konten yang dianggap ilegal (konten pornografi, konten yang melanggar kesusilaan, informasi perjudian, merendahkan pihak lain, berita bohong, kebencian, SARA, pemerasan, kekerasan, dan privasi orang lain). Ia juga mengatur fungsi penyelenggara dan Tim Konten Multimedia sebagai lembaga sensor, untuk memantau, menyaring, serta memblokir konten ilegal. Pertanyaannya, ilegal menurut siapa?

Peran Tim Konten Multimedia pun dikhawatirkan akan sama dengan peran Departemen Penerangan zaman Orba. Tim Konten Multimedia bisa menjadi sebuah lembaga *superbody* (sangat berkuasa) karena secara aktif mengawasi hingga memberikan sanksi, dari sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha bagi penyelenggara jasa internet.

Kesalahan fatal RPM adalah penanggungan jawab terletak pada logika bahwa penyelenggara konten menjadi penanggung jawab isi. Padahal, dalam dunia maya, penyelenggara konten tidak memiliki kekuasaan terhadap konten yang dibuat oleh penulis atau pengunggah (*peng-upload*). Keanehan lainnya, SIUP (Surat Izin Usaha Penerbitan) dibuat, namun orang yang membuat web harus seizin menteri.

Pihak Kemenkominfo sendiri menegaskan bahwa rancangan peraturan menteri (RPM) tentang konten multimedia tidak akan membredel pers. Namun lebih ditujukan pada konten multimedia yakni internet untuk mengatur penerimaan pengaduan masyarakat atas konten situs yang dianggap melawan norma yang berlaku di masyarakat. Gatot Dewabroto,



Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemenkominfo kepada pers mengatakan bahwa rancangan ini tidak secara langsung masuk ke ranah pers. Walau secara mendasar ada empat UU yang menyinggung di situ, termasuk UU Telekomunikasi, UU Penyiaran, UU Pers, dan UU ITE. Di sini menyinggung pers ketika multimedia erat kaitannya dengan media *online*.

Seperti diketahui pengelola konten-konten internet banyak juga yang dari media massa dengan berbasis situs berita *online*. Bilamana ini diterbitkan sebagai peraturan maka sebagian besar media *online* akan terkena sensor. Begitu juga dengan media televisi yang menyiarkan *content*-nya melalui video *streaming* Internet pun bisa ikut terbelenggu. Apalagi pelarangan konten itu dilakukan berdasarkan laporan publik. Untuk orang awam tidak terlalu mempermasalahkannya ini. Yang dikhawatirkan, mereka yang memiliki kekuasaan dan pengaruh di negeri ini akan menyalahgunakannya untuk mengancam keberadaan media *online* tersebut.

Sebenarnya UUD 1945 pasal 28E ayat 3 telah menjamin hak kebebasan berpendapat publik. Bahkan RPM yang diusulkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring tersebut memiliki kedudukan yang lebih rendah daripada UU pers. Masih dua tingkat di bawah UU, papar Roy Suryo anggota Komisi I DPR RI. Pembatasan seharusnya

dituangkan dalam Undang-Undang, tidak bisa langsung dengan peraturan menteri. Bahkan peraturan tersebut dianggap tidak memiliki dasar hukum jika tidak ada UU yang secara spesifik yang mengatur mengenai konten media.

Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD seperti dilansir *Media Indonesia* mengatakan, peraturan menteri tersebut tidak dapat membatasi kebebasan berpendapat. Pasal dalam UUD 1945, yang mengatur kebebasan berbicara, mengeluarkan pendapat, baik tertulis maupun lisan, termasuk kebebasan pers hanya boleh diatur oleh UU. Aturan itu ditegaskan oleh Pasal 28J Ayat 2 UUD 1945 tentang pembatasan kebebasan. Yang menyebutkan setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) secara tegas juga menyatakan menolak Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika mengenai konten multimedia karena dinilai bertentangan dengan Undang-undang Pers. Kode Etik Jurnalistik dianggap dapat dijadikan sebagai sarana regulasi konten pers, baik cetak, internet maupun penyiaran. UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers pada Pasal 4 ayat (2) UU Pers mengatakan, "terhadap pers tidak dikenakan sensor, bredel dan larangan penyiaran" dan ayat (3) mengatakan "untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi".

Mengingat Menkominfo telah dua kali ingin merancang undang-undang dan mendapat reaksi dari masyarakat - sebelumnya pernah mengajukan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyadapan yang dinilai sebagai alat hukum untuk melemahkan KPK, hakim Konstitusi Akil Mochtar mengingatkan Kemenkominfo untuk memperhatikan tata hukum dalam membuat aturan perundang-undangan.

Mengutip pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (18/2), sebaiknya rancangan itu diujajaki dulu dan menteri mengajak dialog pihak terkait. Menteri dan jajarannya juga tidak mengeluarkan pernyataan yang terlalu dini yang bisa menimbulkan salah persepsi di kalangan masyarakat. ■ RB



## Hotel Prodeo Bintang Lima

**10/01** - Inspeksi mendadak dilakukan Satgas bentukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke rumah tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Sidak yang dilakukan Yunus Husein, Denny Indrayana dan Mas Ahmad Santosa menguak keberadaan terpidana kasus suap Artalyta Suryani alias Ayin dan Limarita alias Aling yang mendekam di dalam penjara, bagai tinggal dengan fasilitas yang tidak jauh dari sebuah hotel berbintang. Kamar khusus dengan ukuran 3x3 meter persegi ini dilengkapi dengan dinding bermotif daun

dan bunga bernuansa hitam putih, yang dipadu meja kerja mewah dilengkapi sejumlah kursi bantal kecil, serta televisi layar datar 20 inci yang menempel di dinding, perlengkapan tata suara dan home theatre, dispenser, dan pendingin ruangan. Serta telepon genggam merek Blackberry. Yang semuanya dibelikan sendiri dan kepemilikannya diatasnamakan ke unit Dharma Wanita pegawai di rutan. Pasca sidak ini, banyak kalangan memprotes hingga Artalyta akhirnya dipindahkan ke rumah tahanan perempuan Tangerang, Banten.

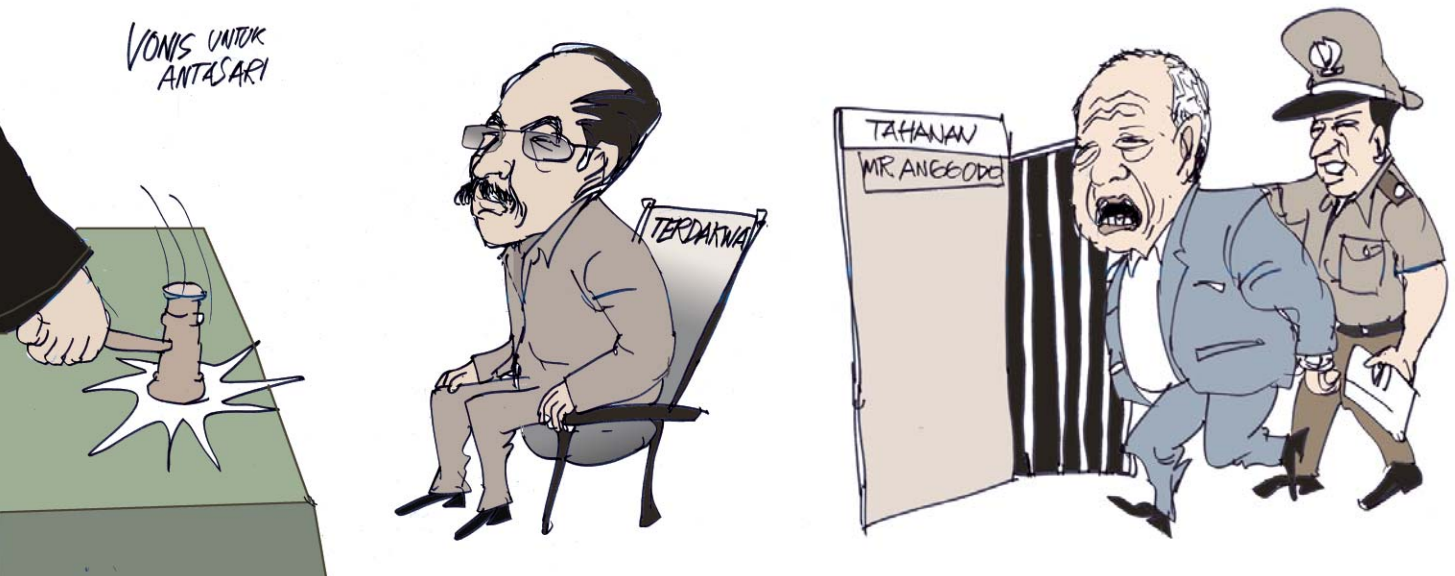
## Sisminbakum Jadi SAHB

**19/01** - Demi memaksimalkan pelayanan yang lebih baik, transparan dan akuntable, Kementerian Hukum dan HAM mengubah Sistem Administrasi Badan Hukum yang sebelumnya disingkat dengan Sisiminbakum menjadi Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Sudah kita ketahui sebelumnya, Sisiminbakum menjadi polemik, karena sejumlah pejabat kementerian beserta investornya harus merasakan sesaknya penjara akibat sistem yang rawan dikorupsi tersebut. Dengan SABH, pengganti dari sistem lama yang sebelumnya dikelola oleh pihak swasta ini, Kementerian Hukum dan HAM bisa memberikan pelayanan lebih baik kepada masyarakat. Pengelolaan SABH ini melibatkan PNS dan CPNS yang berada di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Dan seluruh penerimaan 100 persen menjadi PNBP.

## Jumlah Cabang Olahraga PON 2012 Dikurangi

**06/02** - Sejumlah cabang pertandingan tidak akan dipertandingkan dalam Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-18 di Riau tahun 2012 nanti. Dari sejumlah cabang yang dipertandingkan pada PON ke-17 tahun 2008 di Kalimantan Timur akan dicitkan menjadi 35-39 cabang. Seperti cabang *hockey*, *dance sport*, dan

## Karikatur Berita



drum band. Beberapa nomor pertandingan juga akan dikurangi dari 756 menjadi hanya 533 nomor. Hal ini dilakukan setelah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) melakukan hasil evaluasi yang akan memprioritaskan cabang-cabang olahraga yang berprospek meraih prestasi di tingkat Internasional. Dan PON akan menjadi ajang mencetak prestasi di SEA Games dan Olimpiade.

### Babe, Kasus Terbesar dan Fenomenal

**07/02** - Korban pembunuhan berantai Babe alias Baekuni (49) yang ditangkap pada 8 Januari 2010 bertambah menjadi mencapai 14 orang. Jumlah ini diperoleh berdasarkan keterangan Babe yang mengaku telah membunuh 4 bocah lagi, sejak tahun 1993. Ke 4 bocah tersebut yakni Fery (11), Doli (11), Adit (12) dan Kiki (12) yang dibawa dari Jakarta dan dibantai di daerah. Kapolda Metro Jaya Irijend Pol Wahyono mengatakan kasus Babe merupakan kasus terbesar dari kasus fenomenal lainnya seperti kasus Robot Gedeg yang juga memutilasi 11 korban serta kasus Ryan.

### Tarif Pesawat Naik 10% mulai Maret 2010

**11/02** - Mulai Maret 2010, tarif angkutan udara akan mengalami kenaikan sekitar 10 persen. Diberlakukannya kenaikan tarif akibat komponen fuel sur-

charge (biaya tambahan bahan bakar) dengan tarif dasar yang sebelumnya fuel surcharge termasuk komponen independen yang berdiri sendiri. Namun, sesuai revisi Keputusan Menteri (KM) No.9 tahun 2002 diteken oleh Menteri Perhubungan, biaya itu akan menjadi satu dengan tarif dasar (menjadi batas atas). Besarnya kenaikan tersebut akan langsung ditentukan sendiri oleh pemerintah. Contoh perincian tarif tiket, rute Jakarta-Yogyakarta yang ditawarkan dengan harga Rp 908 ribu (tarif dasar+fuel surcharge+PPN+asuransi) akan naik sekitar 10% menjadi Rp 1.066.000 (tarif dasar+PPN+asuransi). Maskapai penerbangan wajib mencetak tiket pesawat dengan rincian komponen harga agar penumpang mengetahui apa saja yang dibayarnya.

### Antasari Divonis 18 Tahun Penjara

**11/02** - Sidang kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran, Nasrudin Zulkarnaen akhirnya berakhir. Jaksa penuntut umum yang semula menuntut hukuman mati Antasari, mantan Ketua KPK ini, akhirnya divonis 18 tahun penjara dalam sidang Pengadilan Negeri di Jakarta Selatan. Begitu juga dengan Wiliardi Wizard yang mendapat vonis 12 tahun penjara, Sigid Haryo Wibisono divonis 15 tahun penjara dan Jerry Hermawan Lo divonis lima tahun penjara. Jaksa penuntut menilai, Antasari terbukti menganjurkan orang lain melakukan pembunuhan sehingga melanggar Pasal 55 ayat 1 ke-1

juncto Pasal 55 ayat 1 ke-2 juncto Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

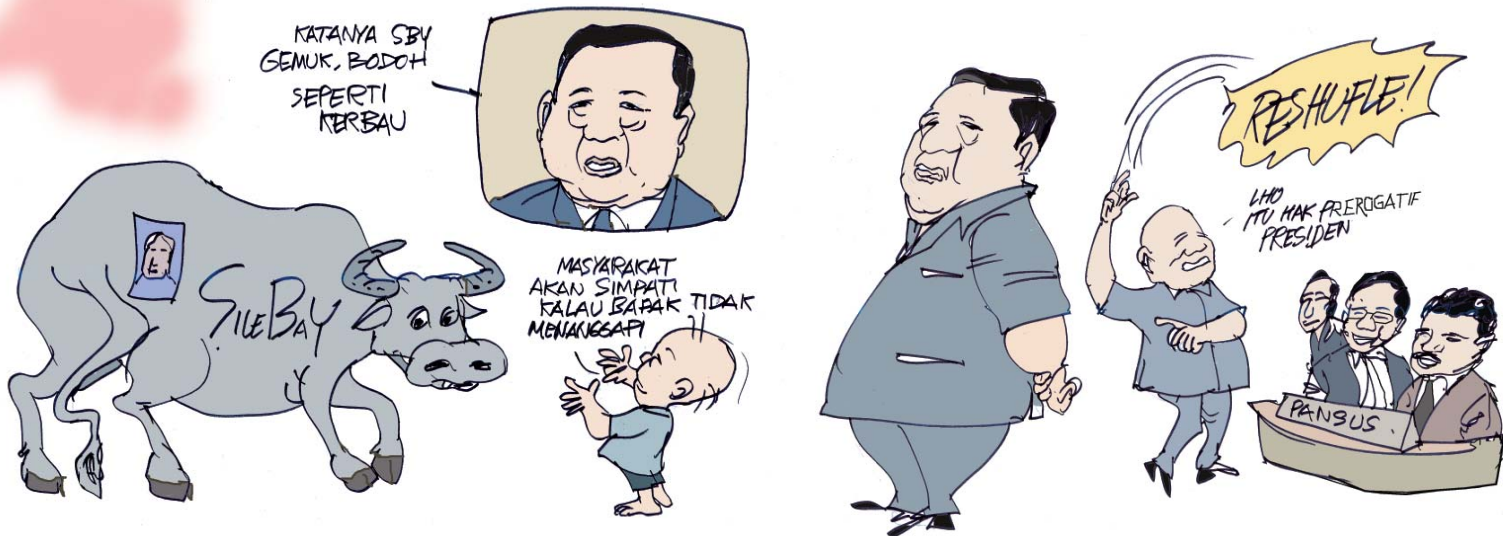
### Anggodo Ditahan di Penjara Cipinang

**15/02** - Anggodo Widjojo, adik buron tersangka Anggoro Widjojo akhirnya ditahan di Rumah Tahanan Cipinang, Jakarta. Anggodo ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketua KPK Tumpak Hatorangan mengatakan, Anggodo dijebloskan ke penjara karena dua tuduhan utama. Dia diduga melakukan percobaan suap kepada pimpinan KPK, serta menghalangi penyidikan kasus korupsi pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu di Departemen Kehutanan-dengan tersangka Anggoro Widjojo, Direktur PT Masaro Radiokom. Kasus Anggodo bermula dari terungkapnya rekaman sadapan pembicaraan Anggodo dengan beberapa pihak, termasuk dua petinggi Kejaksaan Agung, mantan Jaksa Agung Muda Intelijen Wisnu Subroto dan Wakil Jaksa Agung Abdul Hakim Ritonga yang diperdengarkan di Mahkamah Konstitusi.

### Carrefour Dimenangkan, KPPU Kasasi

**17/02** - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyiapkan langkah kasasi ke Mahkamah Agung (MA) atas putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta

## Karikatur Berita





Umumnya warga Tionghoa menjadikan Imlek sebagai momentum introspeksi diri dan pengharapan untuk nasib yang lebih baik pada masa depan. Merunut sejarahnya, tradisi merayakan Imlek yang tahun ini menginjak tahun ke-2561 telah dimulai sejak zaman Dinasti Han pada 551 sebelum masehi (SM).

Selatan yang memenangkan PT Carrefour Indonesia (Carrefour) dalam kasus monopoli, Rabu (17/2). KPPU meyakini jika keputusan KPPU No 9/KPPU/2009 tertanggal 3 November 2009, adalah benar. Materi putusan KPPU itu menyatakan, Carrefour terbukti melakukan monopoli dengan mengakuisisi PT Alfa Retailindo. Kabag Litigasi KPPU, M Reza, menjelaskan, putusan PN Jaksel itu karena adanya perbedaan pandangan substansi antara majelis hakim dan KPPU. KPPU berkukuh pangsapa pasar

Carrefour mencapai 57,99 persen sesudah proses akuisisi Alfa dari sebelumnya 48 persen. Sanksi tindak monopoli adalah Carrefour harus melimpahkan Alfa Retailindo kepada pihak yang tak berafiliasi dengan PT Carrefour dalam jangka waktu maksimal satu tahun. Carrefour juga diharuskan membayar denda Rp 25 miliar. Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim, Kusno, dalam putusannya, menyatakan menerima keberatan Carrefour terhadap putusan KPPU, sehingga peritel asal Prancis itu bebas

dari divestasi serta denda. Setelah putusan ini, pihak yang keberatan tidak memungkinkan melakukan banding, namun bisa kasasi.

## Empat Fraksi Sebut Nama

**23/02** - Sembilan fraksi yang ada di Panitia Khusus (Pansus) DPR terkait kasus pemberian dana talangan (bail out) Bank Century Rp 6,7 triliun akhirnya menyatakan pandangannya. Empat fraksi terdiri dari Partai Golkar, PDI-P, PKS, dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) menyebutkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono (menjabat Wakil Presiden) sebagai pihak yang diduga bertanggung jawab dalam kasus tersebut. Sebanyak 560 kursi di DPR, empat fraksi ini memiliki 274 kursi atau 48,93 persen. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang memiliki 26 kursi (4,64 persen) menyebutkan instansi dan jabatan yang bertanggung jawab. Sedangkan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan PAN yang jika digabung memiliki 15 persen kursi di DPR hanya menyebutkan instansi yang bertanggung jawab dalam kasus ini. Partai Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang jika dijumlah memiliki 176 kursi atau 31,4 persen dari semua kursi di DPR, menyatakan tidak ada masalah dalam proses bail out dan pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek untuk Bank Century pada November 2008.



# Rapor Merah Pemb



Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

**Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan segenap lingkaran kekuasaannya menilai sendiri kinerjanya, terutama dalam pemberantasan korupsi, sangat berhasil. Presiden juga menyatakan puas atas pencapaian program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu 2 (KIB 2). Namun, banyak pihak, di luar pemerintahan, justru menilai sebaliknya, gagal, rapor merah, yang antara lain terekspresikan dalam demonstrasi 28 Januari 2010, bertepatan 100 hari KIB 2. Api semangat pemberantasan korupsi pun kini memudar.**

**P**ada masa kampanye, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono selalu mengedepankan tekad memberantas korupsi. Mereka pun terpilih dalam Pilpres 8 Juni 2009 dengan meraih 60,8 persen suara. Kemudian Presiden SBY dan Wakil Presiden Boediono dilantik pada 20 Oktober 2009. Dalam pidato pelantikannya, Presiden SBY mengemukakan telah menetapkan program 100 hari, program satu tahun, dan program lima tahun ke depan. Esensi dari program pemerintahannya adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, penguatan demokrasi, dan penegakan keadilan. *"Prosperity, Democracy and Justice."*

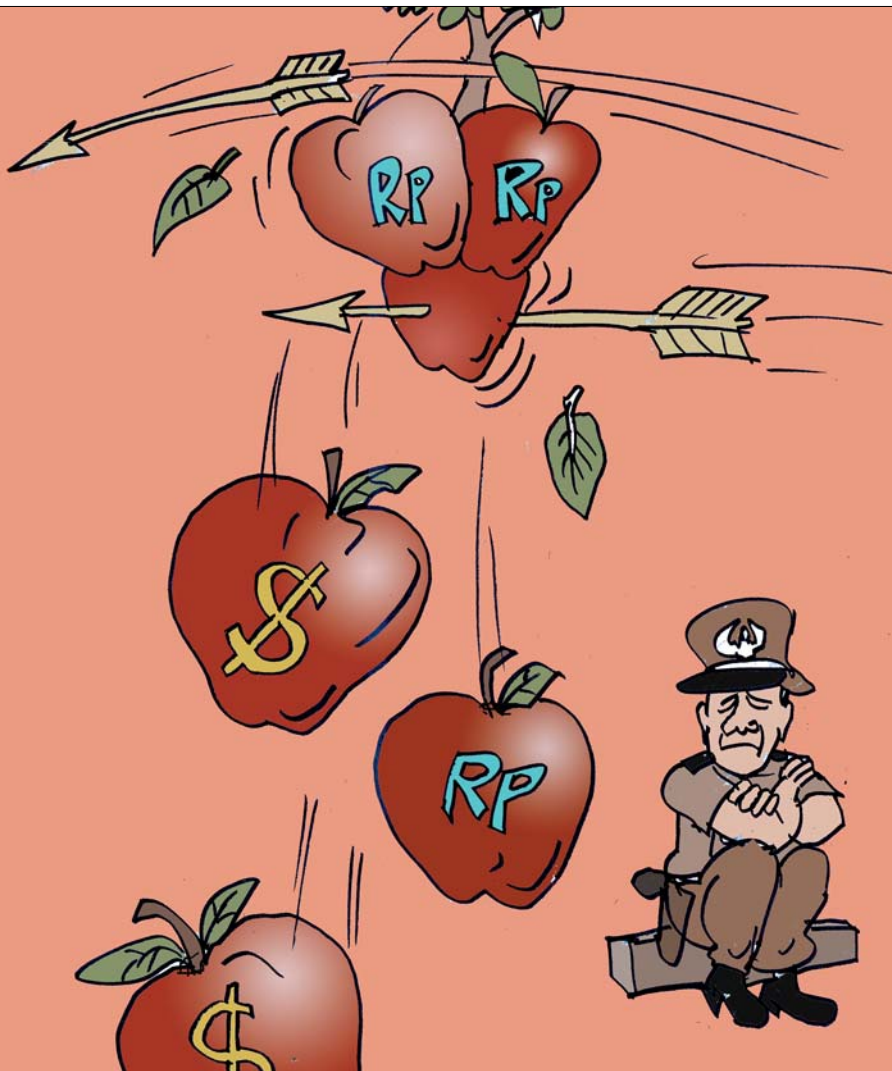
Kemudian, 28 Oktober 2009, Kabinet Indonesia Bersatu 2, dilantik. Lalu, sesuai memimpin rapat paripurna kabinet, di kantor kepresidenan, Kamis, 5 November 2009 sore, Presiden SBY didampingi Wapres Boediono dalam keterangan pers mengemukakan, ada 45 program aksi (penting) yang akan dijalankan pemerintah. Dari 45 program aksi itu, 15 di antaranya sebagai Program Pilihan yang wajib diimplementasikan dalam jangka waktu 100 hari pertama.

Di antaranya, pemberantasan mafia hukum, revitalisasi industri pertahanan, penanggulangan terorisme, mengatasi permasalahan listrik, meningkatkan produksi dan ketahanan pangan, peningkatan infrastruktur, meningkatkan pinjaman Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang dikaitkan dengan Kredit Usaha Rakyat, mengenai pendanaan, melakukan reformasi kesehatan dengan mengubah paradigma masyarakat, reformasi di bidang pendidikan, kesiap-siagaan dalam penanggulangan bencana alam, melakukan koordinasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan di segala bidang.

Program 100 Hari ini, menurut Presiden SBY, harus dicapai karena ini tahap pertama untuk menyelesaikan tahun pertama. "Tahun pertama tidak ringan, *critical*, agar lima tahun ke depan lebih baik lagi pembangunan kita. Setelah ini akan lebih banyak bekerja karena sudah kita siapkan semua, rencana dan persiapan yang baik ini. Kalau kita tidak punya rencana dan arah, apa yang akan kita laksanakan akan gagal," tegas SBY.

Lalu, Kamis (14/1/2010), beberapa hari

# erantasan Korupsi



menjelang usai 100 hari, diadakan rapat kabinet paripurna membahas evaluasi program 100 hari di Kantor Kepresidenan, Jakarta. Presiden SBY menyatakan puas dengan pencapaian kinerja Kabinet Indonesia Bersatu Kedua (KIB II) dalam 100 hari pertama itu.

Ketua Unit Kerja Presiden untuk Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto, mengemukakan rasa puas Presiden SBY itu kepada pers. Menurut Kuntoro, hingga hari ke-75 dari program 100 hari pertama, hanya dua dari 129 rencana aksi yang dinilai mengecewakan, di antaranya revitalisasi industri. Itu pun hanya masalah keterlambatan. "Tapi secara meny-

luruh capaiannya menggembirakan karena semua sudah sinkron dan sudah sejalan dengan yang sudah dicapai," jelas Kuntoro.

Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring menimpali pencapaian target program 100 hari pertama sudah mencapai 82 persen pada hari ke-75. Sisanya, dikejar dalam waktu tiga pekan lagi menjelang batas akhir 1 Februari 2010 karena Presiden SBY menargetkan semua program aksi harus tercapai 100 persen.

Pemerintah mengklaim telah berhasil menuntaskan program 100 hari, khususnya di bidang perekonomian dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Menko Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan

program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu II seluruhnya berhasil. Dari 51 rencana aksi, beberapa hari sebelum 100 hari, hanya satu yang belum selesai yaitu revitalisasi industri pupuk dan pangan.

Hatta Rajasa, Rabu (27/1) mengklaim dalam sektor infrastruktur, pemerintah sudah mematangkan rencana pembangunan jalan 695 kilometer di sepanjang wilayah Sumatra dan Sulawesi. Pemerintah juga menyatakan bahwa sudah merampungkan draf final sistem logistik nasional (sislognas) sebagai bahan rujukan untuk pengembangan sistem logistik di Tanah Air sampai 2025. Menurut Hatta, distribusi angkutan barang maupun orang lebih efisien.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengekspos bahwa program layanan 24 jam di pelabuhan utama, seperti Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Makassar sudah tuntas. Selain itu, Kemenkeu mengklaim, program pembentukan perusahaan pembiayaan infrastruktur pun telah rampung.

Kemudian, dalam Rapat Kerja Pemerintah di Istana Kepresidenan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Rabu (3/2/2010) yang dihadiri Wakil Presiden Boediono, Ketua Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Darmin Nasution, seluruh menteri dan gubernur se-Indonesia, Presiden SBY menyatakan, berdasarkan pemantauan UKP4, target yang dicapai dalam program 100 hari KIB-2 sebesar 99 persen lebih. Dijelaskan, ada tiga kategorisasi pencapaian dalam program 100 hari. Pertama adalah yang digolongkan *quick wins*, seperti program yang terhambat pada periode sebelumnya dan dimulai dalam jangka waktu 100 hari pertama, yang diselesaikan dan bisa dipercepat.

Kedua, program yang digolongkan mengatasi *bottlenecking* (penyumbatan). Ketiga adalah instrumen atau penyusunan regulasi untuk pedoman dan implementasi pada tahun ini dan tahun mendatang.

Presiden memberikan contoh program *quick win*, yaitu revitalisasi kredit usaha rakyat (KUR) dengan potensi penyaluran tahun ini mencapai Rp 20 triliun dan setiap tahunnya nanti akan menjadi Rp 20 triliun lagi. Sertifikasi pertanahan, penyediaan air minum di 1.440 desa, internet untuk sekolah sebanyak 18.358 sekolah, pembangunan pabrik es di perkampungan nelayan, layanan pabean 24 jam di sejumlah pelabuhan, perekrutan 131 perawat di kepulauan terpencil, percepatan persyaratan perizinan usaha dari 75 hari menjadi 17 hari, serta percepatan pembuatan paspor.

Selain itu, papar Presiden, sumbatan dan simpul-simpul yang menghambat juga sudah bisa diformulasikan, di antaranya krisis listrik dalam jangka pendek dan panjang. Menurut Presiden, pada tahun 2010 ini, diharapkan bisa diatasi lagi dengan proyek listrik gelombang kedua 10.000 megawatt.

Proyek Banjir Kanal Timur yang terobosan pembangunannya dilakukan Gubernur DKI Sutiyoso, juga dikemukakan akan segera dirampungkan. Juga proses penyumbatan dalam proyek tol lintas Jawa dijadikan contoh upaya *debottlenecking*.

Perihal program 100 hari jenis yang ketiga, Presiden mengatakan akan diterbitkan PP dan Perpres, yang sangat pen-

ting untuk kebijakan dan regulasi ke depan, khususnya tentang jasa konstruksi, perubahan peruntukan hutan, tanah telantar, pendidikan kedinasan, penyelenggaraan tata ruang, kewenangan gubernur di wilayah provinsi, budi daya tanaman, pertambangan, maritim, tambang mineral serta Perpres lainnya.

Ketua Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto menjelaskan, dari 129 rencana aksi dalam 45 program 100 hari, ada dua program yang sebelumnya sempat terlambat, tetapi dapat diselesaikan, yaitu program revitalisasi pabrik gula dan pendirian PT Sarana Multi Infrastruktur untuk pembiayaan infrastruktur.

Dari sekian banyak pencapaian-pencapaian yang disebut oleh pemerintahan SBY ini, di lain pihak, banyak kalangan yang tidak puas dengan kinerja KIB-2. Berbagai kelompok kritis masyarakat justru menilai sebaliknya, gagal. Mereka menunjuk beberapa indikasi yang membuat rakyat tidak puas. Antara lain, politik pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), skandal Bank Century yang aliran dananya diduga mengalir ke partai politik tertentu, dan perjanjian perdagangan bebas China-ASEAN (CAFTA) yang berpengaruh langsung pada kehidupan masyarakat.

## Rapor Pemberantasan Korupsi

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, program 100 hari pemerintahan SBY-Boediono dalam bidang pemberantasan korupsi penuh dengan angka merah. Menurut aktivis ICW, Danang Widoyoko (Koordinator), Illian Deta Arthasari (Koordinator Bidang Hukum dan Monitoring Peradilan), serta Febridiansyah dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (28/1/2010), hal ini ditandai dengan melunaknya komitmen, menguatnya kompromi, dan pembentukan Satgas pemberantasan mafia hukum ala pemaadam kebakaran serta tak adanya landasan strategis upaya pemberantasan korupsi selama lima tahun ke depan.

Danang Widoyoko berharap Presiden SBY seharusnya bekerja dalam satu tahun ini, berhenti berjanji, dan jangan hanya membuat album. "Supaya tahun depan masyarakat tidak bilang, SBY, cukup sampai di sini," ujar Danang.

Febridiansyah menimpali, melunaknya komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi, ditunjukkan dengan banyaknya pernyataan Presiden SBY yang mengkhawatirkan. Dari total 15 pernyataan selama 100 hari, sebanyak 66,67 persen dinilai mengkhawatirkan, bahkan mengancam pemberantasan korupsi lima tahun ke depan. Menurut Febri, hanya 20 persen pernyataan SBY yang mendukung



Terpidana kasus suap, Artalita Suryani di ruang tahana

pemberantasan korupsi.

Febri merinci pernyataan Presiden SBY yang dinilai mengkhawatirkan, antara lain, imbauan agar KPK menitikberatkan pada pencegahan. KPK diminta untuk tidak melakukan pengebakan-pengebakan. Terakhir, pernyataan SBY tentang kebijakan yang tidak dapat dikriminalkan.

Perihal upaya Presiden melawan mafia hukum dengan membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, menurut penilaian ICW, program tersebut hanya sekadar slogan. ICW menilai kerja Satgas mirip sinetron kejar tayang yang cenderung hanya menitikberatkan pada efek kampanye seolah program sudah sukses.

Indonesia Corruption Watch (ICW), Transparency International Indonesia (TII), Indonesia Budget Center (IBC) dan YAPIKA, secara bersama merilis siaran pers bertajuk 'Politik Pelemahan KPK di Era Presiden SBY' yang mereka sebut sebagai Kado Hari Anti Korupsi, 9 Desember 2009. Mereka menyimpulkan bahwa pengerdilan dan pelemahan KPK terjadi sangat intens di era pemerintahan SBY. (Selanjutnya baca artikel: *Taktik Lemahkan KPK*).

Mereka membeberkan "tigabelas jurus" yang pernah terjadi untuk melumpuhkan KPK, di antaranya: Judicial Review UU KPK ke Mahkamah Konstitusi; Ide pem-



annya yang penuh fasilitas kelas hotel berbintang

bubaran KPK; Penolakan pengajuan anggaran KPK; Serangan legislasi (*legislation attack*); Pengerdilan kewenangan penyadapan; Menghilangkan/mengaburkan kewenangan penuntutan KPK; Penarikan personal penyidik dan auditor; Upaya membekukan fungsi penyidikan dan penuntutan KPK; Rencana audit BPKP terhadap KPK; Ancaman terhadap investigasi kasus Bank Century; dan Kriminalisasi dan rekayasa hukum terhadap pimpinan KPK.

Dari pemeriksaan Tim 8, juga jelas terlihat, adanya kriminalisasi dan rekayasa hukum terhadap pimpinan KPK serta membeberkan fakta mafia hukum di tubuh Kepolisian dan Kejaksaan. Namun sampai saat ini, Kapolri dan Jaksa Agung masih tetap dipertahankan.

Indikasi pelemahan KPK juga semakin nyata dilihat publik dari proses persidangan mantan Ketua KPK Antasari Azhar yang dituntut mati karena didakwa sebagai aktor intelektual pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen, Direktur PT Putra Rajawali Banjaran. Banyak fakta yang terungkap di persidangan justru memperlihatkan adanya rekayasa yang menargetkan Antasari sebagai aktor intelektual pembunuhan berencana.

Namun, dalam vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis 11/2/2010,

hakim tampaknya mengabaikan fakta hukum di persidangan dan menghukum Antasari 18 tahun penjara. Putusan ini memang belum akhir, masih ada naik banding dan kasasi bahkan kemungkinan peninjauan kembali, untuk memastikan apakah vonis ini suatu penegakan hukum yang adil atau justru penyesatan hukum.

Di bawah kepemimpinan Antasari Azhar, KPK sempat semakin menunjukkan kemampuan dan keteguhan independensinya memberantas korupsi. Sebagai Ketua KPK, Antasari Azhar, kelahiran Pangkal Pinang, Bangka 18 Maret 1953, menunjukkan kepemimpinan yang menempatkan KPK pada posisi seharusnya sebagai lembaga yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan lembaga lainnya.

KPK di bawah kepemimpinan mantan Kepala bidang hubungan media massa Kejaksaan Agung (2000) dan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, ini memperlihatkan keberanian, profesionalitas, integritas dan eksistensinya yang tidak berada di bawah kendali pemerintah (eksekutif). Ia tidak gemar menghadap dan melapor kepada Presiden seperti pendahulunya Taufiequrachman Ruki dan Tumpak Hatorangan Panggabean.

Pada awal kepemimpinan Antasari Azhar, beberapa saat setelah ia dilantik

bersama empat anggota KPK lainnya di Istana Negara, Jakarta, Selasa (18/12/2007), KPK membongkar kasus suap dalam tubuh Kejaksaan Agung, juga menuntaskan kasus penyimpangan dana di Bank Indonesia yang melibatkan antara lain Aulia Pohan, besan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Pada saat baru dilantik, banyak pihak menduga Antasari sebagai seorang jaksa karir akan tunduk kepada Jaksa Agung dan Presiden sebagai atasannya, sebelum menjabat Ketua KPK. Namun, Antasari Azhar, justru membuktikan semakin teguhnya independensi KPK. Hal ini diduga membuat pemerintah merasa gerah, tidak nyaman. Tidak senyaman ketika Taufiequrachman Ruki memimpin KPK.

Tim penasihat hukum saat membacakan nota pembelaan untuk terdakwa Antasari Azhar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis 28/1/2010 mengemukakan semasa menjadi Ketua KPK, Antasari Azhar telah melakukan banyak sepak terjang dengan dijebloskannya banyak pejabat tinggi negara ke penjara. Sepak terjang Antasari juga merambat ke Kejaksaan Agung. Bahkan di kalangan kejaksaan, Antasari dianggap pengkhianat. Hal itu terlihat dari kasus Arthalyta dan jaksa Urip Tri Gunawan sehingga dua jaksa agung muda dicopot dari jabatannya.

KPK juga pernah memproses dan menjarakan eks petinggi Polri. Apalagi, masih ada banyak kasus melibatkan konglomerat yang dekat dengan kekuasaan, tapi tak sempat diajukan ke pengadilan karena Antasari keburu dijebloskan ke penjara. Tim penasihat hukum Antasari menyimpulkan semua prestasi dalam pemberantasan korupsi itulah yang justru akhirnya menyebabkan Antasari harus dicopot dari jabatannya sebagai Ketua KPK.

Dari fenomena politik pengerdilan dan pelemahan KPK secara sistematis tersebut terlihat melemahnya komitmen pemberantasan korupsi di era pemerintahan SBY, termasuk dalam 100 hari pemerintahan keduanya.

Pengerdilan dan pelemahan KPK yang terjadi secara sistematis dalam pemerintahan SBY diduga terkait dengan beberapa upaya KPK mengusut korupsi. Di antaranya tertangkap tangannya Jaksa Urip menerima suap dari Artalyta yang punya kedekatan dengan Presiden SBY, keberanian memenjarakan Aulia Pohan, besan SBY, karena korupsi di Bank Indonesia, serta dimulainya penyelidikan kasus korupsi teknologi informasi di KPU dan terutama kasus *bail out* Bank Century yang aliran dananya diduga digunakan partai politik tertentu untuk memenangkan Pemilu (legislatif maupun presiden).

Rapor merah pemberantasan korupsi, selain karena faktor politik pelemahan KPK sebagai lembaga independen, wajah (rapor merah) pemberantasan korupsi pemerintah sesungguhnya lebih terlihat dari kinerja Kepolisian dan Kejaksaan, sebagai lembaga yang secara struktural ada di bawah Presiden.

Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) di Jakarta, Senin (18/1/2010) menyatakan Kejaksaan Agung (Kejagung) tidak punya prestasi dalam pemberantasan korupsi dalam 100 hari pertama KIB-2. Dia menunjuk penanganan kasus Bank Century yang oleh Kejagung memasukkannya dalam program 100 hari kerja, ternyata masih belum dilimpahkan ke pengadilan.

Dia mengatakan penanganan perkara korupsi yang ditangani Kejagung benar-benar memprihatinkan. "Bisa dikatakan tidak ada kasus korupsi yang besar ditangani Kejagung, bahkan sebaliknya banyak kasus yang di-SP3," katanya. Menurut Boyamin, justru banyak ditemui jaksa nakal, baik di pusat maupun di daerah.

Boyamin Saiman menyebut, parameter keberhasilan pemerintah dalam pemberantasan korupsi, adalah kinerja Kejagung bukannya KPK. "Pasalnya KPK itu lembaga independen, dan Kejagunglah merupakan lembaga pemerintah," jelas Boyamin.

Penilaian serupa, sebelumnya (Jumat 15/1/2010), juga dikemukakan Indonesia Corruption Watch (ICW). Dalam penilaian ICW, Kejagung hampir dikatakan tidak memiliki prestasi yang membanggakan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi pada program 100 hari kerja. Menurut peneliti ICW, Febridiansyah, tidak adanya prestasi yang membanggakan di tubuh 'Korps Adhyaksa' itu, karena Presiden SBY tidak melakukan "reshuffle" untuk posisi Jaksa Agung.

Febridiansyah mengatakan jika posisi Jaksa Agung tidak di-reshuffle, maka sulit sekali Kejagung 'tancap gas' dalam pemberantasan korupsi dan mafia hukum di Tanah Air. "Posisi Jaksa Agung sangat penting sekali guna menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam memberantas korupsi, bukannya pada KPK. Karena KPK itu independen, bukan lembaga pemerintah," katanya.

Indonesia Corruption Watch (ICW), Transparency International Indonesia (TII), Indonesia Budget Center (IBC) dan YAPIKA menyimpulkan Presiden SBY belum berhasil memimpin pemberantasan korupsi. Hal ini dilihat dari wajah Kepolisian dan Kejaksaan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Prestasi Presiden baru terlihat dalam reformasi birokrasi di Departemen Keuangan. Selain karena faktor KPK, hal inilah yang mendorong naiknya skor Corruption Percep-



Aksi demo anti korupsi yang digelar 9 Desember 2009

tion Index (CPI) Indonesia.

Pemerintahan SBY sering kali menggambar-gambarkan keberhasilan memberantas korupsi dari naiknya skor CPI Indonesia hasil survey Transparency International (TI) dari 2.0 tahun 2004, 2.2 (2005), 2.4 (2006), 2.3 (2007), 2.6 (2008) menjadi 2.8 tahun 2009.

Seperti saat menjelang peringatan Hari Antikorupsi Sedunia tahun 2009 di Istana Negara, Selasa (8/12), Presiden SBY untuk kesekian kali mengklaim sejumlah prestasi pemberantasan korupsi selama lima tahun terakhir. Dimulai dari peningkatan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) hasil survei lembaga Transparansi Internasional untuk Indonesia (TII). Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tutur Presiden, terus membaik dari angka 2 pada 2004 menjadi 2,8 pada 2009.

SBY juga mengutarakan, dalam lima tahun ia telah menandatangani 138 izin pemeriksaan kasus korupsi terhadap penyelenggara negara. "Jumlah tertinggi dalam sejarah republik. Juga merupakan catatan baru dalam sejarah lima tahun terakhir ini karena penegakan hukum antikorupsi pun telah menyentuh pejabat negara hingga mantan menteri, gubernur, bupati/walikota, anggota DPR, DPRD, dan pejabat tinggi lainnya," katanya.

Namun, Wakil Koordinator ICW Emerson Yuntho menyebut komitmen Presiden SBY masih seperempat hati dalam memberantas korupsi, karena dari 500 ijin pemeriksaan yang diajukan kepada Presiden baru sekitar 134 yang disetujui.

Presiden juga menguraikan, adanya pe-

ningkatan penanganan kasus korupsi baik dalam jumlah kasus maupun uang negara yang berhasil diselamatkan. Presiden merinci, mulai 2009 kejaksaan telah menuntut 1.292 kasus korupsi dengan potensi keuangan negara yang berhasil diselamatkan adalah Rp4,8 triliun. Sedangkan kepolisian dalam kurun 2006-2009 melakukan penyidikan 767 kasus korupsi dengan uang yang berhasil diselamatkan Rp20 miliar.

Presiden menyebutkan, pemerintah telah berhasil menertibkan 39.477 rekening keuangan negara dengan potensi penyelamatan keuangan negara sebesar Rp35,92 triliun, US\$237,94 juta, dan 2,86 juta euro.

Namun TII sendiri menjelaskan, peningkatan skor IPK (CPI) Indonesia dalam lima tahun terakhir itu sangat dipengaruhi oleh meningkatnya harapan publik terhadap institusi independen KPK, dan reformasi birokrasi yang mulai dilakukan di departemen keuangan. Lebih dari itu, menurut TII, potret pemberantasan korupsi di Indonesia sangat suram.

ICW, TII, IBC dan YAPIKA menegaskan survey TI tersebut tidaklah boleh digunakan sebagai dasar legitimasi bagi pemerintahan SBY, bahwa pemberantasan korupsi yang terjadi di era pemerintahannya berhasil. Karena, publik sangat paham, keberadaan KPK secara tegas diatur UU sebagai lembaga independen yang tidak terpengaruh kekuasaan manapun, termasuk Presiden.

Selain itu, posisi CPI Indonesia di mata



Rapat kerja semua menteri dan gubernur se-Indonesia di Istana Cipanas, Cianjur, Jawa Barat (2/2)

internasional perlu dilihat secara komparatif dengan negara lain. Meskipun terjadi peningkatan, sayangnya Indonesia masih berada di jalur negara yang dicekam oleh tingkat korupsi yang akut.

Berhubung kasus kriminalisasi KPK dan Bank Century, dalam perkiraan ICW, TII, IBC dan YAPIKA, pada tahun 2010 ini skor Corruption Perception Index (CPI) Indonesia akan kembali turun.

Sekretaris Jenderal TII Teten Masduki mengingatkan agar hasil ini jangan membuat pemerintah sekarang berpuas diri. Apalagi, sejak 2004, kenaikan IPK Indonesia hanya 0,8. Dia mengkhawatirkan gelombang keras yang melanda KPK tahun ini, akan berdampak pada hasil IPK tahun 2010.

Menurut Teten, skor tersebut menunjukkan pemberantasan korupsi di Indonesia masih belum menunjukkan perubahan berarti. Dari indeks dengan skala 0 sampai dengan 10, di mana 0 berarti sangat korup dan 10 sangat bersih, Indonesia mendapatkan skor 2,8. Skor dalam IPK didapatkan dari penggabungan hasil 13 survei lain yang dilakukan oleh 10 institusi independen.

Koordinator ICW Danang Widoyoko juga memprediksi, capaian IPK Indonesia tahun 2010 bakal menurun. Lantaran sepanjang tahun 2009, Indonesia mengalami deraan hukum, khususnya penanganan kasus skandal Bank Century Tbk oleh KPK dan masih buruknya parameter pengelolaan keuangan negara oleh Depkeu. Menurut Danang, Indonesia masih di level negara korupsi lebih besar dibandingkan Malaysia dan Singapura.

### Ekonomi, Arah Tak Jelas

Rapor KIB-2 dalam 100 hari pertama di bidang ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat juga diklaim pemerintah berhasil memuaskan. Namun ekonom Tim Indonesia Bangkit Ichsanuddin Noorsy di Jakarta, Rabu (27/1/2010) justru mempertanyakannya. “Berbagai indikator yang disebutkan pemerintah tidak sesuai dengan ukuran masyarakat,” kata Ichsanuddin Noorsy di Jakarta. Noorsy justru menunjuk banyak indikator yang menunjukkan kegagalan pemerintah, seperti ketimpangan antara angka dan fakta serta harkat dan martabat masyarakat yang kian terpuruk. Selain itu, katanya, secara struktural, manusia Indonesia mulai menjadi bangsa kuli dan kuli di antara para bangsa.

Dalam pandangan Noorsy, Presiden lebih lancar dan bangga menjelaskan pada para pemodal asing, tetapi gagal dalam menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia. CAFTA, katanya, yang dampaknya jelas-jelas menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat bawah justru terus dijalankan.

Maka, menurut Noorsy, aksi-aksi gerakan massa seperti tanggal 28 Januari dan setelahnya tidak bisa dihindarkan. Dia melihat, rakyat setidaknya akan menuntut tiga hal, yakni pembubaran konspirasi neoliberal, stabilitas harga merujuk pada kepentingan (kondisi) domestik, dan pembubaran kabinet neoliberal. Noorsy sangat khawatir jika tuntutan-tuntutan ini tidak direspons akan berdampak pada krisis politik.

Pandangan hampir senada dikemukakan ekonom Universitas Gadjah Mada

(UGM) Revrison Baswir. Dia mengatakan, Program 100 Hari KIB-2 di bidang ekonomi tak memiliki arah yang jelas. “Arah yang ditempuh pemerintah tak sesuai amanat konstitusi,” kata Revrizon kepada SH, Rabu (27/1/2010).

Revrizon menjelaskan bahwa dalam konstitusi disebutkan, “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Namun, menurutnya, pemerintah malah mengabaikan hal tersebut. Misalnya saja dengan tetap mengimplementasikan perjanjian CAFTA yang jauh dari yang diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tersebut. “Bukan berarti saya antiperdagangan internasional, tapi yang terpenting saat ini adalah fair trade, bukan free trade,” cetusnya.

Dalam pandangan Revrizon, saat ini masalah yang terjadi bukanlah persaingan antara Indonesia melawan China atau negara ASEAN lainnya, tapi struktur masyarakat Indonesia. “Jelas FTA hanya menguntungkan golongan atas, sedangkan yang lemah akan tersingkir. Lagi pula, kita baru mendengar ribut-ribut soal CAFTA saat di ujung program 100 hari. Sebelumnya, tak terdengar,” tuturnya.

Namun, Menko Perekonomian Hatta Rajasa tetap optimis dengan kinerja para menteri dalam menyelesaikan program 100 hari. Dia mengemukakan indikator kinerja para menteri perekonomian dalam pencapaian program 100 hari terlihat dari produk yang telah dihasilkan, baik terbentuknya peraturan pemerintah maupun Keppres. Semuanya sudah pada draf final.

■ BI/BHS/MLP

# Pemerintah **Selalu Klaim Prestasi** KPK

**Presiden SBY dalam rangkaian politik pencitraan selalu mengklaim prestasi KPK (Komisi Pemberantas Korupsi) sebagai keberhasilan pemerintahannya. Padahal, prestasi Kepolisian dan Kejaksaan justru sangat memprihatinkan dalam pemberantasan korupsi.**

**D**alam rangka kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2009, Partai Demokrat, partai pemerintah, menampilkan iklan di televisi mengampayekan keberhasilan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberantas korupsi di Indonesia. Di iklan itu ditampilkan video maupun slide berupa gedung KPK dan Pengadilan Tipikor, lengkap dengan grafik Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang menggambarkan penurunan kasus korupsi selama pemerintahan SBY.

Namun, tayangan iklan dengan menggunakan logo KPK itu tak berlangsung lama. Lantaran mendapat sorotan dari masyarakat, terutama KPK. KPK mengimbau agar tidak menggunakan lambangnya dalam materi iklan politik dan komersial. "KPK kan lembaga milik negara, jangan dikomersilkan untuk kepentingan tertentu," seru wakil ketua KPK M Jasim di gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/10/2008).

Iklan tersebut bukanlah satu-satunya cara pemerintah dan Partai Demokrat mengklaim keberhasilan KPK dalam memberantas korupsi sebagai prestasi pemerintahan SBY. Baik Presiden SBY sendiri, maupun juru bicara presiden, para menteri dan kader Partai Demokrat selalu mendukung keberhasilan KPK seolah hasil kerja pemerintahan SBY.

Bagi masyarakat awam (yang tidak mengetahui eksistensi KPK sebagai lembaga negara yang independen, bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun, termasuk Presiden) klaim ini ditelan bulat-bulat. Ketidaktahuan masyarakat awam inilah yang dimanfaatkan untuk pencitraan (tebar pesona) demi kepentingan politik melanggengkan kekuasaan. Ketidaktahuan itu pulalah membuat masyarakat terkesima, bahkan mengamini hal ini sebagai etika politik yang santun. Ketidaktahuan itu pula menutup penglihatan bahwa hal itu suatu rangkaian dari proses



Presiden SBY saat membuka Rapim Polri 2010

pembodohan, melengkapai politik bantuan langsung tunai yang menggerus semangat kemandirian rakyat dan bangsa.

Namun, tentu, politik pencitraan, tebar pesona, yang memanfaatkan ketidaktahuan (untuk tidak disebut kebodohan) masyarakat, seperti itu, ada batasnya. Hal inilah menjadi tugas masyarakat terpelajar, dan media massa, untuk tidak membiarkan pemanfaatan ketidaktahuan masyarakat awam itu berlanjut terus-menerus.

## **KPK Independen**

Komisi Pemberantasan Korupsi, atau disingkat KPK lahir sebagai sebuah produk reformasi. KPK dibentuk pada era pemerintahan Megawati Soekarnoputri pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK, bukanlah lembaga yang berada di bawah kekuasaan, kendali atau pengaruh Presiden. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditegaskan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya

bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Dalam penjelasan UU tersebut ditegaskan, ketentuan yang dimaksud dengan "kekuasaan manapun" adalah kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau anggota Komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun.

Dalam bagian konsiderans dan penjelasannya diuraikan kenapa dibutuhkan sebuah komisi independen untuk memberantas korupsi yang sudah semakin meluas. Hal itu disebabkan penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional (Kepolisian dan Kejaksaan, *red*) selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan.

Jadi KPK bukanlah bagian dari pemerintah (eksekutif) yang berada di bawah kendali Presiden. KPK adalah lembaga negara yang independen. Sebuah lembaga yang diberi wewenang memberantas korupsi secara luar biasa.

Getaran kinerja KPK pun langsung terasa. Banyak koruptor yang dijebloskan dalam penjara. Baik dalam masa kepemimpinan Taufiequrachman Ruki (Ketua) dan empat Wakil Ketua merangkap Anggota yakni Amien Sunaryadi, Sjahrudin Rasul, Tumpak Hatorangan Panggabean, dan Erry Riyana Hardjapemekas (2003-2007), maupun pada awal masa Antasari Azhar (Ketua) dan Chandra M. Hamzah, Bibit Samad Rianto, Haryono dan Mochammad Jasim (Wakil Ketua).

Keberhasilan KPK itu pun diklaim pemerintahan SBY sebagai bagian dari keberhasilan kinerjanya. Dalam materi kampanyenya, SBY selalu mengedepan-



Presiden SBY didampingi Wapres Boediono memimpin rapat paripurna kabinet di kantor kepresidenan (14/2)

kan program pemberantasan korupsi dan KPK jadi ikon favorit yang digunakan, bukan Kepolisian dan Kejaksaan yang seharusnya dijadikan ikon pemberantasan korupsi oleh pemerintah.

Bukan hanya saat kampanye, SBY mengklaim prestasi KPK, bahkan juga dalam awal pemerintahan keduanya. Sehingga, ICW memprediksi, usai program 100 hari pemerintahan SBY pun masih akan terus terjebak dengan budaya pemberantasan korupsi yang parsial, pencitraan dan klaim keberhasilan. Menurut ICW, hal ini terjadi karena komitmen Presiden SBY masih seperempat hati.

Wakil Koordinator ICW Emerson Yuntho menyebut komitmen Presiden SBY masih seperempat hati dalam memberantas korupsi, karena dari 500 ijin pemeriksaan yang diajukan kepada Presiden baru sekitar 134 yang disetujui. "Bagaimana mungkin kita bisa percaya Presiden kalau begini terus?" kata Emerson Yuntho dalam jumpa pers di kantornya di Jakarta, Minggu (17/1/2010). Maka, ICW memprediksi tahun 2010 ini budaya pemberantasan korupsi masih terjebak pada pencitraan dan klaim sana-sini.

ICW menganggap selama ini Presiden seolah-olah berprestasi dalam upaya pemberantasan korupsi. Padahal prestasi tersebut jelas kinerja KPK sebagai lembaga independen. Menurut ICW, jika selama ini ada prestasi KPK pada masa pemerintahan SBY, bukan berarti ini berkat SBY. Sebab, secara yuridis, KPK adalah lembaga independen. "Lantas bagaimana bisa diukur bahwa SBY punya andil besar dalam memberantas korupsi?" ucapnya lantang. Selain itu, Emerson pun mengungkapkan keraguan ICW bahwa peme-

rintah memiliki strategi dalam pemberantasan korupsi.

Hal senada dikemukakan LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI). "Parameter keberhasilan pemerintah dalam pemberantasan korupsi, adalah kinerja Kejagung bukannya KPK. Pasalnya, KPK itu lembaga independen, sedangkan Kejagung merupakan lembaga pemerintah," kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman.

#### Prestasi Kepolisian dan Kejaksaan

Jadi, keberhasilan pemerintah dalam pemberantasan korupsi tercermin dari prestasi Kepolisian dan Kejaksaan. Prestasi kedua lembaga penegak hukum yang berada di bawah kekuasaan Presiden (pemerintah) inilah yang sepatutnya diklaim sebagai keberhasilan pemerintah.

Namun sayang, prestasi kedua lembaga ini dalam pemberantasan korupsi sangat jauh dari harapan. Bahkan, pejabat Kejaksaan Agung tertangkap tangan oleh KPK menerima suap. LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menyatakan penanganan perkara korupsi yang ditangani Kejagung benar-benar memprihatinkan. "Bisa dikatakan tidak ada kasus korupsi yang besar ditangani Kejagung, bahkan sebaliknya banyak kasus yang di-SP3," kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman. Selain itu, katanya, banyak ditemui jaksa nakal baik di pusat maupun di daerah.

Koordinator MAKI itu menyebutkan, Kejaksaan Agung (Kejagung) juga tidak punya prestasi dalam pemberantasan korupsi pada Program 100 Hari Pertama Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) 2. Boyamin Saiman, menjelaskan, sebelumnya, Kejagung menyatakan penanganan

kasus Bank Century dengan tersangka yang masih buron, yakni, Hesyam Al Waraq (Komisaris Bank Century) dan Rafat Ali Rizvi (Pemegang Saham Pengendali Bank Century), masuk dalam program seratus hari kerja instansi tersebut. Namun, katanya, sampai sekarang, berkas kasus itu belum juga dilimpahkan ke pengadilan, dan saat ini masih berkuat pada persoalan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menaksir kerugian negara akibat kasus Bank Century.

Demikian pula, kasus dugaan korupsi di DPRD DKI Jakarta senilai Rp27,5 miliar masuk dalam program 100 hari namun belum ada kelanjutannya. Dua tersangka kasus korupsi di DPRD DKI Jakarta tersebut, saat ini baru masuk ke tahap penyidikan di Kejagung, dan berkasnya belum dilimpahkan ke pengadilan.

Penilaian serupa juga dikemukakan Indonesia Corruption Watch (ICW). ICW menilai Kejaksaan Agung (Kejagung) hampir dikatakan tidak memiliki prestasi yang membanggakan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi pada program 100 hari kerja Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II.

Peneliti ICW, Febri Diansyah mengatakan tidak adanya prestasi yang membanggakan di tubuh Korps Adhyaksa tersebut, karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak melakukan "reshuffle" untuk posisi Jaksa Agung. Sehingga sulit sekali Kejagung tancap gas dalam pemberantasan korupsi. Padahal, menurutnya, posisi Jaksa Agung sangat penting sekali guna menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam memberantas korupsi, bukannya pada KPK. "Karena KPK itu independen, bukan lembaga pemerintah," tegasnya. ■ BI/MS-MLP

# Taktik Lemahkan KPK

**Dalam setahun terakhir, terlihat indikasi kuat adanya beberapa taktik sistematis untuk melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mengapa Presiden SBY mengkhawatirkan KPK sebagai *super body* yang tak terkontrol oleh lembaga mana pun?**

**K**omisi Pemberantasan Korupsi, atau disingkat KPK, memang sengaja dilahirkan pada tahun 2003 (era pemerintahan Megawati Soekarnoputri) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002, sebagai sebuah lembaga negara yang independen, bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, untuk dapat memberantas korupsi secara luar biasa.

KPK bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, baik eksekutif, yudikatif, legislatif, maupun pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun. Komisi ini memiliki kewenangan luas dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan.

Dengan wewenang memberantas korupsi secara luar biasa, itu KPK pun tampil sebagai sebuah lembaga negara yang membawa harapan baru bagi publik dan pejabat antikorupsi, tetapi sangat menakutkan bagi para koruptor.

Sudah ada beberapa koruptor yang dijebloskan KPK dalam penjara, sejak ber-

diri Desember 2003. Setelah KPK dibentuk, Taufiequrachman Ruki, lulusan terbaik Akpol 1971, pada Selasa 16/12/2003 terpilih sebagai Ketua KPK pertama (2003-2007). Dia didampingi empat Wakil Ketua merangkap Anggota yakni Amien Sunaryadi, Sjahrudin Rasul, Tumpak Hatorangan Panggabean, dan Erry Riyana Hardjapemekas.

Ruki berupaya memosisikan KPK sebagai katalisator (*trigger*) bagi aparat atau institusi lain agar tercipta *good and clean governance* di negeri ini. Selama menjabat Ketua KPK, dia tetap konsisten dalam menjalankan tugas kendati mendapat kritik dari berbagai pihak tentang dugaan tebang pilih pemberantasan korupsi. Pada masa kepemimpinan KPK pertama ini belum terasa kuat indikasi upaya pelemahan KPK. Karena, ketika itu pimpinan KPK terbilang gemar bertemu dengan Presiden, khususnya Presiden SBY yang menggantikan Megawati 20 Oktober 2004.

Lalu, Ruki digantikan Antasari Azhar, 18 Desember 2007. Didampingi Wakil Ketua merangkap Anggota Chandra M. Hamzah, Bibit Samad Rianto, Haryono dan Mochammad Jasim. Dalam proses pencalonan menjadi pimpinan KPK,

Antasari didukung oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Di bawah kepemimpinan Antasari Azhar Cs, dugaan KPK tebang pilih mulai surut. Bahkan KPK semakin menunjukkan kemampuan dan keteguhan independensinya memberantas korupsi. Kelima pimpinan KPK itu sempat berhasil menempatkan diri pada posisi seharusnya sebagai lembaga yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan kekuasaan manapun. Pimpinan KPK tidak gemar lagi menghadap dan melapor kepada Presiden seperti pendahulunya.

Pada awal kepemimpinan Antasari Azhar cs, hanya beberapa saat setelah mereka dilantik di Istana Negara, Jakarta, Selasa (18/12/2007), KPK membongkar kasus suap yang melibatkan pejabat Kejaksaan Agung (jaksa Urip Tri Gunawan) dan pengusaha Arthalyta, yang dikenal dekat dengan Presiden SBY. Bahkan besan SBY, Aulia Pohan pun dijebloskan dalam penjara akibat kasus korupsi di Bank Indonesia. Tidak hanya itu, mantan Kapolri pun dibuat meringkuk di penjara.

Padahal, pada saat baru dilantik, banyak pihak menduga Antasari sebagai seorang jaksa karir akan tunduk kepada Jaksa Agung dan Presiden sebagai atasannya, sebelum menjabat Ketua KPK. Namun, Antasari Azhar, justru membuktikan semakin teguhnya independensi KPK, dengan tidak gemar bertemu Presiden SBY. Kasus korupsi yang melibatkan lingkaran kekuasaan pemerintah yang sedang berkuasa pun mulai dibongkar. Tidak terkesan lagi hanya menysar mantan menteri pemerintahan sebelumnya. Hal ini diduga membuat pemerintah merasa gerah, tidak nyaman. Tidak senyaman ketika Taufiequrachman Ruki memimpin KPK.

Belakangan, dugaan kasus korupsi teknologi informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang dalam Pemilu 2009 lalu dirasakan keberpihakannya kepada sebuah partai dan pasangan Capres-Cawapres tertentu, mulai diendus KPK. Juga mulai diendus, kasus korupsi dalam proses pengucuran dana ke Bank Century yang diduga sebagian dana digelontorkan ke partai dan pasangan Capres-Cawapres tertentu.

## Politik Pelemahan KPK

Gebrakan KPK itu tentu saja tidak disenangi beberapa pihak yang diduga terkait dengan kasus tindak pidana korupsi.



Presiden SBY menerima laporan dari Adnan Buyung Nasution, Ketua Tim Independen Verifikasi Fakta di kantor kepresidenan (17/11/09)



**BERWIBAWA:** Presiden SBY dengan tatapan penuh wibawa memberi ucapan selamat kepada Plt Ketua KPK Tumpak Hatorangan Panggabean

si. Sehingga, diduga, hal inilah yang membuat adanya upaya mengkriminalisasi pimpinan KPK dan melemahkan KPK.

Yang paling mengejutkan (sulit diyakini) adalah ketika (akhir Juni 2009) Presiden SBY mengkhawatirkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menjadi *super body* yang tak terkontrol oleh lembaga manapun. Presiden wanti-wanti benar, *power must not go unchecked*. KPK ini sudah *powerholder* yang luar biasa. Pertanggungjawabannya (seolah) hanya kepada Allah. Hati-hati. Walaupun kemudian Presiden meluruskan, bahwa maksudnya KPK juga harus *check and balance*, seperti semua lembaga negara lainnya, termasuk kepresidenan. Namun

pernyataan tersebut cukup memberi kesan bahwa Presiden SBY tidak bisa mengendalikan KPK.

Belum diketahui pasti apakah ada kaitan kecemasan Presiden tersebut dengan adanya indikasi kuat telah terjadi taktik sistematis untuk melemahkan KPK. Meyikapi hal ini, beberapa LSM anti-korupsi, Indonesia Corruption Watch (ICW), Transparency International Indonesia (TII), Indonesia Budget Center (IBC) dan YAPIKA secara bersama merilis Kado Hari Anti Korupsi, 9 Desember 2009 bertajuk Politik Pelemahan KPK di Era Presiden SBY.

Disebutkan dalam rilis pers tersebut, tidak lama sebelum hari antikorupsi Internasional (9/12), sebuah lembaga

independen yang dibentuk khusus memberantas korupsi "kelas kakap" justru dikepung, diserang dan dilumpuhkan dengan berbagai cara.

Bersamaan dengan itu, sebuah skandal rekayasa proses hukum terhadap dua pimpinan KPK terungkap. "Kita sangat yakin mengatakan apapun gerakan dan upaya melemahkan KPK adalah bagian dari gerakan *corruptor fight back*. Sebuah perlawanan balik dari kelompok koruptor," katanya.

Disebutkan, pasca terciumnya aroma "Mafia Peradilan" di institusi penegak hukum, publik semakin yakin, bahwa tempat pemberantasan korupsi bertumpu saat ini bukanlah pada kekuasaan politik, baik itu Eksekutif (Presiden), Legislatif



Anggodo Widjojo, adik buron tersangka Anggoro Widjojo akhirnya ditahan di Rutan Cipinang, Jakarta. Dia diduga melakukan percobaan suap kepada pimpinan KPK

(DPR) ataupun lembaga penegak hukum konvensional yang belum bebas dari virus mafioso hukum.

KPK adalah harapan bangsa ini, dan sembari berjalan, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Umum perlu dibersihkan agar pemberantasan korupsi menjadi semakin kuat. Menurut ICW, TII, IBC dan YAPIKA, perlunya penguatan institusi KPK tersebut terbaca dari optimisme yang ada di hasil survey Transparency International (TI). Dari tahun 2004 hingga 2009, CPI Indonesia terus meningkat dari 2.0 menjadi 2.8. TII sendiri menjelaskan, hal itu sangat dipengaruhi oleh meningkatnya harapan publik terhadap institusi independen seperti KPK, dan reformasi birokrasi yang mulai dilakukan di departemen keuangan.

Akan tetapi, tegasnya, survey TI tersebut tidaklah boleh digunakan sebagai dasar legitimasi bagi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, bahwa pemberantasan korupsi yang terjadi di era pemerintahannya berhasil. Karena, publik sangat paham, keberadaan KPK secara tegas diatur UU sebagai lembaga independen yang tidak terpengaruh kekuasaan manapun. Termasuk Presiden, tentunya.

Selain itu, posisi CPI Indonesia di mata Internasional perlu dilihat secara komparatif dengan negara lain. Meskipun

terjadi peningkatan, sayangnya Indonesia masih berada di jalur negara yang dicekam oleh tingkat korupsi yang akut.

Terkait dengan konsep Independensi KPK, menurut ICW, TII, IBC dan YAPIKA, KPK memang tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan manapun. "Akan tetapi komitmen Presiden tetap dibutuhkan untuk menjaga independensi KPK tersebut, dan bahkan seharusnya juga mencintai KPK dalam artian melindunginya secara politik dari upaya *corruptor fight back*. Apakah hal itu dilakukan?"

"Kami meragukan komitmen politik Presiden untuk menjaga dan menumbuhkan pemberantasan korupsi, khususnya yang dilakukan oleh KPK," tegas ICW, TII, IBC dan YAPIKA.

Bahkan menurut mereka, di era pemerintahan SBY, tercatat sejumlah upaya pelemahan KPK oleh berbagai pihak. "Kita tentu tidak bisa terlalu cepat mengatakan otoritas politik ikut dalam upaya pelemahan tersebut. Namun, fenomena pelemahan yang terkesan dibiarkan ini, dinilai sangat paradoks sekaligus aneh, karena Presiden SBY sendiri dari awal naik dan didukung oleh pemilihnya karena isu antikorupsi. Bahkan janji-janji politik SBY adalah janji tentang pemerintahan yang bersih dan pemberantasan korupsi. Bagaimana mungkin, KPK sebagai aktor yang

memberi harapan dalam pemberantasan korupsi, di tengah kegagalan dan potret buram Kepolisian dan Kejaksaan, KPK justru didelegitimasi dan dilemahkan?"

Mereka pun mencatat tipologi kasus yang ditangani oleh KPK. Modus korupsi terbanyak yang dijerat adalah suap; mark-up dalam pengadaan barang dan jasa; dan penggelapan/pungutan liar. Dari aspek klasifikasi korupsi, suap merupakan jenis korupsi yang sangat sulit disentuh oleh penegak hukum, dan bahkan menjalar sebagai salah satu varian praktek makelar kasus dan mafia peradilan.

Sektor terkorup yang berhasil dijerat KPK adalah mafia bisnis/swasta (20%); Parlemen dan Partai Politik (18,95%) serta *high class* birokrasi (Pejabat Eselon, pimpinan proyek dan Kepala Daerah), yang jika dijumlahkan mencapai 30,52%. (Dokumen ICW, 2009).

Prestasi KPK tersebut sepertinya memang membuat gerah dan marah kalangan koruptor, terutama yang bersarang di sektor Politik dan Mafia Bisnis. Eskalasi perlawanan tersebut terus meningkat, hingga ketika KPK melakukan pengecekan dan menetapkan seorang Direktur PT. MASARO Radiocom, sejumlah rekayasa terjadi.

Selain itu, menurut ICW, TII, IBC dan YAPIKA, terdapat "tigabelas jurus" lain yang pernah terjadi untuk melumpuhkan KPK, di antaranya: 1. Judicial Review UU KPK ke Mahkamah Konstitusi. Pengajuan





Jaksa Agung, Hendarman Supandji

JR ini tergolong sangat sering, setidaknya MK telah menerima 8 kali UU KPK diuji. Dan, salah satu putusannya adalah terkait dengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;

2. Proses Seleksi Pimpinan KPK: *Track record* tidak menjadi pertimbangan serius bagi panitia seleksi yang dibentuk Presiden untuk memilih calon pimpinan KPK; Komisi III DPR pun tetap memilih Anta-

sari Azhar yang ditolak oleh masyarakat luas karena rekam jejaknya sebagai jaksa bermasalah di beberapa daerah;

3. Ancaman Bom: Beberapa kali gedung KPK diancam Bom: Februari 2008 dan Juli 2009;

4. Ide Pembubaran KPK. Oleh salah seorang Anggota Komisi III DPR RI periode 2004-2009 dari Partai Demokrat pasca KPK melakukan pengeledahan gedung DPR;

5. Penolakan Pengajuan Anggaran KPK: Permohonan dana untuk pemberantasan korupsi dan pembangunan gedung KPK di rekening 069 RAPBN 2009 ditolak oleh DPR (Nov 2008). Saat itu, KPK sedang gencar membongkar praktek suap anggota DPR;

6. Serangan Legislasi (*legislation attack*): (a) RUU KPK (revisi UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK), (b) RUU Tindak Pidana Korupsi (revisi UU No. 31 tahun 1999 jo UU 20 th 2001), (c) Perppu No. 4 tahun 2009 yang menjadi dasar hukum kewenangan Presiden menunjuk langsung pimpinan KPK sementara;

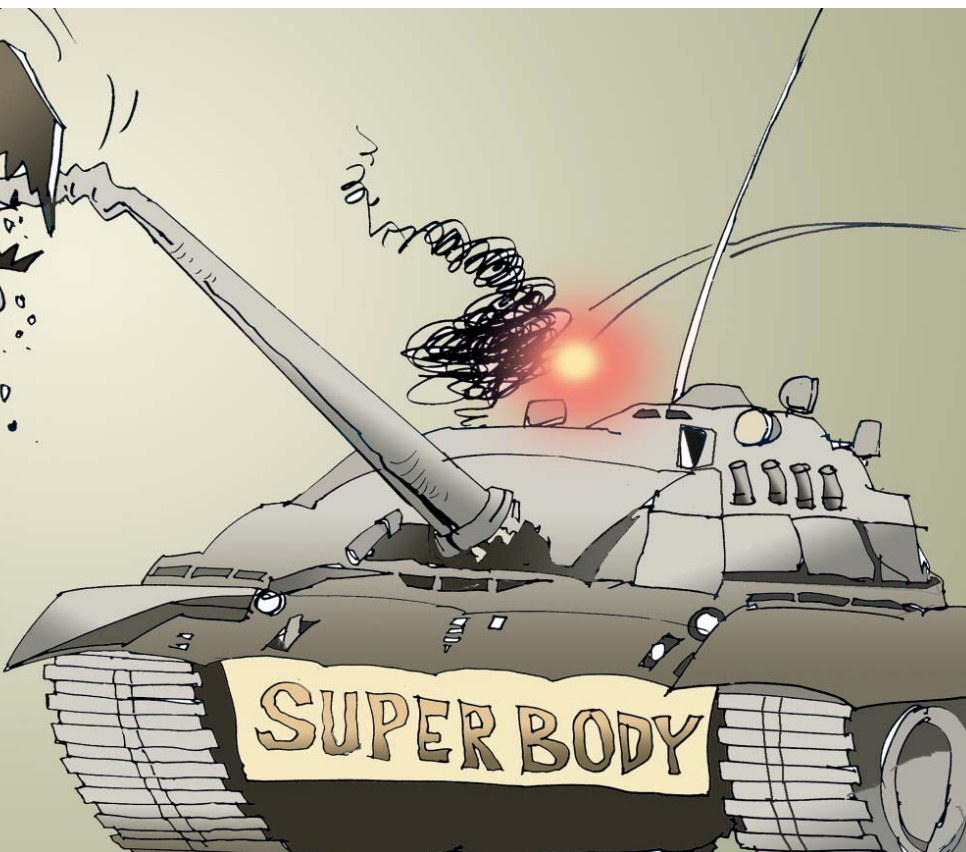
7. Pengerdiln Kewenangan Penyadapan: Percobaan pelemahan penyadapan KPK dilakukan berulang kali. Pertama, pernyataan komisi III bahwa penyadapan KPK melanggar hak asasi manusia (HAM) saat beberapa anggota DPR tertangkap tangan menerima suap; pembahasan RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), tiba-tiba pasal penyadapan harus dilakukan dengan izin Ketua Pengadilan menyusup dalam draft RUU (Sept. 2009), dan terakhir melalui RPP Penyadapan yang diinisiasi oleh Depkominfo;

8. Menghilangkan/Mengaburkan Kewenangan Penuntutan KPK: Sempat disusupkan dalam RUU Pengadilan Tipikor, bahwa penuntutan akan dikembalikan pada koordinasi Jaksa Agung;

9. Penarikan Personal Penyidik dan Auditor: Nov. 2008, Mabes POLRI menarik 3 perwira polisi yang diperbantukan di KPK, kemudian Kabareskrim Mabes Polri, Susno Duadji berulang kali mengatakan "kami bisa saja tarik semua personal polisi di KPK". BPKP berupaya menarik 25 auditor yang sangat membantu pembongkaran kasus korupsi di KPK (Mei 2009), namun urung dilakukan karena tekanan publik;

10. Membekukan Fungsi Penyidikan dan Penuntutan KPK: Sebagian besar anggota Komisi III DPR-RI periode 2004-2009 sempat meminta KPK cuti, karena jumlah pimpinan tidak cukup 5 orang. Sehingga, penyidikan dan penuntutan tidak sah atau illegal;

11. Rencana Audit BPKP terhadap KPK: BPKP mengatasmakan perintah Presiden SBY untuk mengaudit KPK, padahal lembaga yang berwenang adalah BPK. Presiden membantah, namun publik tidak





Kapolri Bambang Hendarso Danuri

pernah tahu tentang ketegasan sanksi terhadap Kepala BPKP;

12. Ancaman terhadap Investigasi Kasus Bank Century: Sempat beredar pesan pendek (sms) tentang ancaman yang diduga berasal dari salah seorang petinggi Kepolisian RI terhadap dua penyidik KPK yang berada di Surabaya;

13. Kriminalisasi dan Rekayasa Hukum terhadap Dua Pimpinan KPK: Dari pemeriksaan Tim 8 jelas terlihat, tidak cukup bukti, bahkan proses hukum terkesan dipaksakan untuk menjerat Bibit dan Chandra. Persidangan di Mahkamah Konstitusi membuat publik semakin yakin dengan dugaan rekayasa terhadap dua pimpinan KPK bahkan menambah fakta soal Mafia Peradilan di tubuh Kepolisian dan Kejaksaan. Anggodo, sebagai aktor utama dalam dugaan rekayasa yang bahkan mencatat nama Presiden SBY tidak tersentuh.

ICW, TII, IBC dan YAPIKA menegaskan yang sedang berjalan saat ini adalah Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP Penyadapan). RPP ini sedang disusun oleh salah satu kementerian yang berada di bawah jajaran Presiden SBY. RPP yang sangat kontroversial, mengancam independensi KPK, melanggar UU Nomor 30 tahun 2002, dan bahkan bertentangan dengan dua Putusan Mahkamah Konstitusi (tahun 2003 dan 2006).

Menurut mereka, setidaknya juga ada 13 masalah krusial dalam RPP, dan 5 bagian yang dapat dipahami sebagai bentuk kontrol atau intervensi eksekutif terhadap lembaga independen seperti KPK.

Disebutkan, proses penyusunan RPP pun bermasalah. KPK menyatakan tidak dilibatkan secara intens dan serius. Padahal, pihak yang paling dirugikan oleh materi RPP itu adalah KPK dan pemberantasan korupsi.

## Berhasilkah SBY?

Selain analisis singkat tentang feno-

mena politik pengkerdilan dan pelemahan KPK, keempat LSM antikorupsi tersebut mengajukan pertanyaan penting: Sudah berhasilkah pemberantasan korupsi di Indonesia?

Menurut mereka, pertanyaan ini penting dijawab dengan satu klausul sederhana, bahwa wajah pemberantasan korupsi pemerintah haruslah dilihat dari dua hal. Pertama, wajah Kepolisian dan Kejaksaan, karena lembaga inilah yang secara struktural ada di bawah Presiden, dan Kedua, potret pelayanan publik melalui birokrasi pemerintahan di bawah Presiden SBY. Berhasilkah pemberantasan korupsi di era pemerintahan SBY?

"Membaca indikator di atas, tentu saja publik akan menjawab, Tidak. Menjelang penyelenggaraan hari antikorupsi 9 Desember 2009, masyarakat justru dihadapkan pada catatan kelam pemberantasan korupsi di Kepolisian dan Kejaksaan," katanya.

Berdasarkan pemaparan di atas, ICW, TII, IBC dan YAPIKA menyimpulkan: 1. Pengkerdilan dan Pelemahan KPK terjadi secara sistematis dan dilakukan oleh berbagai kalangan. Setidaknya ada 13 "jurus melumpuhkan KPK". Akan tetapi, karena dukungan publik yang luar biasa besar, berbagai bentuk serangan tersebut bisa diminimalisir;

2. Pengkerdilan dan Pelemahan KPK terjadi sangat intens di era Pemerintahan SBY. Dan masyarakat kecewa dengan ketidaktegasan sikap, kebijakan dan strategi untuk mendukung KPK serta membersihkan mafia di kepolisian dan kejaksaan;

3. Presiden SBY belum berhasil memimpin pemberantasan korupsi. Hal ini dilihat dari wajah Kepolisian dan Kejaksaan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Prestasi Presiden baru terlihat dalam reformasi birokrasi di Departemen Keuangan. Hal ini pulalah yang mendorong naiknya skor CPI Indonesia;

Berdasarkan catatan dan kesimpulan di atas mereka merekomendasikan empat hal, yakni: 1. Hentikan segala upaya pengkerdilan dan pelemahan KPK; 2. Presiden perlu mendukung dan menguatkan peran KPK pasca Bibit-Candra kembali ke KPK, khususnya dalam pengusutan tuntas skandal Bank Century; 3. Bersihkan Kepolisian dan Kejaksaan dari Mafia Peradilan secara serius, bukan hanya dengan "jurus PO BOX"; 4. Berikan ruang bagi publik secara luas untuk mengekspresikan aksi antikorupsi tanpa "dituduh" akan disusupi kepentingan politik tertentu, berniat menggulingkan pemerintah, dan ingin mendiskreditkan Partai Demokrat.

■ BI/BHS/MLP



Mantan Ketua KPK Antasari Azhar diduga sebagai korban konspirasi untuk melemahkan KPK

# Korupsi Semakin Canggih

**Kasus Bank Century yang sudah diaudit BPK dan tengah ramai dibahas oleh Pansus Angket DPR serta tengah diusut KPK, mengindikasikan korupsi semakin canggih dan tamak.**



Wapres Boediono saat memenuhi panggilan Pansus Angket Bank Century di Gedung DPR Senayan

**D**emonstrasi atas kinerja Program 100 Hari Kabinet Indonesia Bersatu 2 serta mendesak pengungkapan secara tuntas skandal Bank Century, telah berlangsung hampir di seluruh kota besar di Indonesia. Mereka mengekspresikan kekecewaan dengan berbagai cara.

Beberapa cara atau lakon demonstran itu mendapat perhatian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang populer dipanggil SBY. Satu di antaranya adalah ikut tampilnya kerbau yang di tubuhnya ada coretan cat berwarna putih bertuliskan "SiBuYa" dalam aksi demonstrasi 28 Januari 2010 di Jakarta.

Saking sangat kesalnya, Presiden SBY sampai menyinggung soal demo kerbau itu dalam forum resmi Rapat Kerja Pemerintah di Istana Kepresidenan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Rabu (3/2/2010) yang dihadiri Wakil Presiden Boediono, Ketua Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangku-

subroto, Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia Darmin Nasution, seluruh menteri dan gubernur se-Indonesia.

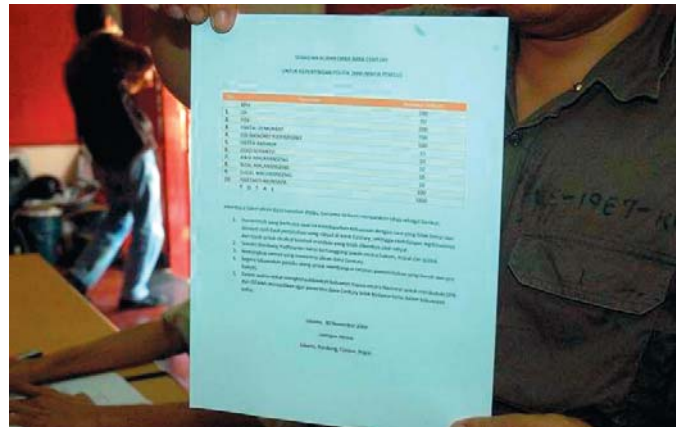
Presiden SBY 'curhat' mengatakan, sebaiknya demo dilakukan dengan mengindahkan norma-norma kepantasan. "Kita bahas juga misalkan, unjuk rasa yang terjadi di negeri Pancasila ini. Di sana ada yang teriak-teriak SBY maling, Boediono maling, menteri-menteri maling. Ada juga demo yang bawa kerbau. Ada gambar SBY. Dibilang, SBY malas, badannya besar kayak kerbau. Apakah itu unjuk rasa? Itu nanti kita bahas," ujar Presiden di Istana Cipanas.

Semula, sebelum Presiden SBY 'curhat' tentang Kerbau SiBuYa yang ikut demo tersebut, tidak ada media massa yang memublikasikannya secara khusus atau menonjol. Namun, setelah Presiden SBY menyampaikan curahan hatinya, empat hari setelah kerbau itu ikut dibawa demo, hampir semua media massa (pers) memublikasikannya secara luas dan menonjol.

Publik yang sebelumnya tidak peduli dan tidak memahami makna keikutsertaan kerbau dalam aksi unjuk rasa itu, menjadi tahu menafsirkan sesuai pemaknaan Presiden SBY. Yosef Rizal, Koordinator Pemuda Cinta Tanah Air (Pecat), elemen massa yang membawa kerbau tersebut pun, mengatakan, kerbau itu adalah simbol yang punya seribu makna, terserah orang memaknainya. "Kalau SBY memaknai sebagai simbol pemimpin yang gemuk, malas, lamban meski sudah dipecut, itu terserah dia," ujarnya.

Namun, Yosef Rizal menegaskan, kerbau tersebut bukan ditujukan langsung ke Presiden. Menurutnya, simbol kerbau tersebut ditujukan ke seluruh jajaran pemerintahan SBY, bukan perorangan. Maka menurut Yosef, pengakuan (pemaknaan) SBY tersebut hanyalah taktik belaka. "Itu bagian dari politik kehumasan dan strategi dia. Karena dia kan selalu mengeluh untuk pencitraan," ujarnya. Menurut Yosef, pernyataan SBY itu berarti dia pemimpin yang cengeng. "Dia mengeluh kepada rakyatnya. Seharusnya kan rakyat yang mengeluh ke pemimpinnya," tambahnya.

Jadinya, peribahasa mencoreng arang di muka sendiri menjadi tepat menggambarkan reaksi Presiden SBY ketika memaknai adanya tuduhan yang menyamakan dirinya seperti kerbau, berbadan besar, malas, dan bodoh, di hadapan jajaran menteri dan gubernur se-Indone-



Data aliran dana di Bank Century versi LSM Bendera



Aksi SiBuYa dalam aksi demo yang sangat menyinggung perasaan Presiden SBY

sia di Istana Kepresidenan di Cipanas.

Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Akbar Tandjung mengomentari hal tersebut mengatakan, SBY tak seharusnya membahas soal kerbau dalam forum kenegaraan. Menurut Akbar, ungkapan SBY soal kerbau itu tidak pantas diucapkan seorang presiden.

"Memang ungkapan presiden itu ada alasannya. Tapi sebenarnya tidak pantas hal itu diucapkan presiden kita," kata mantan Ketua DPR ini. Menurut Akbar, SBY sebenarnya tidak lamban, hanya dalam mengambil keputusan memerlukan banyak masukan.

Pengamat politik UI Boni Hargens di Jakarta, Rabu (3/2) mengatakan Presiden SBY harus memahami urgensi aksi demo yang membawa kerbau sebagai bentuk aspirasi rakyat. Presiden sangat melankolis telah 'curhat' isu kerbau dalam rapat formal. "Sebagai kepala negara, SBY tak tepat mencurahkan perasaan pribadi kepada seluruh rakyat. Terlebih dalam demokrasi, pernyataan SBY melenceng dari esensi aksi unjuk rasa itu sendiri. Ia harus paham urgensinya mengapa rakyat sampai membawa simbol kerbau.

Artinya, rakyat menganggap pemerintahan SBY-Boediono sangat lamban, dan malas. Kehadiran kerbau dalam aksi demo, bukan tanpa alasan," ujar Boni.

Sementara itu, Ketua DPR Marzuki Alie (Partai Demokrat) ikut merasa terluka dengan demo kerbau itu. "Kita sebagai orang timur saja merasa dilukai, kita ini orang timur yang mengedepankan sopan santun, akhlak,

etika. Apa lagi kita negara religius, negara yang mengakui adanya Ketuhanan Yang Maha Esa," kata Marzuki di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (3/2). Marzuki Alie mengajak agar masyarakat dapat berpikir jernih yang dimaksud demo itu seperti apa.

Tidak sekali ini saja Presiden SBY dianggap 'curhat' kepada rakyat. Bahkan bukan rahasia umum lagi bagi publik bahwa SBY sering memosisikan diri teraniaya, difitnah dan lain sebagainya, sebagai bagian politik pencitraan. Selama ini, Presiden SBY amat berhasil meningkatkan popularitas dengan gaya melankolis teraniaya serta mengumbar janji, wacana dan persepsi.

Termasuk dalam hal yang berkaitan dengan kasus Bank Century. Presiden SBY beberapa kali, dalam berbagai forum, menyebut dirinya dan Partai Demokrat sedang difitnah dengan dugaan menerima kucuran dana talangan Bank Century. Bahkan pengusutan kasus penyalahgunaan wewenang dalam pengambilan kebijakan (keputusan) dana talangan Bank Century tersebut dikesankannya telah sengaja dikriminalisasi.

Hal ini tentu telah membuat para koruptor yang diduga terlibat dalam skandal Bank Century, yang diyakini banyak pihak telah bermain secara canggih, semakin yakin (berharap) bahwa kasus Bank Century ini tidak akan terungkap. Juga memberi nafas segar kepada kelompok gerakan *corruptor fight back*.

Malah, baik BPK dan KPK maupun Pansus Angket (DPR) Bank Century

tampaknya bisa dianggap menjadi lembaga yang mengkriminalisasi kebijakan dana talangan Bank Century tersebut.

### Korupsi Makin Canggih

Memang, jika diamati, belum terindikasi dan belum terungkap, adanya keterlibatan otoritas politik dalam kasus Bank Century. Namun, berbagai kemungkinan bisa saja terjadi. Apalagi, para koruptor sudah semakin canggih dalam melakukan aksinya. Sehingga korupsi masih merajalela, kendati KPK sudah diberi wewenang luar biasa untuk memberantasnya.

Jika ditanya, adakah proyek pemerintah yang sudah bersih dari korupsi? Atau, sudah adakah instansi pemerintah yang sudah bersih dari korupsi? Mayoritas rakyat merasakan dan diyakini akan menjawab, belum! Belum ada instansi dan proyek pemerintah yang bebas dari korupsi. Baik korupsi dalam skala besar maupun dalam skala kecil. Mengurus NPWP saja masih ada yang dimintai uang!

Kasus korupsi yang terbongkar masih sangat kecil. Itu pun korupsi yang dilakukan dengan kurang canggih. Seperti, korupsi pengadaan barang di KPU dan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menjebloskan mantan Ketua KPU Prof. Dr. Nazaruddin Sjamsuddin, MA dan Prof Dr Ir Rokhmin Dahuri, MS. Kedua guru besar itu memang terlihat masih 'sangat bodoh' dalam aksi menutupi tindak pidana korupsi. Bayangkan, mereka menyuruh mencatat dan membuat tanda terima. Akibatnya, keduanya

sangat mudah terbukti korupsi dan harus meringkuk dipenjara.

Sementara, para koruptor lain yang tersebar di berbagai instansi dan sudah semakin canggih mengantisipasi (menghilangkan jejak) untuk tidak terbukti menerima suap atau korupsi, masih bebas dengan berbagai kemewahan. Sebab, tidak ada tanda terima dan tidak ada saksi. Bahkan, dengan berbagai cara dikeluarkan berbagai kebijakan untuk melempangkan korupsi.

Gejala kecanggihan dan rekayasa korupsi juga terkesan dalam kasus Bank Century. Dari hasil investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang disampaikan kepada DPR saja sebenarnya, bagi publik, sudah menunjukkan beberapa bukti adanya rekayasa, penggelapan atau perampokan (istilah mantan Wapres Jusuf Kalla) dalam kasus dana talangan Bank Century.

Dalam kasus Bank Century, BPK dan Pansus Angket DPR mengungkap dugaan pelanggaran yang dilakukan mulai dari proses merger dan pengawasan Bank Century oleh BI, pemberian Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP), penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik dan penanganannya oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), penggunaan dana FPJP dan Penyertaan Modal Sementara (PMS), serta praktik-praktik tidak sehat dan pelanggaran

ketentuan oleh pengurus bank, pemegang saham, dan pihak terkait.

Dalam hal proses merger, BI tidak menerapkan aturan dan persyaratan dalam pelaksanaan akuisisi dan merger sesuai SK Direksi BI serta Peraturan BI (PBI). Setelah merger, BI juga tidak bertindak tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Bank Century sejak 2005-2008.

BI membiarkan Century melakukan rekayasa akuntansi sehingga seolah-olah Century masih memiliki kecukupan modal atau CAR dengan cara membiarkan Century melanggar PBI, seperti pelanggaran devisa neto dan pelanggaran limit pemberian kredit melampaui jumlah maksimum. BI baru bersikap tegas saat Century telah ditangani LPS.

Kemudian, menurut hasil audit BPK, BI sengaja melakukan perubahan persyaratan CAR dalam peraturan BI (PBI) untuk merekayasa agar Bank Century dapat memperoleh fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP). Pada saat pemberian FPJP, CAR Bank Century negatif 3,53 persen. Hal ini sebenarnya melanggar ketentuan PBI No 10/30/PBI/2008.

Lalu, saat penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, BI tidak memberikan informasi yang sesungguhnya, lengkap, dan mutakhir mengenai kondisi Bank Century kepada KSSK. Menurut BPK, dalam penetapan-

nya kemudian, BI dan juga KSSK tidak memiliki kriteria terukur dalam menetapkan dampak sistemik bagi Bank Century. BPK menilai, keputusan penetapan ini lebih bersifat *judgement* dari pejabat BI, termasuk KSSK.

BPK juga berpendapat bahwa penarikan dana oleh pihak terkait dari Bank Century melanggar PBI yang mengatur bahwa bank berstatus "dalam pengawasan khusus" dilarang melakukan transaksi dengan pihak terkait dan atau pihak lain yang ditetapkan BI, kecuali telah memperoleh persetujuan BI.

Kemudian, sebagian aliran dana talangan Bank Century yang totalnya Rp6,7 triliun diduga mengalir ke partai politik dan pasangan Capres-Cawapres tertentu. Tentang aliran dana ini, sudah dipastikan akan sulit dibuktikan. Kecuali penerima dana talangan tersebut 'masih bodoh' atau belum canggih melakukan korupsi.

Lalu, hingga kini, semua temuan BPK dan dugaan aliran dana tersebut dengan berbagai cara dan alasan dimentahkan pihak-pihak terkait. Bahkan, upaya BPK, KPK dan Pansus Angket DPR telah dianggap pula sebagai upaya kriminalisasi kebijakan. Apakah hal ini sebagai suatu bentuk kecanggihan korupsi? BPK, KPK dan Pansus Angket Bank Century ditantang untuk membuktikannya dengan tetap menganut asas praduga tidak bersalah. ■ BI/TSI



Satgas Pemberantasan Mafia Hukum di kantor kepresidenan (4/1)

# Dua Mata Pisau ACFTA

**ACFTA membersihkan pesimisme dan optimisme. Bagi produksi dalam negeri yang sudah didukung berbagai sarana dan prasarana serta kebijakan pemerintah, tentu perdagangan bebas menjadi peluang besar. Namun sebaliknya, jika tidak ada dukungan, perjanjian tersebut bisa menjadi malapetaka.**

**P**erjanjian perdagangan bebas pada prinsipnya dibuat agar pihak-pihak yang bersepakat lebih mendapat keuntungan. Dengan dihapuskannya semua atau sebagian dari rintangan perdagangan, negara-negara yang bersepakat pun akan mendapatkan keuntungan yang sama. Terkait dengan Perdagangan Bebas ASEAN-China (ASEAN-China Free Trade Agreement/ACFTA), ASEAN maupun China masing-masing diperkirakan akan mendapat keuntungan tambahan US\$5 miliar dari sebelumnya.

Di sisi lain, dengan membuka pasar seluas-luasnya kepada negara lain, akan selalu ada kemungkinan sektor tertentu di dalam negeri yang dikorbankan. Artinya, mungkin ada sektor ekonomi tertentu di dalam negeri yang terancam karena tidak mampu bersaing. Tapi, seperti disebutkan Guru Besar Emeritus Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Lepi T Tarmidi dalam tulisannya, hal itu juga tidak berarti bahwa sektor tersebut kalah total. Karena, hal itu memberikan petunjuk bahwa sektor bersangkutan memang lemah dan perlu pembenahan. Jadi, kerugian itu bisa diminimalisasi dengan meningkatkan efisiensi serta daya saing.

Dalam kaitan itu, perlu juga diketahui, bahwa dalam perundingan suatu kawasan perdagangan bebas, tidak berarti bahwa semua sektor barang dan jasa harus dibuka. Asal didukung alasan kuat, sejumlah sektor bisa diminta waktu pembebasan lebih panjang.

Dalam hal ACFTA, perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia-China mencakup semua sektor, kecuali persetujuan mengenai *Early Harvest Program*, yakni perdagangan bebas di bidang pertanian. Dalam hal ini, Indonesia mengajukan 14 item produk yang dikecualikan dari per-

dagangan bebas. Klausul itu telah disetujui China. Namun, untuk menerapkannya, harus dibuktikan bahwa memang terjadi kerugian pada sektor-sektor tertentu itu.

Terkait dengan untung rugi di atas, Indonesia memilih ikut bergabung dengan ACFTA karena memperhitungkan akan menguntungkan. Apalagi pemberlakuan perdagangan bebas ini sebelumnya sudah direncanakan sejak tahun 1992. Kemudian dimatangkan lagi pada tahun 1994 di Bogor atas inisiatif KTT APEC terkait liberalisasi perdagangan. Lalu pada tahun 2003, melalui pertemuan 10 negara ASEAN yang menghasilkan perjanjian Bali Concord II yang menyepakati integrasi pada tiga pilar yakni bidang ekonomi, budaya dan keamanan. Selanjutnya, pemberlakuan ACFTA bahkan disepakati akan dipercepat menjadi tahun 2010 dari rencana semula tahun 2015, dengan maksud untuk mencegah terjadinya penyeludupan, antidumping, dan perdagangan yang tidak jujur. Sejak tahun 2004 hingga awal 2010, telah dihasilkan pula ribuan pos tarif yang termasuk dalam kesepakatan ACFTA.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (25/1/2010) mengatakan, perjanjian perdagangan bebas antara China dan negara-negara yang tergabung dalam ASEAN, termasuk Indonesia, bukan ancaman, tetapi peluang. Soal hitung-hitungannya, Presiden mengatakan, nilai ekspor Indonesia terhadap AS dan Jepang pada tahun 2009 lalu merosot. Sebaliknya, terhadap China pada periode yang sama meningkat. "Nilainya melampaui 30 juta dollar AS. Jadi ini (ACFTA) bukan *threat*, tapi *opportunity*," ujarnya.

Senada dengan itu, Menko Bidang Perekonomian Hatta Rajasa juga menyatakan, potensi perdagangan Indonesia-China dengan hadirnya penerapan



*Mainan anak-anak buatan China semakin membanjiri*

ACFTA menunjukkan tren positif. "Ekspor sawit kita yang tadinya nihil, namun pada 2004 nilai ekspor kita itu tercatat 1,7 miliar dolar AS dan potensinya terus tumbuh dengan nilai perdagangan saat ini 34 miliar dolar AS," ujarnya di Dumai, Riau (23/1/10). Lebih lanjut, Hatta menyatakan, pemerintah Indonesia terus bertekad, melalui ACFTA Indonesia akan mengalami realisasi perdagangan dengan surplus, baik dalam volume atau nilai.

Namun, walau sudah melewati waktu yang demikian panjang sejak direncanakan, ternyata setelah kesepakatan direalisasikan mulai 1 Januari 2010 lalu, Indonesia ternyata belum siap persen. Dari 1.696 pos yang sudah disepakati, ada 228 pos bebas tarif alias 0% yang dinyatakan belum siap. Di antaranya sektor manufaktur, tekstil, besi baja, beberapa hasil pertanian, dan lainnya. Artinya, jika pelaksanaan ACFTA dipaksakan, industri di sektor-sektor tersebut



pasar domestik

diperkirakan akan mengalami kerugian, bahkan kebangkrutan, yang kemudian akan berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) karena menurunnya produksi dalam negeri. Hal itu sekaligus dikhawatirkan akan mengguncang ekonomi nasional.

Mengenai ketidaksiapan itu, beberapa pengamat sebenarnya sudah memberi aba-aba sejak awal Desember 2009 lalu bahwa Indonesia sebenarnya belum siap melaksanakan kesepakatan tersebut. Berbagai pihak lainnya juga telah menuntut pemerintah agar menundanya.

Aviliani, pengamat ekonomi INDEF misalnya, pada awal Desember 2009 sudah mengatakan, Indonesia belum siap menghadapi ACFTA pada 1 Januari 2010. Pasalnya, biaya produksi barang-barang yang ada di Indonesia masih sangat tinggi. Indonesia, menurut Aviliani hanya unggul dalam sektor pertanian. Namun yang menjadi unggulan itu hanyalah barang

mentah, bukan barang jadi. Oleh karena itu, pemerintah menurutnya harus memberikan perlindungan pada sektor pertanian. Sebab, jika sektor pertanian dibebaskan, masyarakat yang hidupnya miskin akan semakin miskin.

Ketika itu, dia juga memperkirakan, Indonesia baru lima tahun mendatang siap menghadapi ACTFA. Itu pun dengan catatan jika pemerintah melakukan efisiensi birokrasi karena hampir 15% *cost of production* itu dari birokrasi. Selain itu, perbaikan infrastruktur juga menurutnya harus dipercepat. Demikian juga *public partnership* dan tukar guling. "Kalau tidak begitu, Indonesia tidak akan siap menghadapi ACFTA," tukasnya.

Sementara Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Unika Atmajaya Jakarta, A Prasetyantoko (21/1/2010) berpendapat, sebagai dampak ancaman penerapan ACFTA dan potensi risiko pengetatan ekonomi China, risiko sistemik di dalam negeri sebenarnya tengah merangkak ke permukaan. Yakni, akan ada ancaman PHK massal serta pengurangan sektor-sektor industri manufaktur (deindustrialisasi).

Lebih lanjut Prasetyantoko mengemukakan, transmisi ancaman sektor keuangan bukanlah satu-satunya risiko sistemik yang sedang mengancam Indonesia. Daya saing produk-produk China juga nyaris tak terkalahkan bahkan di level global. Sebaliknya, daya saing sektor produksi Indonesia begitu rendah. Jadi, kesepakatan dagang ASEAN-China diperkirakan hanya akan memudahkan China menyalurkan produk-produknya.

Serikat Pekerja Nasional (SPN) juga menolak diberlakukannya perdagangan bebas berkaitan dengan kesepakatan ACFTA, karena hal itu dinilai berdampak negatif kepada buruh di Indonesia. Dikatakan, kalau pemerintah pusat memang tidak dapat menolak atau menunda hal tersebut maka pemerintah mesti memberikan solusi bila terjadi penutupan perusahaan atau PHK terhadap buruh. Karena, sebelum ACFTA diberlakukan saja, sudah banyak perusahaan yang tutup dan melakukan PHK.

Jika melihat daya saing produk dalam negeri sekarang ini, kesepakatan perjanjian ACFTA memang merupakan kesepakatan paling berat bagi Indonesia. Walau tetap dilaksanakan, tapi Menteri Perindustrian Mohammad S Hidayat dalam Rapat Kerja Gabungan Komisi VI DPR dengan Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Mendag Mari Elka Pangestu, Menneg BUMN Mustafa Abubakar, dan Menneg Koperasi dan UKM Syarifuddin Hasan, Rabu (20/1) mengatakan, akan menggunakan haknya apabila terjadi dampak mematikan pada industri nasional. Sebab menurutnya, beberapa sektor industri keberatan dengan alasan

belum siap dan meminta pemerintah meninjau kembali komitmen Indonesia dalam perjanjian itu.

Menyadari adanya beberapa permasalahan itu, ditambah tuntutan berbagai pihak, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun, Kamis (21/1) akhirnya berjanji akan melakukan pembicaraan ulang dengan China. Artinya, Pemerintah Indonesia akan meninjau kembali implementasi Perjanjian ACFTA. Pembicaraan itu untuk memastikan Perjanjian ACFTA tidak berdampak buruk bagi perekonomian nasional. Dengan demikian, sektor-sektor industri yang belum siap tersebut bisa terselamatkan dan memiliki waktu untuk mempersiapkan diri.

Tapi SBY juga mengingatkan, Indonesia tidak bisa begitu saja menarik diri dari perjanjian ACFTA. Jika menarik diri, Indonesia akan berhadapan dengan sembilan negara anggota ASEAN lainnya, juga China sendiri. Karena itu, dia memastikan, Indonesia akan tetap berusaha menjaga jalinan kerjasama dengan sesama negara ASEAN ataupun antara ASEAN dan mitra-mitra ekonominya. Dia mengatakan, Indonesia tidak ingin dianggap tidak menyepakati apa yang telah dirumuskan oleh 10 anggota ASEAN.

Kini setelah persetujuan itu diberlakukan, sejumlah keluhan mencuat dari sektor industri. Ketua Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), Eddy Widjanarko mengakui kini semakin sulit mendapat kredit bank. Pihak bank memberi banyak tambahan pertanyaan saat anggotanya mengajukan pinjaman setelah pemberitaan ACFTA marak. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofjan Wanandi bahkan merasa perbankan mencari alasan pesimisme menghadapi ACFTA sebagai dasar keengganan mengucurkan kredit.

Oleh sebab itu, pemerintah diharapkan sudah mulai meneliti dampak dari ACFTA ini untuk evaluasi ke depan. Jika dalam perdagangan bebas itu Indonesia merasa dirugikan, pemerintah diharapkan bisa bersikap lebih bijak. Hal tersebut perlu ditegaskan karena seperti diketahui China belakangan ini adalah suatu fenomena yang bukan saja dihadapi oleh Indonesia, tetapi juga oleh seluruh dunia, termasuk Amerika Serikat (AS), Eropa, dan Jepang yang negaranya dibanjiri produk-produk buatan China yang super murah.

Tapi, jika produk Indonesia memang bisa bersaing, ACFTA perlu dilanjutkan karena memberi peluang besar bagi Indonesia. Karena, Negeri Tirai Bambu itu merupakan pasar yang luar biasa besar, apalagi kemakmuran rakyatnya meningkat terus. Di samping itu, dengan adanya perdagangan bebas ini, arus penyelundupan barang dari China ke Indonesia juga secara otomatis akan hilang. ■ MS

## Skandal Bank Century

# Sedikit Titik Terang

**Sembilan fraksi dalam Pansus Angket Bank Century memang sudah menyampaikan pandangan akhir yang akan disimpulkan dalam rapat paripurna. Namun peran KPK dan Kepolisian jualah yang akan menuntaskan kasus Bank Century ini hingga terang benderang.**

**D**ua bulan lebih perhatian bangsa Indonesia terpusat pada kinerja Panitia Khusus DPR tentang Hak Angket Bank Century (Pansus Angket Bank Century). Waktu dan energi anggota pansus angket terkuras demi menuntaskan kasus skandal Bank Century ini. Perhatian pemerintah juga diyakini ikut terpecah dalam bekerja.

Setelah sebelumnya sempat tertunda pada 4 Februari 2010 lalu, pandangan akhir fraksi anggota Pansus hak angket akhirnya disampaikan pada 23 hingga 24 Februari 2010. Dari pemaparan pandangan akhir fraksi ini, sembilan fraksi anggota pansus, tak terkecuali Fraksi Partai Demokrat (F-PD), secara kompak sependapat menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran dalam proses merger Bank Century. Kemudian dalam pengaliran dana, delapan fraksi - kecuali F-PD, menyebut terjadi pelanggaran. Sedangkan dalam proses *bailout* dan pemberian PJPT, tujuh fraksi kecuali F-PD dan F-PKB sepakat menyebut telah terjadi pelanggaran.

Terkait dengan berbagai pelanggaran itu, empat fraksi yakni F-PG, F-PDIP, F-PPKS dan F-Partai Hanura secara tegas menyebutkan nama-nama yang dianggap bertanggung jawab antara lain: pemilik saham Bank Century Robert Tantular, Hesham Al Warraq dan Rafat Ali Rizvi, mantan Gubernur BI yang kini Wakil Presiden Boediono, Menkeu sekaligus Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Sri Mulyani, Sekretaris KSSK Raden Padede, Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Firdaus Djaelani, mantan Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi (UKP3R) Marsillam Simanjuntak, serta pejabat BI sebelum *bailout* seperti Aulia Pohan dan Miranda Swarai Gultom.

Sementara itu, Fraksi Partai Gerindra hanya menyebut instansi dan jabatan yang bertanggung jawab. Sedangkan F-PAN dan F-PPP hanya menyebut instansi yang bertanggung jawab.

Sebelumnya, melihat beberapa kegagalan dalam keterangan para saksi yang dipanggil dalam angket ini, seperti dari Boediono; Sri Mulyani; Raden Padede; Firdaus Djaelani; Komisioner LPS Rudjito; Marsillam Simanjuntak, mantan Kabareskrim Komjen Susno Doadji, dan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, sejak awal memang sudah ada dugaan akan adanya pelanggaran hukum dalam kasus ini. Karena itulah masyarakat berharap ada titik terang yang bisa dibuka oleh Pansus. Namun, ketika melihat lambatnya proses investigasi, ditambah lagi dengan etika sebagian anggota pansus yang tidak menunjukkan keteladanan, bahkan memalukan, masyarakat sempat mulai tak sabar dan merisaukan kasus ini bakal bergerak tanpa arah dan tak terkendali.

Perbedaan penafsiran para pengamat yang dimintai pendapat seperti, pengamat ekonomi Chatib Basri, Ichsanuddin Noor-sy, Hendri Saparini, Dradjad Wibowo, Rizal Ramli, Faisal Basri, Fauzi Ikhsan, Kwik Kian Kwe, serta pakar hukum Erman Rajagukguk dan Pakar Hukum Pidana yang juga mantan hakim MK, HAS Natabaya, menambah kerisauan tersebut. Di dalam anggota Pansus sendiri, F-PD sebagai partainya pemerintah ngotot membenarkan kebijakan pemerintah.

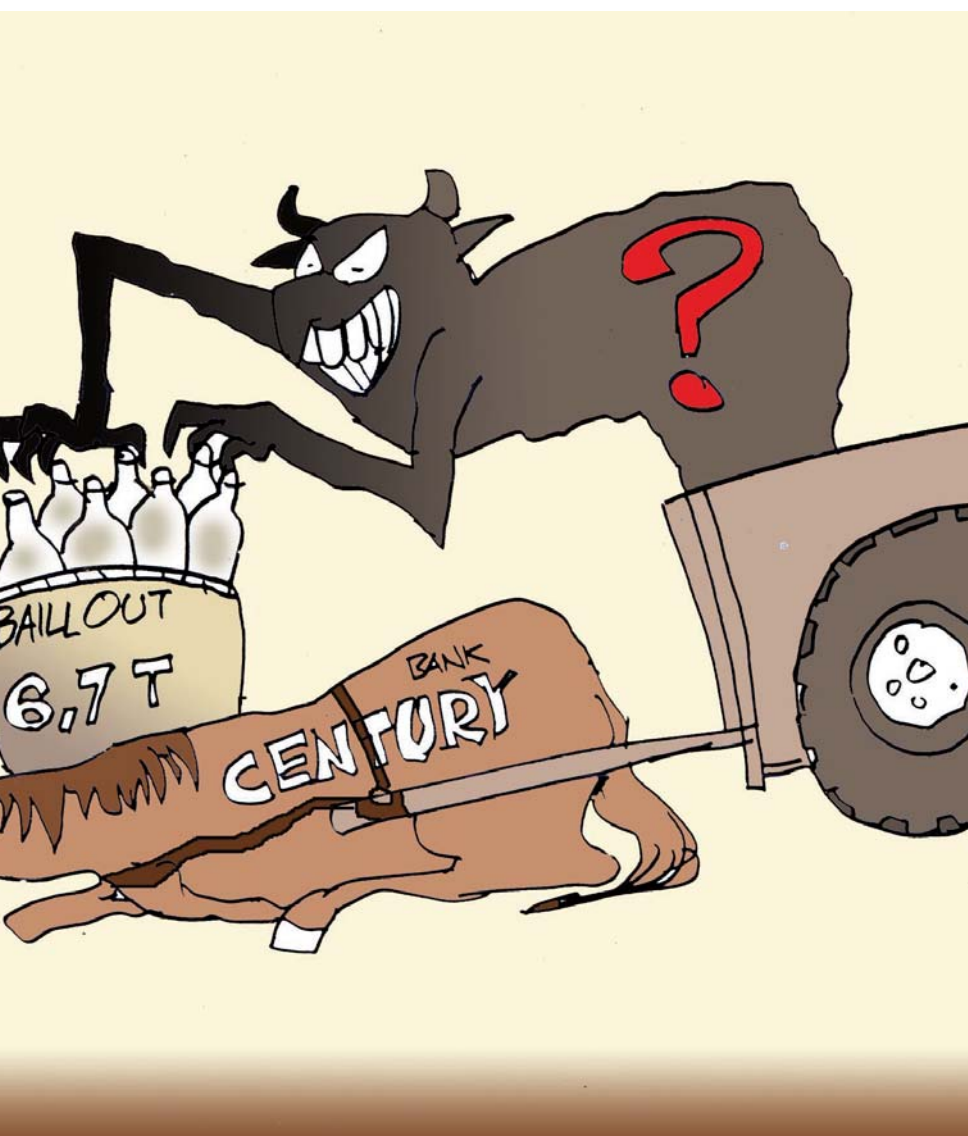
Dalam perkembangan penyelidikan, pansus yang kemudian menemukan data-data baru seperti aliran dana mencurigakan kepada berbagai pihak khususnya kepada beberapa anggota DPR dari fraksi tertentu, ditambah dengan temuan-temuan berbagai LSM, seperti LSM Bendera, akhirnya kecurigaan publik akan



adanya keterlibatan pemerintah yang sedang berkuasa, tidak bisa dihindarkan.

Kini, dengan disampaikannya pandangan akhir fraksi ini, muara dari hak angket pun mulai terlihat. Seperti disebutkan sejak awal, tujuan hak angket Bank Century adalah untuk meneliti benar salahnya kebijakan *bailout* Bank Century. Artinya, suksesnya angket ini bukan diukur dari berhasil tidaknya menumbangkan pemerintahan. Sebab, jika hal itu yang dibuat ukuran, hal tersebut sejak awal sudah disadari masih jauh dari kemungkinan.

Sebagaimana pernah dikatakan Wakil Ketua MPR RI Lukman Hakim Syaifudin dalam diskusi 'Tata Cara Pemakzulan Wapres' di Jakarta pada 20 Januari 2010 yang dirilis *harian Indopos* (21/1), *impeachment* atau pemakzulan terhadap presiden dan wakil presiden terkait masalah *bailout* Bank Century sulit untuk dilakukan. Menurutnya, konstitusi memang membuka peluang untuk itu, tapi



realitas politik masih belum mendukung. "Pemakzulan untuk konteks Indonesia saat ini, ibarat mimpi di siang bolong," katanya.

Dia menjelaskan, bila dikaitkan dengan Pansus Angket Century, proses pemakzulan masih panjang. Sebab, sekalipun pansus memutuskan Boediono bersalah, keputusan itu harus dibawa ke paripurna DPR. Syarat kuorumnya minimal dihadiri setengah lebih satu dari 560 anggota DPR. Dan agar bisa menjadi keputusan DPR, harus disetujui lebih dari setengah anggota DPR yang hadir.

Jika keputusan pansus disetujui paripurna, DPR masih harus melanjutkannya dengan hak menyatakan pendapat. Pengusulannya minimal ditandatangani 25 orang anggota DPR. Usul ini pun kembali dibahas paripurna. Syarat kuorumnya dihadiri lebih dari 3/4 anggota dewan dan harus disetujui lebih dari 3/4 anggota yang hadir.

Menurut Lukman, di sini realitas politik

parlemen akan sangat menentukan. Sebab, seperempat anggota DPR atau 140 orang cukup untuk memboikot paripurna. Padahal seperti diketahui, Fraksi Partai Demokrat saja sebagai pendukung pemerintahan SBY sudah menguasai 148 kursi DPR. "Dalam hitungan atau kalkulasi politik normal, kalau Partai Demokrat memboikot, DPR sudah kesulitan untuk kuorum," ujarnya.

Selanjutnya, bila usul hak menyatakan pendapat disetujui, paripurna kemudian membentuk pansus yang diberi waktu selama-lamanya 60 hari untuk membahas isi pendapat tersebut. Setelah selesai, pansus yang dibentuk itu melaporkannya ke sidang paripurna DPR untuk dibahas. Paripurna ini juga harus kuorum, yakni dihadiri lebih dari 2/3 anggota DPR dan disetujui lebih dari 2/3 yang hadir.

Kalau dewan melalui hak menyatakan pendapatnya menilai presiden dan wapres diduga melakukan pelanggaran hukum seperti yang disebutkan konstitusi, maka

sikap DPR itu kemudian dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk diperiksa dan diadili, yang waktunya diberikan selama-lamanya 90 hari.

Bila MK membenarkan adanya pelanggaran hukum dimaksud, maka DPR akan meminta MPR untuk bersidang. Dalam sidang MPR itu, presiden/wapres harus diundang agar bisa memberi penjelasan terlebih dahulu. Setelah itulah baru MPR menyatakan memberhentikan atau tidak.

Mendukung apa yang disebutkan Lukman tersebut, pemakzulan memang sejak awal sudah terlihat hanya khayalan belaka. Sebab, masih dalam tahap rencana meminta kesaksian Presiden SBY di hadapan Pansus saja, beberapa pimpinan pusat partai sudah sepakat menilai bahwa presiden tidak terlibat dalam skandal ini, sehingga mereka sejak dini sudah sepakat tidak memanggil Presiden SBY ke hadapan Pansus. Hal tersebut memang semakin terbukti setelah melihat hasil pandangan akhir fraksi Pansus dimana tidak ada fraksi yang menyebut adanya keterlibatan Presiden SBY.

Namun terlepas dari terlibatnya Presiden SBY atau tidak, harapan masyarakat sudah mulai tergenapi dengan adanya kesimpulan akhir mayoritas fraksi yang menyatakan adanya orang atau pihak yang dipersalahkan dalam skandal ini. Sebab di mata masyarakat, tidaklah masuk akal jika tidak ada yang dipersalahkan dengan kasus hilangnya uang negara sebesar Rp 6,7 triliun.

Harapan masyarakat itu masih akan teruji lagi di dalam rapat paripurna DPR. Namun, melihat kegigihan pansus menyelesaikan skandal Bank Century selama ini, dimana di tengah adanya berbagai indikasi ancaman politik yang disampaikan pihak pemerintah dengan menyebarkan wacana reshuffle dan isu penungggakan pajak, bahkan berbagai teror dan lobi-lobi menyesatkan, anggota pansus ternyata tetap berpendirian teguh memaparkan temuan secara transparan. Kenyataan ini membuat masyarakat optimis kalau rapat paripurna pun akan menyimpulkan hal yang sama.

Selanjutnya, jika pandangan akhir fraksi ini akhirnya sama dengan kesimpulan rapat paripurna, masyarakat akan menunggu kejelasan, kejujuran dan keberanian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, sesuai dengan rekomendasi mayoritas fraksi dalam pandangan akhir yang juga akan menjadi rekomendasi DPR pada rapat paripurna Maret 2010, temuan Pansus itu akan disampaikan kepada KPK untuk diusut secara hukum.

Di sinilah peran seluruh elemen masyarakat diperlukan untuk terus mengawasi, mendukung dan mendorong DPR, KPK, dan Kepolisian menuntaskan kasus ini hingga terang benderang. ■ **JK, PAN**

# Ibarat Luka Disiram Air

**Dalam pidatonya, Presiden mengatakan akan memprioritaskan peningkatan kesejahteraan rakyat. Namun kenyataannya lebih banyak berbicara lain.**

**S**udah luka disiram air cuka pula, mungkin itulah kira-kira gambaran perasaan kebanyakan rakyat Indonesia di awal tahun 2010 ini. Di tengah kesusahannya mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok akibat naiknya harga berbagai bahan pokok seperti, beras, minyak, gula, dan lainnya, mereka justru menyaksikan perilaku pemimpinnya yang seakan tidak memedulikan perasaan rakyatnya.

Berita mengenai begitu gampangnya pengelola keuangan negara ini memberikan bantuan triliunan rupiah kepada bankir penipu yang pura-pura kesulitan keuangan padahal banknya kolaps karena dia rampok sendiri, telah mengusik rasa keadilan rakyat. Lebih memiriskan lagi, rakyat juga mendengar bagaimana para pemimpin yang mereka pilih itu seakan berlomba menjejalkan diri tanpa memedulikan penderitaan rakyatnya.

Bahkan rencana kenaikan gaji pejabat negara di awal tahun 2010 ini membuat luka itu semakin perih. Pejabat negara yang akan dinaikkan gajinya antara lain Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Panglima TNI, Jaksa Agung, Ketua DPR/DPD, Ketua MPR, anggota DPR dan Hakim, Gubernur, Bupati/Walikota, serta pimpinan tinggi pada komisi-komisi negara. Tidak tanggung-tanggung, kenaikan gaji menteri misalnya diperkirakan bisa mencapai 20 persen.

Seperti diberitakan, pada Oktober 2009 lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, remunerasi atau kenaikan gaji pejabat negara sudah bisa diberlakukan pada 1 Januari 2010. Alokasi anggarannya sudah tersedia dalam APBN 2010. "Sistem ini sudah siap berdasarkan anggaran, jika kebijakan politiknya sudah setuju maka bisa mulai 1 Januari 2010," ujar Sri Mulyani dalam jumpa pers di Gedung Departemen Keuangan ketika itu (28/10/2009).

Ada pun alasan yang dilontarkan Mulyani soal rencana itu di antaranya, bahwa gaji pejabat negara termasuk menteri di Indonesia secara rata-rata lebih rendah dibandingkan pejabat negara dan menteri di negara lain.

Remunerasi pejabat negara yang berlaku saat ini, menurut Sri Mulyani, terdiri atas tiga komponen. Pertama, gaji pokok atau *salary*. Kedua, tunjangan atau *allowance* yang terdiri atas tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, tunjangan kehormatan, uang sidang, tunjangan komunikasi

intensif, dan lain-lain yang bervariasi pada setiap lembaga negara. Ketiga, fasilitas atau *benefit* yang terdiri atas kendaraan dinas, rumah jabatan, kesehatan, listrik dan telepon, sopir pribadi, operasional harian, bantuan BBM, pengawalan dan pelayanan pimpinan, dan lain-lain yang bervariasi pada setiap lembaga negara.

Dia menyebutkan, jika diperhitungkan hanya dalam bentuk uang tunai, secara rata-rata penghasilan (gaji dan tunjangan) pejabat negara relatif rendah. "Karena itu, banyak pejabat negara yang mendapatkan tambahan tunjangan dari masing-masing lembaga berdasar kebijakan internal atau surat Sekjen masing-masing," terangnya. Sejauh ini, seorang menteri misalnya, hanya menerima gaji pokok Rp 18 juta. Tetapi, jika ditambah dengan berbagai tunjangan yang diperoleh, *take home pay* mereka bisa Rp 50-60 juta per bulan. Tunjangan itu berupa tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, kehormatan, uang sidang, komunikasi intensif, dan lain-lain.

Di samping itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) dan Reformasi Birokrasi E.E. Mangindaan (27 Oktober 2009) mengatakan, kenaikan gaji pejabat negara itu sebenarnya sejalan dengan program peningkatan kinerja birokrasi, termasuk dalam persoalan pelayanan publik.

Sementara menyangkut rencana perhitungan kenaikan gaji, Deputy Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Ramli Naibaho menyebutkan, perhitungan kenaikan gaji pejabat itu akan diselenggarakan dengan kenaikan gaji PNS yang sudah tertantum dalam APBN 2010. Kuota kenaikannya 5 persen. Namun, jumlah tersebut akan tergantung dari beban kerja masing-masing pejabat. Artinya, pejabat yang memiliki beban kerja lebih tinggi akan memperoleh kenaikan gaji di atas 5 persen. Jadi semakin berat pekerjaan pejabat itu, maka penghasilan yang akan ia terima juga akan semakin besar.

Selain alasan disebutkan di atas, Sri Mulyani juga mengatakan bahwa dasar hukum penetapan remunerasi pejabat negara selama ini, yakni UU Nomor 12 Tahun 1980 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi terakhir ini, karena tidak mengatur remunerasi lembaga negara baru yang dibentuk dengan Amendemen ke-4 UUD 1945 berdasarkan TAP MPR No



Unjuk rasa masyarakat menanggapi pemberian mobil

IV Tahun 2002 seperti DPD, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial.

Pengaturan remunerasi pejabat negara pun tersebar dalam berbagai peraturan perundangan - lebih dari 35 peraturan dalam bentuk PP, Kepres, Perpres, Keputusan Menteri Keuangan, dan SK Sekjen Kementerian/Lembaga, sehingga tidak ada konsistensi dalam penetapannya, sekaligus menyebabkan tidak adanya keseragaman dalam pemberian gaji dan tunjangan pejabat negara, baik eksekutif, yudikatif, maupun legislatif. Jadi, dengan adanya peraturan yang baru nanti, maka semua peraturan itu akan dihapuskan supaya tidak terjadi tumpang tindih.

Untuk merespon persoalan tersebut, menurut Sri Mulyani, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sejak tahun 2005 telah menginstruksikan dirinya dan MenPAN untuk menyusun suatu kebijakan yang utuh dan komprehensif agar tercapai suatu sistem remunerasi pejabat negara yang adil dan tepat. Dan untuk menindaklanjuti instruksi tersebut, tim evaluasi remunerasi pun mereka bentuk pada tahun 2006.

Tujuan evaluasi dan penyempurnaan sistem remunerasi itu sendiri adalah untuk menyediakan sistem penggajian pejabat negara yang sepenuhnya berbasis pada pekerjaan yang dilakukan, terbentuknya sistem penggajian pejabat negara yang transparan, terlaksananya prinsip-prinsip penetapan besaran gaji yang sama untuk pekerjaan yang sama, dan mendu-

# ir Cuka



mewah pada pejabat negara

kung pelaksanaan reformasi tata kelola pemerintahan yang baik.

Sejak Menkeu memberitahukan adanya rencana tersebut pada Oktober 2009 lalu, secara spontan masalah ini menjadi perdebatan di kalangan masyarakat. Dari pihak yang setuju, selain pemerintah, ada juga beberapa pihak yang mendukung. Ketua MPR Taufiq Kiemas misalnya, entah karena ikut kebagian kenaikan gaji tersebut, politisi dari PDI Perjuangan ini setuju dengan rencana tersebut. Menurutnnya, kenaikan gaji tidak menjadi masalah sebab penghasilan pemerintah sudah cukup. "Kalau menteri saja yang naik, tidak prorakyat. Ini kan yang naik semuanya. Ya wajar-wajar saja," kata Taufiq (26/10/2009).

Sebaliknya, pihak yang tidak setuju juga memberi alasan yang tidak kalah logis. Yuna Farhan dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) misalnya, menolak rencana tersebut karena, kenaikan tersebut menurutnya bakal membawa implikasi langsung ke masyarakat kecil. Disebutkan, kenaikan pos anggaran belanja pegawai dalam APBN 2010 pasca-rencana kenaikan gaji pejabat negara ini telah mengurangi pos subsidi dan bantuan sosial. Buktinya, pada APBNP 2009 belanja subsidi yang mencapai Rp 157,7 triliun, berkurang Rp15,6 triliun pada RAPBN 2010. Sementara belanja bantuan sosial, berkurang Rp 8,7 triliun dari besaran sebelumnya Rp 77,7 triliun. "Ini memprihatinkan. Sebab, dua pos itulah

yang berkaitan langsung dengan rakyat kecil," ujarnya sebagaimana dirilis *budgetinfo.com* (3/11-2009).

Ekonom UGM Sri Adiningsih, juga mengkritisi rencana tersebut karena dinilai tidak tepat waktu. Apalagi di tengah masih banyaknya pengangguran dan korban PHK dampak krisis keuangan global.

Fraksi PDI-P juga ketika itu secara tegas menolak rencana tersebut. Sekjen DPP PDI-P yang juga Wakil Ketua DPR, Pramono Anung, Senin (26/10) di DPR menyatakan bahwa gaji para menteri dirasakan sudah cukup. "Fraksi PDI-P akan menolak itu, dan saya rasa, gaji menteri sudah cukup. Ada dana taktis yang besar, ada transportasi, pakaian. Mau makan juga ada uangnya, apalagi bekerja saja belum, kok sudah ada polemik soal kenaikan gaji, harusnya kinerja berjalan dulu. Kemudian, dilihat pantas atau tidak ada kenaikan gaji," katanya. Pramono menegaskan, kondisi ekonomi Indonesia ke depan sedang dalam masa pemulihan. Dengan demikian, jika ada kenaikan gaji para menteri, maka kebijakan itu akan jauh dari rasa keadilan.

Sekretaris Fraksi Gerindra DPR, Ahmad Muzani, juga meminta pemerintah menunda rencana menaikkan gaji tersebut. "Kan, dalam pidato presiden juga sudah dijelaskan, prioritasnya adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, bukan untuk meningkatkan kesejahteraan para pejabat negara," tandasnya.

Penolakan juga disampaikan Yudi Latief. Menurutnnya, kenaikan gaji Presiden dan pejabat negara sebesar 20 persen sebagai inkonsistensi pemerintahan SBY-Boediono dalam penafsiran terhadap keadaan yang disebut krisis. "Itu menunjukkan inkonsistensi, di satu sisi corenya seragam untuk kasus Century, krisis diakui keberadaannya. Tapi, program lain seperti elitisi untuk pencitraan presiden, situasi krisis diabaikan, dikatakan ini suatu kepentingan yang mendesak," kata Yudi Latief.

Secara terpisah, mantan anggota DPR Drajad Wibowo menyatakan, kenaikan gaji pejabat negara itu memang belum layak dilakukan saat ini. "Bagaimanapun, menteri-menteri ini punya dana taktis sangat besar. Belum lagi sabetan-sabetannya. Coba lihat saja, nggak ada 'kan menteri yang kekayaannya berkurang?' sindirnya.

Meski menuai banyak kecaman, pemerintah tidak berubah keputusan. Tim evaluasi yang dibentuk pemerintah pun tetap bekerja. Alhasil sistem baru pun tadinya sudah siap dijalankan per 1 Januari 2010. Artinya, kenaikan gaji ini seyogianya sudah bisa dilaksanakan pada 1 Januari 2010.

Namun, Sri Mulyani (29 Januari 2010)

menepis kabar rencana kenaikan gaji pejabat tinggi negara, termasuk Presiden dan para menteri, sebesar 20 persen tersebut. Dia menyebut, belum ada rencana untuk menaikkan gaji para pejabat negara. Dia menjelaskan, program penataan gaji para pejabat negara memang pernah dibahas bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun, belum dilaksanakan.

Sementara Ketua Badan Anggaran DPR Harry Azhar Azis mengakui, bahwa DPR dan Pemerintah telah sepakat menaikkan gaji pejabat negara. Besar anggaran yang dialokasikan mencapai Rp 158 triliun.

Dari perbedaan dua sumber di atas, boleh diartikan bahwa kenaikan yang dimaksud mungkin adalah renumerasi, tunjangan, bukan gaji pokok. Tapi apa pun namanya itu, masyarakat tahunya bahwa pendapatan pejabat negara dinaikkan.

Sebenarnya, penolakan yang kuat soal kenaikan gaji pejabat negara ini merupakan lanjutan dari gelombang penolakan soal pengadaan mobil dinas menteri dan para pejabat negara, serta pengadaan komputer di DPR.

Seperti diketahui, belum lama ini para menteri dan pejabat negara lainnya mendapat mobil dinas baru merk Toyota Crown Royal Saloon berkapasitas 3000 cc seharga Rp1 miliar lebih. Walaupun Mensesneg Sudi Silalahi menyatakan bahwa harga mobil itu sebenarnya di bawah Rp 1 miliar dan penggantian mobil dari sebelumnya jenis Camry itu juga karena Camry yang dibeli lima tahun lalu itu sudah sering masuk bengkel, namun sebagian besar masyarakat tetap menganggap bahwa hal itu menunjukkan ketidakpekaan pemerintah terhadap kondisi ekonomi negara sekaligus menjadikan pemimpin negeri ini semakin tidak merakyat.

Menanggapi penggantian mobil ini, Indonesia Corruption Watch (ICW), sebelumnya pernah mempertanyakan apakah ada korelasi antara jenis mobil dengan kinerja pejabat itu?

Bukan hanya mobil mewah tersebut, pengadaan komputer untuk DPR senilai Rp 15,5 juta per unit juga telah mengusik perasaan masyarakat. Menurut peneliti hukum dan politik anggaran Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam, pengadaan komputer itu merupakan pemborosan uang negara. Karena menurutnnya, harga personal computer (PC) dengan spesifikasi tercanggih saat ini paling-paling Rp 5 juta. Jadi menurutnnya, ada pembengkakan dana sebesar Rp 11 juta per unitnya dalam kasus ini.

Itulah beberapa kebijakan pemerintah yang sering melupakan perasaan masyarakat. Sudah sifat dasar manusia memang, egois dan tidak pernah merasa cukup soal materi. ■ MOR, CID

## Syaykh AS Panji Gumilang

# Hadapi Tantangan dengan Kearifan L

Selaras isu pemanasan global yang sedang hangat dibicarakan di dunia internasional, Syaykh al-Zaytun menyerukan upaya menghadapi tantangan alam tersebut dengan kearifan lokal.

**S**yaykh AS Panji Gumilang mengatakan, menurut kisaran yang dibuat oleh cerdik pandai, ke depan, diprediksi akan banyak bencana besar. Kekurangan pangan, kekurangan air, angin berhembus lebih dari biasanya, panas akan lebih meningkat, dan sakit-penyakit akan lebih banyak lagi. Jutaan manusia diprediksi akan kelaparan.

Tentang bencana, Syaykh mengatakan, dunia sudah mencatat beberapa kali peristiwa alam yang sangat besar, namun di situ selalu terselip sejarah terselamatkannya orang-orang yang melakukan kearifan lokal. Sebagai salah satu contoh, apa yang terjadi di Tanah Air pada tahun 2004 silam, yakni tsunami yang melanda Aceh. Ratusan ribu manusia meninggal, tapi ada satu pulau, pulau Simeulue yang berada paling dekat dengan pusat gempa, justru hanya menelan sedikit korban karena masih memelihara kearifan lokal.

Syaykh mengemukakan pertanyaan, mengapa negeri ini sering terkena bencana besar? Kalau disebut bahwa kita ada di *ring of fire* dan sebagainya, itu mungkin benar. Tapi intinya, kata Syaykh, dari ajaran Ilahi, karena manusianya banyak yang pasif, ingkar dengan janjinya sendiri.

Syaykh mengatakan, dari semua peristiwa itu, nyataah bahwa campur tangan Tuhan selalu ada. Tapi, belajar dari itu, bagaimana dengan manusia? Menurut Syaykh, kalau kita mengikuti jalan yang bisa menolong tugas Tuhan, kita akan selamat. Maka



Area Mahad Al-Zaytun yang hijau royo-royo

karena itu, ciptakanlah kearifan lokal.

Lebih jauh Syaykh mengatakan, sebagai manusia yang beriman, kita harus menggunakan kearifan. Berkaitan dengan pemanasan global yang sedang intens dibicarakan di dunia internasional akhir-akhir ini, kalau ingin adem, ingin sejuk dan iklim menjadi bagus, Syaykh menyerukan janganlah menebangi pohon lagi. Tapi sebaliknya, hendaklah menanam.

Menggunakan jumlah hadirin pada perayaan Tahun Baru 1 Muharram 1431 saat itu sebagai contoh, Syaykh mengatakan, jika 20 ribu orang yang hadir itu saja misalnya masing-masing menanam lima pokok tanaman keras sepulang dari acara tersebut, berarti sudah seratus ribu pohon yang

tertanam. Pohon tersebut kelak sudah bisa melindungi satu juta orang, yakni seratus ribu pohon kali sepuluh orang. Di samping itu, pohon tersebut juga akan memberikan oksigen yang bagus.

Diilhami perkataan Nabi Muhammad yang mengatakan, "Sekiranya engkau tahu kiamat terjadi esok hari, sedang di genggam tanganmu ada benih, maka tanamkanlah." Maka, Syaykh kepada orang-orang tua yang walau sudah berumur 60 tahun sekali pun, juga menganjurkan agar jangan pernah bertanya dapat apa dari menanam pohon.

Syaykh mengatakan, orang dulu telah menanam untuk kita, dan kita punya kesejahteraan karena orang terdahulu telah menanam. Sekarang,

# Global lokal

kita pun harus tanam untuk pelanjut kita. Sikap itulah, menurut Syaykh, harus dimiliki semua ummat. Jangan bersikap merasa tidak perlu lagi menanam karena sudah berumur 50 atau 60 tahun. Sebab, dengan sikap begitu, nanti akan membuat kehidupan tidak nyambung lagi.

Menurut Syaykh, di Indonesia kearifan lokal mulai sirna berawal sejak tahun 1955 sampai tahun 1960, tatkala ada gerakan pembaruan pemahaman keagamaan. Dimana, setiap ada tempat yang rimbun tanaman besar dan orang banyak ziarah ke situ, kemudian pohon-pohon disarungi, itu dikatakan musyrik, itu bid'ah. Sehingga pohon itu kemudian dibabat. "Yang dibabat kayunya, bukan cara mereka mendatangi kuburan itu. Dilandasi oleh sikap keagamaan, maka apriori terhadap pohon besar," tutur Syaykh.

Mengenai manfaat menanam pohon, Syaykh mencontohkan lingkungan Kampus al-Zaytun sendiri sebagai pembanding. Syaykh katakan, tahun 1999 ke belakang, kalau bulan Agustus-September, sebelum turun hujan, suhu di lokasi kampus Al-Zaytun bisa sampai 41 derajat, seperti di Mekkah, panas. Sepuluh tahun kemudian, dan sekarang ini, sudah 30-an derajat. Hal tersebut, menurut Syaykh, tidak lepas dari sudah tumbuhnya banyak pohon di lingkungan Kampus Al-Zaytun.

Syaykh menambahkan, seiring dengan tumbuhnya pohon-pohon tersebut, keseimbangan alam pun ditemukan. Di mana, burung dan binatang lainnya pun kemudian berdatangan ke lingkungan Al-Zaytun. Kampus Al-Zaytun pun akhirnya menjadi pusat persinggahan burung. Ratusan ribu burung ada di tempat itu, di antaranya burung bangau, burung kuntul, burung belibis, bebek liar, dan burung tekukur.



*Syaykh Al-Zaytun: Kita harus menanam pohon untuk pelanjut kita*

Namun, seiring dengan itu, mengingat burung tekukur, misalnya, di pasaran dihargai Rp50 ribu-an satu kepala, burung itu pun dicari banyak orang. Sehingga, sering dari kampus tersebut diuber-uber orang supaya terbang ke luar, untuk kemudian ditangkap.

Maka berkaitan dengan itu, di kampus Al-Zytun pun kemudian dibuat hukum baru yakni, siapa yang membawa senjata angin, senjata ketapel atau pasang perangkap di lingkungan kampus yang seluas 1.200 ha itu, akan ditangkap, kemudian diserahkan ke polisi. Intinya, bahwa di lingkungan Al-Zaytun tidak boleh ada orang yang menakut-nakuti binatang, apalagi menakut-nakuti manusia. Yang melanggar akan ditangkap dan

diserahkan ke polisi. Jadi yang menangani bukan Al Zaytun, tapi diserahkan ke polisi.

Karena polisi sudah mengerti undang-undang lokal itu, yakni hanya untuk menjaga kearifan lokal, maka Al Zaytun tidak dinamakan punya hukum sendiri.

Dalam rangka menjaga kelestarian kehidupan, Syaykh mengatakan bahwa antar Kepolisian Sektor (Polsek) dan Koramil Gantar serta keamanan Al-Zaytun juga sering melakukan patroli bersama di lingkungan seputar kampus.

Masih mengenai kearifan lokal menuju keharmonisan kehidupan, menurut Syaykh, di kampus Al-Zaytun boleh hidup babi liar atau yang sering dinamai celeng. Hal tersebut, menurut Syaykh, terkait pada pendapat sebagian



Temu ramah eksponen Al-Zaytun dengan warga sekitar kampus pada 1 Muharram 1431 H

**Pohon bisa menahan panas, menahan angin, dan air. Dengan begitu, masyarakat akan merasa sejuk, pemanasan global juga sekaligus bisa diatasi.**

orang yang mengatakan babi hutan itu halal karena hidupnya di hutan. Sementara babi tetap dianggap haram karena hidup di kampung dan dipelihara manusia. Jadi, supaya celeng tetap menjadi haram, oleh Al-Zaytun celeng dibiarkan ada di kampus Al-Zaytun.

"Artinya, supaya celeng tetap menjadi haram, celeng dimasukkan ke kampus, dipelihara, kemudian bebas. Artinya, dibebaskan dalam pemeliharaan. Dengan begitu, celeng yang tadinya menurut sebagian orang halal itu akan tetap haram hukumnya," jelas Syaykh.

Seperti diketahui, lingkungan pusat pendidikan pengembangan budaya toleransi dan perdamaian bersistem satu pipa, Al-Zaytun, ini kini tak ubahnya kota dalam hutan atau hutan dalam kota. Seluruh sarana dan prasarana pendidikan di tempat tersebut dihubungkan dengan tanaman. Maka, jika Pemda Indramayu sebagaimana diinformasikan Anis Khoirunnisa yang merupakan anggota DPRD Indramayu, baru-baru ini baru mau mengajukan rancangan Perda tentang hutan kota, di Al-Zaytun sudah 'Kampus Hutan', bukan 'Hutan Kampus'. Hal tersebut, menurut Syaykh, agar kampus ini ikut bersama manusia sejadat menanggulangi pemanasan global. Minimal ada tempat yang bisa berteduh.

Mengenang masa awal pembangunan Mahad Al-Zaytun, Syaykh mengatakan, dulu ada yang mengeritik pada waktu Al-Zaytun mulai menanam jati. "Pak, kenapa nanam jati, kan umurnya panjang. Kapan kita panennya?" kata pengeritik. Menjawab pertanyaan itu, Syaykh ketika itu mengatakan *nggak* apa-apa. Cari dan tanam yang panjang-panjang saja umurnya. Mengenai kapan panennya, menurut Syaykh, besok paginya panen. Panen bisa setelah menanam satu hari, panen oksigen.

Sekarang, Al-Zaytun sudah panen raya. Begitu ada hujan sebentar, hijau royo-royo seperti penganten anyar. Menurut Syaykh, itulah kearifan lokal. Syaykh berprinsip akan terus menanam dan membangun bendungan air. Sebab, menurut Syaykh, pada penghujung abad 15 Hijriah nanti, dunia akan menghadapi krisis air. Karena itu, Al-Zaytun akan membuat bendungan, setiap sepuluh hektare sawah, satu hektare waduk.

Al-Zaytun juga tengah mencoba, di daerah yang irigasi teknisnya tidak bagus itu akan menghasilkan padi satu kali, bawang satu kali, cabe satu kali, dalam penanaman satu musim tanam, satu tahun.

Dijelaskan, kalau padi, dengan pengairan yang bagus, satu tahun bisa mendapat tujuh ton sekali tanam. Jika dikalikan Rp 2.500, hasilnya akan mencapai Rp17.500.000. Kemudian bawang, satu hektare mendapat sepuluh ton. Dengan harga rata-rata enam ribu, sudah enam puluh juta. Kemudian cabe, satu hektare mendapatkan beberapa ton. Karena dalam satu hektarnya mampu tertanam 50 ribu titik tanam, jadi jika satu titik tanam itu misalnya empat ons saja, dikali harga biasa saja, misalnya harga 6 ribu saja seperti Desember 2009 lalu, itu berarti sudah jutaan rupiah.

Dari sistem itu, Al-Zaytun berencana membuat lahan beasiswa dari pertanian. Dimana akan ditetapkan lahan-lahan yang tidak produktif selama ini, diambil oleh sebuah lembaga yang namanya Lembaga Lahan Beasiswa. Untuk itu, akan dibuat bibit yang bagus. Ada bibit jagung yang namanya Basis (singkatan beasiswa), jagung yang bisa menghasilkan tujuh ton pipil. Ada juga bawang dan cabe, Basis juga namanya. Berkaitan dengan itu, dianjurkan agar mahasiswa segera mendaftar. Nanti para pendaftar akan diteliti layak tidaknya mendapatkan beasiswa tersebut.

#### **Anjuran kepada Warga Sekitar**

Sebelumnya, dalam temu ramah mesra dengan warga desa sekitar kampus yang diselenggarakan pada malam hari sebelum puncak perayaan, sebagaimana juga dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya, Syaykh juga menyarankan agar warga giat menanam pohon di lahan masing-masing.

Dalam acara yang diselenggarakan di Masjid Al-Hayat yang dihadiri hampir dua ribu warga serta Camat Gantar Cusamo dan Kapolsek Zainuri, itu Syaykh Al-Zaytun menyampaikan pesan-pesan terkait pentingnya menanam pohon untuk mengurangi dampak pemanasan global. Karena

pohon itu, menurut Syaykh, bisa menahan panas, menahan angin, dan air. Dengan begitu, masyarakat akan merasa sejuk, pemanasan global juga sekaligus bisa diatasi.

Untuk menyegarkan kembali ingatan warga, Syaykh kemudian menceritakan bagaimana kesannya pada tahun 1999 ketika memulai pembangunan Al-Zaytun, dimana lokasi tersebut masih gersang karena susahhanya air. Syaykh mengisahkan, ketika sedang membangun gedung pembelajaran, kulit para pekerja termasuk Syaykh menjadi hitam saking panasnya. Namun, kini dengan telah tumbuhnya pepohonan, lokasi menjadi sejuk dan kulit pun jadi putih kembali.

Kepada warga, Syaykh mengatakan, menurut pengamatannya, pohon yang cocok dengan alam Kecamatan Gantar adalah pohon mangga. Karena itu, Syaykh menyarankan warga menanam pohon mangga. Soal bibit, Syaykh mengatakan tidak usah beli bibit yang sudah dipolibag, tapi tanam saja bijinya. Nanti kalau sudah dua tahun, warga bilang saja ke Al-Zaytun mau dibuat mangga apa pohon tersebut. Dengan ilmu pengetahuan, Syaykh mengatakan, pohon

membuat waduk.

#### Lembaga Pendidikan Terdepan

Seruan penggunaan kearifan lokal untuk menghadapi tantangan alam global itu disampaikan dari kampus Al Zaytun di Desa Gantar, Indramayu, Jawa Barat, pada acara perayaan Tahun Baru Hijriah, 1 Muharam 1431 H, yang bertepatan dengan tanggal 17 Desember 2009 M. Acara itu dihadiri oleh tak kurang dari 20.000 ummat, mulai dari segenap civitas akademik Al-Zaytun, warga sekitar kampus, para wali santri dari berbagai penjuru negeri, beberapa sahabat dari negeri jiran Malaysia, Singapura dan Brunai Darussalam, beberapa tokoh nasional, serta berbagai tamu lainnya yang khusus datang merayakan Tahun Baru Hijriah di kampus ini.

Di antara tokoh yang hadir, ada mantan Menteri Koperasi dan UKM pada Kabinet Reformasi Pembangunan (era Presiden Habibie) Adi Sasono, dan Direktur Pendidikan Kursus dan Kelembagaan Dirjen Pendidikan Non Formal dan Informal (NFI) Depdiknas DR. Wartanto mewakili Kementerian Pendidikan Nasional. Sedangkan dari

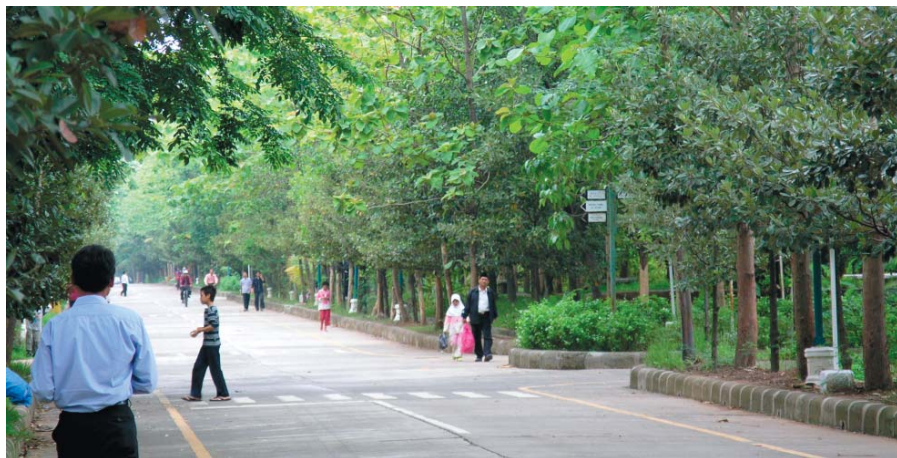
Rahmatan Lil 'Alamin yang berkapasitas 150 ribu jemaah itu, perayaan kali ini pun menorehkan makna dan nilai yang sangat tinggi di hati segenap ummat manusia, khususnya tentang kearifan lokal untuk mengatasi perubahan iklim.

Pada kesempatan itu, tokoh nasional Adi Sasono, juga mengulas panjang lebar tentang tantangan global dan kearifan lokal. Mantan Menteri Koperasi dan UKM pada Kabinet Reformasi Pembangunan itu mengatakan, tatkal dunia sedang mengalami pemanasan global, ternyata Al-Zaytun, hanya dalam sepuluh tahun justru menjadi lebih sejuk berkat penanaman pohon. Karena itu, Adi Sasono menyarankan agar kearifan lokal sebagaimana dicontohkan Al-Zaytun semakin dikembangkan di banyak tempat.

Sementara, Direktur Pendidikan Kursus dan Kelembagaan Dirjen Pendidikan Non Formal dan Informal (NFI) Depdiknas DR. Wartanto berkeyakinan, ke depan Al-Zaytun akan menjadi lembaga pendidikan terdepan yang bisa menjawab tantangan dan bisa menjadi contoh bagi lembaga-lembaga pendidikan yang lain.

Begitu pula Kapolres Indramayu, AKBP Ahsri Wiharto, pada kesempatan yang sama, mengatakan salut dengan tema yang diangkat Al-Zaytun itu. Menurutnya, kata-kata kearifan lokal dalam tema itu sangat bagus. Terkait kepolisian yang disorot masyarakat belakangan ini, dia mengaku bahwa korpsnya sedang giat-giatnya menyosialisasikan kepada seluruh anggota kepolisian soal pemahaman bahwa kepolisian sekarang tidak hanya berfokus pada kepastian hukum, tapi juga pada aspek keadilan dan kemanfaatan hukum. Jadi, itulah mungkin menurutnya, salah satu kaitannya dengan kearifan lokal. Selanjutnya, kepada santri-santri dia berpesan, masa depan Indonesia ada di tangan kita semua, jadi hendaknya kehadiran kita bisa bermanfaat bagi semua.

Sedangkan, Dandim Indramayu, Letkol Hendro Martono mengajak jemaah untuk instrospeksi diri. "Setiap kita melaksanakan tahun baru, yang perlu kita lakukan adalah kita perlu instrospeksi diri. Untuk mengevaluasi sampai sejauh mana kita sebagai umat Islam, sebagai warga masyarakat, bangsa dan negara dalam mengabdikan diri kita kepada bangsa dan negara. Evaluasi perlu karena tantangan ke depan tidak semakin ringan," katanya. Dia mengajak masing-masing pribadi mengevaluasi dirinya. Kekurangan hendaknya diperbaiki sehingga ke depan diharapkan semakin baik, semakin maju, dan semakin bisa menjadi warga yang baik. ■ BI/MARJUKA-HOTSAN



Areal Al-Zaytun seluas 1.200 ha dihubungkan oleh tanaman

mangga tersebut akan bisa dibuat jadi mangga yang harum dan manis. Dan lima tahun kemudian, sudah berbuah.

Dari segi ekonomi, jika penduduk Gantar yang kira-kira 32 ribu orang, misalnya, menanam pohon masing-masing tujuh batang saja, setelah berbuah nanti akan menghasilkan 32 ribu kali tujuh, kemudian dikali Rp.10.000 saja satu batang, berarti akan menghasilkan Rp.244 miliar.

Sebaliknya, jika tidak menanam maka tidak mungkin menuai. Kepada Camat dan Kapolsek, Syaykh berharap untuk membantu gerakan tersebut dengan ikut terlibat aktif menanam pohon. Pada kesempatan itu, Syaykh juga mengatakan, ke depan, Al-Zaytun akan mengajak warga bergotong-royong

jajaran Muspida Kabupaten Indramayu hadir antara lain, Komandan Distrik Militer (Dandim) Letkol Hendro Martono dan Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Indramayu, AKBP Ahsri Wiharto. Dan dari Kecamatan Gantar, hadir Camat Cusamo dan Kapolsek Zainuri.

Tema acara itu adalah "Mari kita hadapi tantangan alam global dengan kearifan lokal." Selaras dengan topik yang sedang dibicarakan oleh para pemimpin negara-negara dunia dalam KTT Perubahan Iklim di Kopenhagen, Denmark 7-18 Desember 2009.

Melalui pesan-pesan dari Syaykh al-Zaytun AS Panji Gumilang dan sambutan para tokoh yang hadir pada acara yang dipusatkan di Masjid



Adi Sasono: *Al-Zaytun* adalah mimpi yang sudah jadi kenyataan

**Adi Sasono**

# Al-Zaytun Laboratorium

**Adi Sasono mengatakan, Al-Zaytun sebagai sebuah mimpi besar yang sudah menjadi kenyataan. Kini, menurut mantan Menteri Koperasi dan UKM pada Kabinet Reformasi Pembangunan, itu Al-Zaytun sudah menjadi contoh terbaik dalam penerapan kearifan lokal dan telah menjadi laboratorium sosial untuk lima hal.**

**A**l-Zaytun sebagai laboratorium sosial, menurut Adi Sasono adalah: Pertama, untuk metode pendidikan; Kedua, untuk pengembangan lingkungan hidup; Ketiga, untuk pengembangan pertanian organik; Keempat, untuk pengembangan (insyaAllah segera) sumber-sumber energi terbarukan. Mulai tahun depan di Al-Zaytun sudah akan mulai dengan eksperimen tenaga surya; Dan yang kelima, mengembangkan pengolahan sumber

daya alam, mengembangkan danau buatan. Kalau hal serupa dikembangkan di banyak tempat, menurutnya, banjir terkendali, lahan pertanian bisa tambah luas. Panen sekali bisa jadi dua kali. Itulah, menurutnya, kunci dari infrastruktur pengolahan sumber alam.

Menurut Adi Sasono,atkala dunia sedang mengalami pemanasan global, ternyata Al-Zaytun, hanya dalam sepuluh tahun justru bisa menjadi lebih sejuk berkat penanaman pohon. Karena itu, Adi Sasono menyarankan

agar kearifan lokal sebagaimana dicontohkan Al-Zaytun semakin dikembangkan di banyak tempat.

Dia menyebut Al-Zaytun merupakan satu model pendidikan yang sangat maju yang dalam waktu singkat bisa mencapai di atas sepuluh ribu anak didik. Kampusnya merupakan eksperimen untuk pengembangan lingkungan sehingga menjadi model tentang kampus hijau. Pengelolaan sumber daya alam juga bisa jadi contoh dengan membuat danau buatan yang bisa meningkatkan hasil pertanian sekaligus mengendalikan banjir.

#### **Kreatif, Trust dan Network**

Dalam persaingan zaman modern, menurut Adi Sasono, yang paling dibutuhkan untuk maju itu ternyata bukan uang. Sekadar contoh, orang yang paling kaya di dunia, yakni Bill Gates, ternyata bukan anaknya orang kaya. Tapi karena kreatif, dia menjadi kaya. Jadi yang pertama dibutuhkan

untuk maju adalah kreatif. Kemudian yang dibutuhkan kedua adalah kejujuran. Seorang pakar ekonomi yang terkenal mengatakan, masyarakat yang baik itu cirinya masyarakat yang bisa dipercaya, *trust*. Yang dibutuhkan berikutnya, atau ketiga adalah jejaring atau *network*.

Jadi, kata Adi, kita harus menjawab tantangan global dengan sikap kreatif. "Jangan terpaksa dengan cara yang biasa, karena itu tidak akan menjawab tantangan yang berubah begitu pesat. Nomor satu, harus berpikir kreatif. Nomor dua memiliki kebersamaan, tidak memilah-milah, ini urusan pemerintah, ini urusan departemen ini, ini urusan polisi, ini urusan tentara. Itu nggak boleh lagi. Tapi kebersamaan, kebersamaan antara pemerintah dengan masyarakat. Kalau kita tidak bersatu, kita kalah. Yang kalah bukan hanya pemerintah, seluruh bangsa akan kalah," ujarnya.

Menurutnya, di negeri ini banyak orang pintar. Misalnya, ketika dia di BPPT, di Ristek, setiap tahun Indonesia mengirim tiga ribuan mahasiswa untuk kuliah di luar negeri mengambil S2, S3, ini cerita tahun 80-90-an. Mahasiswa kita itu, menurutnya, rata-rata nomor satu di perguruan tinggi di luar negeri.

"Jadi bangsa kita bangsa jagoan. Sekarang pun, kalau kita ikut lomba

fisika, matematik, kimia, kita juga juara dunia. Anak-anak kita hebat-hebat, katanya. Tapi, menurut Adi, begitu para doktor itu pulang ke Tanah Air, di sini bingung, nggak jadi apa-apa. Akhirnya kembali lagi ke luar negeri, kerja di sana. Digaji 10 ribu-20 ribu dollar per bulan. Jadi intinya, menurut Adi, bangsa kita bukan bodoh. "Tapi, manajemenlah yang tidak benar. Kenapa? Kita tidak bisa menerima sesama. Kita hidup masing-masing," jelasnya.

Jadi, menurut Adi Sasono, kebersamaan itu merupakan kunci. "Kalau tidak ada kebersamaan, kita akan dijajah kembali oleh bangsa asing. Melihat waktu-waktu yang lalu, kita bisanya bertengkar saja. Antar desa bertengkar, antar polisi dengan tentara juga bertengkar dan lain sebagainya. Sudah miskin, berkelahi lagi," ungkapinya. Menurutnya, ini yang disebut 'ketidakwarasan kolektif'. Sedikit-sedikit, mengeksploitasi pertengkar. Diadu domba antara menteri ini dengan menteri itu, kapan kerjanya kalau begitu?

"Jadi, nomor satu adalah kreatif. Dua, kebersamaan. Ketiga, kita harus memilik akhlak yang baik. Kita tidak boleh menyembah harta benda. Kita harus menegaskan, sikap kita sebagai ummat, untuk melaksanakan ajaran tauhid dalam kehidupan sosial kita. Kita tidak cukup soleh secara individual, kita juga harus soleh secara sosial. Peduli, punya komitmen kebersamaan, tolong-menolong, kasih-mengasihi sebagai bangsa," katanya.

Di negara Pancasila ini, urai Adi

Sasono, kita hidup dalam keragaman. Bangsa kita tidak membeda-bedakan. "Marilah kita sebagai umat Islam memberi contoh, teladan, ummat yang berakhlak mulia, menghormati perbedaan, menyayangi sesama, membuktikan bahwa kita bisa kerja dengan baik, untuk membangun kembali peradaban ke depan bangsa kita. Sebab bangsa kita bangsa yang terhormat," ujar Adi Sasono.

### Mimpi Jadi Kenyataan

Sementara itu, kepada *Berita Indonesia*, Adi Sasono menjelaskan sudah mengenal Al-Zaytun sejak masih rencana, masih sebuah mimpi. Sekarang, katanya, mimpi itu sudah menjadi kenyataan.

Dia berkisah. Sepuluh tahun yang lalu, ketika dia masih di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dia bertemu dengan Syaykh. Ketika itu dia mengaku merasa kagum sekaligus khawatir atas mimpi dan ide Syaykh Panji Gumilang. Dia merasa Syaykh nekad betul dengan mimpi besar. Tapi, saat itu, dia mengaku melihat sorot mata Syaykh, sorot mata orang yang yakin. Itulah, menurutnya, yang membuatnya menjadi yakin.

"Orang ini istimewa. Dan kenyataan memang ya, istimewa," ungkap Adi Sasono. "Mimpi menjadi kenyataan, ditambah dengan, satu tekad. Dan Allah tidak akan merubah nasib kita kecuali kita mengubah nasib kita sendiri," ujarnya mengapresiasi Syaykh al-Zaytun.

Satu yang menarik, menurutnya, pertama adalah Al-Zaytun ini merupakan satu model pendidikan yang sangat maju yang dalam waktu singkat bisa mencapai di atas sepuluh ribu anak didik. Kedua, kampusnya merupakan eksperimen untuk pengembangan lingkungan sehingga menjadi model tentang kampus hijau. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya alam juga bisa jadi contoh dengan membuat danau buatan yang bisa meningkatkan hasil pertanian serta mengendalikan banjir.

Berikutnya yang dia harapkan, dengan eksperimen berbagai tanaman termasuk sorgum, bisa menjadi dasar, di samping sumber tanaman yang lain untuk pengembangan bio energi. "Itu yang saya harapkan bisa dijadikan model. Dan saya harap, Syaykh lebih banyak tukar pikiran dengan Menteri Diknas yang baru, karena kita sedang mencari format pendidikan yang bisa menjawab tantangan zaman," ujarnya.

### Contoh Kearifan Lokal

Tokoh nasional Adi Sasono, juga mengulas panjang lebar tentang

# Sosial



Warga sekitar Al-Zaytun menerima boboko yang dibagikan santri rijal dan nisa dalam perayaan Tahun Baru Hijriah 1 Muharram 1431

**Pemimpin adalah orang yang kata dengan perbuatannya sama. 'Kalau berkata tidak berdosa, kalau diberi amal tidak berkhianat, kalau berjanji menepati, dan kalau berusaha tidak curang'**

tantangan global dan kearifan lokal. Mantan Menteri Koperasi dan UKM pada Kabinet Reformasi Pembangunan itu mengatakan, tatkala dunia sedang mengalami pemanasan global, ternyata Al-Zaytun, hanya dalam sepuluh tahun justru menjadi lebih sejuk berkat penanaman pohon. Karena itu, Adi Sasono menyarankan agar kearifan lokal sebagaimana dicontohkan Al-Zaytun semakin dikembangkan di banyak tempat.

Dia mengatakan, jauh di belahan Nusantara, berlangsung konferensi tingkat tinggi tentang perubahan iklim (KTT Kopenhagen 7-18 Des 2009). Di sana, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono juga hadir mewakili rakyat Indonesia dan menegaskan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi karbon sampai 20 persen.

Adi Sasono yang berbicara sebagai nara sumber dalam acara bertema "Mari kita hadapi tantangan alam global dengan kearifan lokal," pada rangkaian perayaan Tahun Baru Hijriah, 1 Muharam 1431 H, di Kampus Al-Zaytun, menyebutkan, Indonesia adalah salah satu negara yang merupakan paru-paru dunia yang penting karena memiliki hutan tropis yang begitu besar di samping negara Amerika Latin. Tapi sayangnya, sejak beberapa tahun lalu ditebang seluas 1,2 juta hektare tiap tahun.

Namun, di Al-Zaytun kontras, seperti disebutkan Syaykh, dibandingkan dengan tahun 1999, tatkala pohon-pohon sudah tumbuh, temperatur di Al-Zaytun turun dari 41 derajat celcius menjadi 31 derajat celcius saat ini. Hewan yang tadinya tidak ada, kemudian muncul. Hujan pun datang. Dengan ide kreatif membuat danau buatan, pengendalian banjir bisa dilakukan. Semua itu menurut Adi Sasono adalah contoh kearifan lokal.

Melihat karya besar itu, mantan Ketua Partai Merdeka yang begitu kagum pada kearifan tersebut, sehingga menyebut, seandainya Syaykh bisa dikloning, akan dibikin seratus ribu Syaykh di Indonesia.

Berkaitan dengan kepemimpinan dalam memberikan keteladanan itu, pria kelahiran Pekalongan, Jawa Tengah, 66 tahun silam itu mengatakan, hari-hari ini orang sudah bosan dengan pidato. Tidak perlu lagi banyak pidato. Orang ingin teladan. Ciri pemimpin adalah orang yang kata dengan perbuatannya sama.

Dalam defenisi Rasulullah, 'Kalau berkata tidak berdosa, kalau diberi amal tidak berkhianat, kalau berjanji menepati, dan kalau berusaha tidak curang'. Jadi menurutnya, yang diperlukan sekarang adalah teladan.

Kembali terkait dengan pemanasan global, menurutnya, perubahan iklim



Di hadapan ribuan umat yang mengikuti perayaan Tahun Baru Hijriah 1 Muharram 1431 di Al-Zaytun, Adi Sasono menyebut kita harus soleh secara sosial

merupakan sesuatu yang pasti terjadi. Dunia makin panas, ada efek rumah kaca, ozon yang melindungi bumi dari terpaan sinar matahari bolong-bolong. Es di kutub utara dan kutub selatan mencair. Permukaan air laut meninggi. Kalau dibiarkan terus-menerus, dalam waktu beberapa puluh tahun akan banyak pulau-pulau yang tenggelam. Dalam hal ini, Indonesia yang akan paling parah terkena.

Negeri kita, menurut Adi Sasono, diberi Allah tanah yang subur. Namun di sini juga ada sejumlah besar sumber bencana. Kearifan lokal tidak bisa menghindarkan sejumlah jenis bencana itu, tapi bisa mengurangi risikonya. Karena itu, bangsa ini harus berpindah dari paradigma lama, yakni menunggu bencana baru bertindak. Paradigma baru yang disebut mitigasi bencana

Indonesia sendiri memiliki sekitar 350 kabupaten yang rawan bencana. Itu sudah ditetapkan. Tugas kita, menurut Adi Sasono adalah mengembangkan kearifan lokal. Jangan sampai bencana yang secara teoritis tidak bisa dielakkan itu diperburuk lagi oleh perbuatan yang kurang membebaskan bencana tambahan. Misalnya, berupa penebangan pohon yang kemudian menyebabkan banjir atau kebakaran.

Tsunami di Aceh dan Nias korbanannya 200 ribu lebih, lebih dari serapoh adalah rakyat Aceh. Dan pada waktu itu, ada satu pulau, namanya Pulau Simeulue. Korban di pulau itu hanya sedikit, karena di sana ada tradisi, ada kearifan lokal. Kalau waktu surut jangan lari ke laut untuk cari ikan, tapi lari ke gunung. Sementara yang di Banda Aceh, tidak lagi memiliki kearifan itu. Mereka

rata-rata 10 cm per tahun. Yakni kira-kira sebanyak tumbuhnya kuku kita.

Kalau lempengan ini bertubrukan, hasilnya lebih banyak akan jatuh ke bawah. Sehingga menimbulkan penyurutan air laut, yang kemudian timbul lagi yang disebut gelombang tsunami. Jadi, tsunami itu dimulai dengan turunnya air laut, senyap, kemudian muncul gelombang, yang tahun 2004 di Aceh setinggi 30 meter. Muncul dengan kecepatan 350 km per jam. Sehingga kalau kita lari dengan mobil apapun, tidak bisa.

Tsunami Aceh tanggal 26 Desember 2004, kita kenal sebagai peristiwa yang sangat menyedihkan. Yang dalam waktu 5 jam melanda 12 negara di Asia. Untuk Malaysia dan Singapura, ketika itu untung ada Indonesia, ada pulau Sumatera. Kalau tidak dijaga oleh Pulau Sumatera, pusat tsunami yang berada 160 km tenggara Aceh. Tsunami ini akan melanda pantai barat, Malaysia dan Singapura.

Apakah manusia bisa mendeteksi? Ternyata sulit. "Alat yang dari Jepang hanya bisa mengetahui, mengirimkan kabar dan cukup tiga menit. Sehingga kalau sudah terjadi tsunami, kita tidak mungkin selamat, karena kecepatannya yang begitu tinggi," jelas Adi Sasono.

Pada 1883 ketika gunung Krakatau meletus, yang meninggal 35 ribu orang. Dunia waktu itu gelap-gulita selama dua hari karena debu dari Krakatau meliputi seluruh dunia termasuk di Eropa. Menurut teori para geolog, ungkap Adi, setiap ratusan tahun ada bencana yang akan mengulang. "Ini adalah ramalan ilmiah, jadi belum tentu terbukti," katanya. Dari teori itu, nanti akan terjadi sesuatu yang besar yang pusatnya di Sumatera Barat. Perkara inilah, menurut Adi Sasono, yang harus diwaspadai. Jadi, ada hal yang tidak bisa kita elakkan, tapi ada hal yang bisa dielakkan.

Menurut Adi Sasono, tugas kita sekarang, jangan menunggu, tetapi melakukan persiapan pembangunan penanggulangan bencana. Persiapan ini menurutnya ada tiga tahap yakni: Pertama, menyiapkan jalur untuk melarikan diri kalau ada bencana; Kedua, menyiapkan rintangan, karena ada kemungkinan teregulasi, di daerah yang tadi disebut 94 persen yang rawan bencana; Ketiga, menyiapkan yang namanya tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.

Ketiga langkah itu, menurutnya, tidak mungkin dilakukan hanya oleh pemerintah. Sumber daya pemerintah terlalu terbatas. Sementara kekuatan Indonesia justru ada di rakyat atau masyarakat.



Adi Sasono mengakui bahwa Syaykh Al-Zaytun orang yang istimewa

harus dibangun. Harus dilihat mana daerah yang rawan bencana yang bisa diketahui secara ilmiah, dan melakukan persiapan untuk mengurangi risiko kalau terjadi bencana.

Sistem yang selama ini, menurutnya, juga harus berpindah dari yang sentralistik menjadi desentralistik. Disiapkan di tingkat lokal, tidak perlu semuanya ditangani di tingkat pusat. Sama dengan model yang ada di Al-Zaytun, dari 1.200 hektare yang dimiliki, sudah memberikan perubahan yang drastis sekali, dalam waktu hanya sekitar 10 tahun.

Adi mengatakan, sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, Bali, NTT dan Sulawesi, banyak gunung berapi, yang kalau ada pergeseran, akan memunculkan keluarnya magma.

lari ke pantai atau diam saja. Akibatnya tersapu oleh ombak besar tsunami yang kecepatannya 350 km per jam.

Adi Sasono menyatakan, bangsa ini disebut berada pada lintasan *ring of fire* atau cincin api. Di bawah permukaan kita ada lempengan yang berbenturan. Lempengan Eurasia dan lempengan Indopasifik. Bumi kita ini, luarnya ada kerak. Ibarat kulit jeruk, di dalamnya ada zat yang lebih cair atau yang disebut dengan magma yang panas sekali, yakni mencapai 7500 derajat celcius.

Dijelaskan, tahun 1912, peneliti Jerman bernama Alfred Wegener menemukan, sebenarnya kerak itu bukan benda statis yang diam. Tapi, adalah lempengan yang bergeser. Lempengan itu, tebalnya bisa mencapai 80 km. Mereka ini bergerak, berjalan



Syaykh AS Panji Gumilang dan para tamu saat perayaan Tahun Baru Hijriah 1431 di Al-Zaytun

**Melihat kecilnya manusia dibanding kebesaran Allah dengan segala ciptaannya, manusia tidak ada arti apa-apa. Manusia hanya utusan Allah sang Maha Pencipta.**

Ditambahkan, semua persoalan ini terjadi karena memang ada pergeseran di dalam bumi. Ada terbuka lempengan, ada celah yang muncul. Dan itu memunculkan berbagai materi dari perut bumi. Kalau yang di Jawa Timur namanya Lumpur Lapindo. Kalau di Jawa Tengah ada gunung berapi yang menyemburkan larva panas. Itu semua panas, berderetan di dalam bumi.

Adi Sasono jelaskan, sesungguhnya bumi kita ini, bumi yang kecil mungil. Ibarat debu di dalam ruang angkasa. Kemudian, manusia ini, ibarat debu di dalam bumi. Seorang ilmuwan bernama Edwin Hubble, membuat teropong raksasa. Dengan teropongnya, dia menemukan hampar bintang warnanya makin jingga. Artinya, benda di luar angkasa yang bergerak berputar dengan keteraturan yang luar biasa itu menjauh. Karena itu, Hubble menyimpulkan, kalau menjauh, berarti dulu dekat dan menyatu. Sebab dulu langit dan bumi itu menjadi satu, kira-kira 50 miliar tahun yang lalu. Kemudian terjadi letupan yang besar dan menciptakan benda-benda angkasa.

Bumi itu di planet mengelilingi bintang. Bintang itu di tata surya kita dinamakan matahari. Ada sembilan planet. Planet memiliki satelit. Bumi misalnya, dikelilingi oleh satelit bernama bulan. Satelit dari planet Jupiter juga ada. Dan planet yang lain. Satu galaksi yang paling besar, isinya tiga triliun tata surya. Sedangkan yang kecil 200 miliar tata surya. Jadi, kata

Adi, coba bayangkan, bagaimana kita kecilnya. Bumi begitu kecil di galaksi Bima Sakti. Dan galaksi ini juga kecil dalam galaksi yang ada. "Jadi, apa artinya kita? Tidak ada artinya apa-apa. Kita ini hanya utusan Allah sang maha pencipta," kata Adi.

#### **Mencari Mati yang Baik**

Menyadari hal tersebut, Adi Sasono mengaku menjadi berpikir-pikir tentang tujuan hidup. Dia mengatakan, manusia akan mati. Tidak mesti yang tua, yang sudah pensiun seperti dia yang mati lebih dulu dibanding yang lebih muda. Itu urusan Allah. Seperti kiamat juga urusan Allah. Adapun yang meramalkan kiamat sekitar tahun 2012, menurutnya itu jelas salah.

Setelah merenung, dia menyimpulkan, tujuan hidup yang paling strategis adalah mencari mati yang baik.

Sementara mencari mati yang baik, menurutnya adalah dengan mencari hidup yang baik. Jadi kalau tujuan hidup yang baik, harus mencari mati yang lebih baik, dan itu harus dengan cara hidup yang baik. Sementara cara hidup yang baik itu, menurut Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Wali Assalam, sebaiknya adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain.

Jadi menurutnya, kalau bicara masalah bencana alam atau tantangan alam, definisikanlah hidup kita, rumuskanlah hidup kita menjadi orang yang banyak manfaatnya bagi orang lain. "Kecilnya kita di hadapan ciptaan Allah, yang namanya benda-benda langit. Apalagi di hadapan Allah sang maha pencipta, harus menyadarkan kita tentang makna hidup ini, tujuan hidup kita. Pengharusan untuk berbuat baik untuk sesama," ujarnya.

Kemudian, Adi Sasono mengatakan, datangnya gempa susul menyusul, hendaklah itu menjadi peringatan bagi kita semua, apa yang salah dalam pengelolaan kehidupan kita berbangsa dan bernegara, ada yang keliru. Sebab, itu juga merupakan tanda-tanda dari Allah, barangkali kita kurang bersyukur pada Allah. Padahal, kalau kita bersyukur, Allah akan menambah nikmatnya pada kita. Dan kalau kita tidak bersyukur, ajab Allah akan tiba.

Jadi nomor satu, menurut Adi, kita harus menerima, baik sumber daya alam yang melimpah ruah maupun cobaan dan tantangan yang diadakan oleh Allah karena kita berada di kawasan rawan pecahan. "Kita terima dua-duanya sehingga kita bekerja keras mengembangkan jiwa kreatif, mengembangkan ide-ide baru seperti dicontohkan di Al-Zaytun," kata Adi Sasono. ■ BI/MS-BHS



Syaykh AS Panji Gumilang dan Umi Farida Al Widad (tengah) diapit oleh Pdt Paresman Hutahaean dan Pdt DR SM Siahaan serta Pdt Very Siregar dan rombongan HKBP Tebet

# HKBP Tebet Nikmati Damai di Al-Zaytun

**Pendeta Resort HKBP Tebet, Paresman Hutahaean, dan rombongan, sungguh merasa damai saat berkunjung ke Al-Zaytun. Di kampus lembaga pendidikan bersemangat pesantren tetapi bersistem modern itu, mereka menikmati toleransi dan perdamaian hakiki, bukan sekadar formalitas.**

Pengakuan itu diutarakan oleh Pendeta Paresman Hutahaean setelah mengunjungi Al-Zaytun, Indramayu, Rabu, 3 Februari 2009. Setelah melihat Al-Zaytun secara langsung, Pendeta Resort Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Tebet, Jakarta,

itu mengaku sangat terkesan dengan Al-Zaytun. Dengan melihat Al-Zaytun, dia mengaku jadi merasa damai, menikmati damai. Karena, selama jadi pendeta di pulau Jawa, dia sebelumnya selalu merasa takut dan kuatir.

Dia sebelumnya selalu ragu jika hendak menjumpai umat muslim,

karena menurut perasaannya, selama ini beberapa umat muslim sering kali menunjukkan ketidaksukaan pada umat Kristen. "Apalagi kalau diketahuinya kita itu seorang pendeta. Tampaknya mereka kurang segar kalau ketemu dengan kita," katanya.

Pendeta Hutahaean yang selama lebih enam tahun sebelumnya melayani di HKBP Rawamangun, Jakarta Timur, kepada *Berita Indonesia* mengaku dengan sambutan persaudaraan yang diterimanya di Al-Zaytun, dia menikmati damai sejahtera. Sekaligus membangkitkan keyakinan dalam dirinya bahwa masih banyak umat Muslim yang mencintai umat Kristen di negeri ini, masih ada orang-orang yang

## Reportase Kunjungan HKBP Tebet ke Al-Zaytun (1)



Syaykh Al-Zaytun dan Umi Farida Al Widad saat diulosi

**Semoga ada Al-Zaytun-Al-Zaytun yang lain di berbagai tempat di negeri ini. Untuk bisa menyatukan kita di negara ini. Untuk bisa sama-sama hidup dan sama-sama bersukacita di negara ini**

bisa saling mengerti dan memahami dalam semangat toleransi yang jujur dan ikhlas. "Dengan ini, mudah-mudahanlah ada bibit-bibit yang baik untuk terang di kemudian hari," harapnya.

Pendeta Hutahaean menyatakan bahwa Pesantren Al-Zaytun ternyata sangat bersahabat. Jauh dari apa yang ada dalam bayangannya sebelumnya, yakni sebuah nuansa pesantren biasa dengan sarungnya, serban, celana yang setengah tanggung, jambang panjang dan sebagainya.

Keramahtamahan para eksponen Al-Zaytun sendiri, menurut Hutahaean, sangat luar biasa. "Saya pikir orang Kristen saja banyak yang tidak begitu ramah. Di sini, naik tangga saja kita dibimbing, turun tangga pun kita dikasih tahu," katanya.

Setelah mengunjungi Al-Zaytun, Hutahaean meyakini telah mendapat bibit-bibit persaudaraan dan persahabatan hakiki. "Mungkin inilah bibit-bibit persaudaraan yang tidak bisa dilupakan. Umur saya sekarang sudah 63 tahun. Ya mungkin, di umur saya yang saat ini, saya melihat ada bibit-bibit yang indah di negara kita ini. Semoga ada Al-Zaytun-Al-Zaytun yang lain di berbagai tempat di negeri ini. Untuk bisa menyatukan kita di negara ini. Untuk bisa sama-sama hidup dan sama-sama bersukacita di negara ini," katanya.

Pada saat bertemu dengan Syaykh al-Zaytun AS Panji Gumilang, pendeta Resort HKBP Tebet ini mengungkapkan

rasa haru saat mendapat ucapan selamat Hari Natal dari Al-Zaytun pada tanggal 23 Desember 2009 lalu. Ketika mendapat kartu Natal tersebut, dia mengaku sangat terkejut dan haru, karena baru sekali itu menerima ucapan selamat Natal dari sebuah pesantren.

Mendapat ucapan selamat demikian istimewa, lalu pada kebaktian malam Natal tanggal 24 Desember 2009, dia pun membacakan ucapan selamat Natal itu dari podium. "Waktu saya berkhotbah pada malam Natal yang dihadiri sangat banyak jemaat, saya baca langsung kartu ucapan selamat Natal itu dari atas mimbar, karena hal itu ditujukan untuk semua umat Kristen," akunya.

Dengan ucapan Natal itu, dia mengaku hatinya sangat bersuka cita. "Karena selama ini, mulai dari tahun 2004, kalau saya tidak lupa, pada malam Natal itu sering kali kami was-was, jantungan. Apa nanti yang akan terjadi?" ungkapinya.

Dengan kedatangan kartu Natal itu, perayaan Natal 2009 itu pun, sungguh dirasakannya berbeda dengan perayaan tahun-tahun sebelumnya. Dia mengaku hatinya begitu damai. Sebab, pada tahun-tahun sebelumnya, dia dan umat Kristen lainnya kadang dibayang-bayangi rasa takut akan adanya teror bom dan lainnya.

"Pada tahun 2005, misalnya, ada selebaran gelap yang menyebut Natal berdarah. "Kami merasa terancam semua. Tapi Natal 2009 ini, kok lain. Ada datang ucapan selamat Natal dari pimpinan pesantren. Itu sangat luar biasa bagi saya sendiri. Dan di hati saya, ada damai saat itu," kata Hutahaean jujur.

Menikmati buah dari toleransi yang ditanamkan Al-Zaytun itu, Pendeta Hutahaean pun sangat mengharapkan adanya Al-Zaytun-Al-Zaytun yang lain lagi di berbagai tempat. "Itulah, kami sangat bergembira. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, apakah ada Zaytun-Zaytun di tempat lain. Apakah cuma di sini saja. Karena kami sangat merindukan untuk hidup rukun bertetangga. Baik rumah, gereja, masjid dan sebagainya. Kami sangat merindukan. Itulah yang sangat kami (orang-orang Kristen) rindukan sebenarnya. Karena sampai saat ini kami seolah-olah was-was di negara ini. Apakah kami warga negara kelas dua? Itu yang sering kami renungkan," ungkapnya saat menyampaikan ucapan terimakasih atas sambutan Syaykh Panji Gumilang bersama eksponen Al-Zaytun lainnya.

Ditanya tentang pandangannya tentang toleransi beragama di Indonesia

ke depan pasca kunjungannya ke Al-Zaytun, Pendeta Hutahaean mengatakan paling tidak sudah tumbuh pengharapan. Melihat banyaknya pelajar Al-Zaytun, Pendeta Hutahaean yakin setelah pendidikan mereka selesai, mereka akan tersebar ke seluruh Indonesia. Mereka pun akan berbicara (memberi contoh) nilai-nilai toleransi di lingkungannya masing-masing. "Ada sepuluh ribu siswanya sekarang, selesai kuliah, mereka ini, saya yakin akan menyebarkan bibit-bibit perdamaian dan toleransi," katanya.

Hutahaean sendiri berjanji akan terus mengkhotbahkan (memberitakan) ini kepada jemaatnya. Jadi menurutnya, pasti ada pengharapan yang lebih baik.

Mengenai pendidikan di Al-Zaytun, Hutahaean juga berpendapat model dan program pendidikan Al-Zaytun itu luar biasa, termasuk kelengkapannya.

"Memang sudah matang perencanaannya. Karena, semua sudah lengkap, semua kebutuhan siswanya disiapkan. Sampai-sampai cuci kain sudah pakai alat elektronik termodern. Waduh, luar biasa itu. Saya pikir HKBP masih jauh, belum bisa bikin begitu," ungkapannya jujur.

Pendeta Paresman Hutahaean sebagai

Pendeta Resort HKBP Tebet, berkunjung ke Al-Zaytun, Rabu 3 Februari 2010, bersama rombongan yakni Pendeta Tumbuh Very Siregar, STH sebagai pendeta huria (gembala sidang) HKBP Tebet, Sintua O. Hutabarat, Sintua Kastina Simarmata boru Damanik, Sintua Sukartini Tri Rahayu Marpaung boru Matondang, Ny. Nely Hutasoit boru Siregar, Ny. Dahlia Silitonga boru Tobing, Ny. Pita Uli Hutabarat boru Tobing, serta didampingi Pendeta Dr. Sountilon M. Siahaan, mantan Sekjen HKBP dan Rektor STT HKBP Nommensen, yang saat ini menjadi anggota jemaat HKBP Tebet. Pendeta Dr. Sountilon M. Siahaan, dalam enam bulan terakhir aktif mengajar Bahasa Ibrani di Al-Zaytun.

#### Kado yang Indah

Setelah menerima kado yang indah dari Al-Zaytun berupa kartu Natal pada Natal 2009 lalu, juga sambutan hangat penuh damai dan kebersamaan. Dalam kunjungannya ke Al-Zaytun, rombongan HKBP Tebet juga memberikan kado sederhana namun cukup bermakna, yakni ulos dan persembahan nyanyian.

Rombongan dari gereja etnis Batak ini menyerahkan *ulos* tanda kasih dan

penghormatan dari pendeta dan majelis HKBP Tebet kepada Syaykh Al-Zaytun AS Panji Gumilang dan umi Farida Al-Widad. "Kami tidak membawa apa-apa. Kami datang ke sini hanya dengan sukacita. Tapi walaupun demikian, ada penghormatan menurut budaya Batak. Kami sampaikan ulos sebagai simbol (tanda) kasih, penghargaan dan pengharapan kami kepada bapak dan ibu," kata Pendeta Hutahaean.

"Ini adalah penghormatan adat tertinggi bagi orang Batak, tanda kasih. Semoga panjang umur. Tuhan yang melindungi. Dengan ulos ini kami mengatakan, kami cinta dengan pesantren ini. Semua dengan pengasuh-pengasuh yang ada di sini. Apalagi dengan Bapak sebagai pemimpin bersama Ibu. Semoga Tuhan melindungi, panjang umur Bapak dan Ibu, juga dengan semua saudara-saudara kami yang ada di sini," kata Pendeta Hutahaean seraya *menguloskan* ulos tersebut kepada Syaykh Panji Gumilang dan Ibu. Ulos itu bertuliskan 'Semoga Persaudaraan Kita Dikekalkan oleh Allah Menuju Indonesia yang Penuh Toleransi dan Perdamaian. Puji Tuhan'.

Kemudian, empat orang ibu yang ikut dalam rombongan HKBP Tebet tersebut juga mempersembahkan nyanyian ucapan syukur kepada Sang Khalik. "Jadi, kami mau berbicara semua, tapi dengan satu bicaranya, dengan nyanyian. Kita mengucapkan syukur boleh sampai ke tempat ini dengan selamat dan boleh bersukacita melihat semua apa yang terjadi di tengah-tengah tempat ini. Kami akan menyanyikan Syukur pada-Mu ya Tuhan," kata Ibu boru Tobing mengawali nyanyian mereka.

*Syukur pada-Mu ya Allah atas segala rahmat-Mu.*

*Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh*

*Syukur atas pekerjaan walau tubuhpun lemah*

*Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman.*

*Syukur pada keluarga penuh kasih yang mesra.*

*Syukur atas perlindungan yang memberi sejahtera*

*Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal*

*Syukur atas pengharapan kini dan selamanya.*

Demikian syair lagu yang dinyanyikan ibu-ibu tersebut yang disambut meriah oleh seluruh hadirin.

**(Bersambung Seri Kedua :  
Syaykh Pemimpin yang Dipilih  
Tuhan) BI/Marjuka-Hotsan**



Ramah tamah rombongan HKBP Tebet dengan Syaykh Al-Zaytun serta eksponen lainnya di restoran Al-Islah Al-Zaytun

# Cara Al-Zaytun Berdayak



Ibu-ibu pekerja dari Brebes sedang menanam bawang merah

**Sejak awal berdiri, Al-Zaytun senantiasa berupaya memberdayakan masyarakat sekitar dan luar untuk terlibat dalam berbagai kegiatan. Mulai dari memasok material bahan bangunan dan bahan pangan sampai mengelola lahan pertanian.**

**S**ebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan berbasis ajaran Ilahi, pesantren merupakan “Menara Air” yang mampu memberikan kesejukan dan kehidupan, “Menara Api” yang mampu memberikan penerangan dan pencerahan, serta “Menara Gading” yang mampu menjadi kebanggaan dan simbol keagungan bagi masyarakat sekitarnya.

Sejarah mencatat, kehadiran pesantren selalu membawa berkah bagi masyarakat sekitarnya. Pola hubungan yang tercipta antara pesantren dengan masyarakat sekitarnya biasanya terjalin erat, saling mengisi dan menerima laksana air dan ikan. Dalam hal ini, pesantren yang notabene merupakan pusat pengembangan ilmu pengetahuan, ibarat air yang jernih, bersih dan menghidupkan, sedangkan masyarakat adalah ikan yang memperoleh kehidupan dan beragam manfaat lain dari keberadaan

pesantren tersebut.

Pola hubungan laksana “air dan ikan” ini pula yang selama ini dipraktikkan oleh Al-Zaytun. Sejak awal didirikan, Al-Zaytun senantiasa merangkul masyarakat sekitarnya untuk terlibat langsung dalam berbagai kegiatan mulai dari menjadi supplier material bahan bangunan, bahan pangan bahkan mengelola lahan-lahan pertanian milik Al-Zaytun. Untuk yang terakhir kali disebut, dilakukan dalam berbagai skema, dari mulai sistem sewa lahan, bagi hasil, hingga melibatkan masyarakat sebagai pekerja lepas harian maupun borongan pada lahan-lahan pertanian milik Al-Zaytun.

Masyarakat juga menyambut baik kesempatan yang diberikan Al-Zaytun tersebut. Alhasil, selain memiliki karyawan tetap yang mencapai dua ribu orang, saat ini YPI-Al-Zaytun juga mempekerjakan ratusan orang yang berasal dari masyarakat sekitar kampus. Mereka berasal dari desa-

desa di sekitar Al-Zaytun, seperti Mekar Jaya, Gantar, Tanjungkerta, Situraja dan lain-lain. Tetapi, selain dari lingkungan Kabupaten Indramayu, ada juga yang datang dari daerah yang agak jauh seperti Brebes, Jawa Tengah. Para tenaga kerja dari Brebes tersebut biasanya adalah tenaga-tenaga profesional yang khusus didatangkan untuk mengelola tanaman bawang merah.

Keberadaan para pekerja luar - istilah bagi para pekerja selain karyawan tetap - dikoordinir oleh Kelompok Tani Terpadu (KTT) I yang dipimpin langsung oleh Syaykh Al-Zaytun AS Panji Gumilang. Karena itu, para pekerja luar tersebut statusnya adalah pekerja KTT I dan khusus bekerja pada lahan-lahan yang dikelola KTT I. Dengan demikian, segala hal yang berkenaan dengan pembayaran gaji, pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan lain sebagainya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab KTT I. Karena harus tinggal di dalam kampus, kepada mereka juga disiapkan mess khusus yang terpisah dari mess karyawan tetap.

Untuk memudahkan koordinasi dan pembagian kerja, para pekerja luar ini dibagi dalam beberapa kelompok, meliputi: Kelompok Gantar yang

# kan Rakyat

dipimpin Ibu Tonih dengan anggota berjumlah 65 orang; kelompok Rancanganggang yang dipimpin Bapak Warsad dengan anggota berjumlah 70 orang; serta kelompok Brebes dengan anggota berjumlah 60 orang.

Pembagian tugasnya sebagai berikut: Kelompok Gantar dan Rancanganggang bertugas menangani tanaman pangan seperti padi, kedelai, cabai, jagung dan sorgum; Sedangkan Kelompok Brebes khusus bertugas menangani tanaman bawang merah.

Kelompok Brebes, selanjutnya masih dibagi lagi menjadi tiga grup, masing-masing berkekuatan sekitar 20 orang. Grup 1 dipimpin Pak Marto yang saat ini (Februari 2010) mengelola lahan seluas 4,5 bahu (1 bahu = 7000 m<sup>2</sup>), grup 2 dipimpin Pak Wirjo yang mengelola 3,5 bahu, dan grup 3 dipimpin Pak Salim yang mengelola 3,5 bahu. Namun, berbeda dengan pengelolaan tanaman lain yang biasanya menggunakan sistem kerja lepas atau harian, untuk tanaman bawang merah ini digunakan sistem borongan. Nilainya 15 juta rupiah per bahu untuk satu musim tanam dari mulai persiapan lahan sampai panen.

## Cari Kesadaran dan Pengalaman

Meski dari segi besaran upah dan lainnya tidak ada keistimewaan bekerja di lahan Al-Zaytun dibanding dengan di tempat lain, banyak pekerja luar itu merasa senang dapat ikut bekerja dan mengelola lahan pertanian milik Al-Zaytun. Karena menurut mereka, selain dapat melihat kampus Al-Zaytun dari dekat, mereka juga dapat berkenalan dengan civitas Al-Zaytun, serta mengetahui berbagai peraturan yang berlaku di Al-Zaytun. Hal-hal tersebut

menurut mereka merupakan pengalaman berharga yang tidak akan ditemui di tempat lain.

Wirjo misalnya, pria paruh baya asal Dukuh Sekartoja, Kelurahan Pamuliaan, Kecamatan Larangan, Brebes, mengaku dirinya cukup senang bekerja di Al-Zaytun karena selain berharap bisa mendapat penghasilan yang lumayan, ia menganggap keikutsertaannya bekerja di Al-Zaytun sebagai bagian dari upayanya mencari kesadaran dan perbaikan diri. Mencari kesadaran yang dimaksudkannya di sini mungkin adalah kesadaran untuk hidup bersosialisasi dan tidak merokok. Karena di Al-Zaytun memang disarankan untuk hidup bersosialisasi dengan baik, dan disarankan untuk tidak merokok.

Apalagi, kini usia Pak Wirjo yang sudah menginjak kepala lima dan dari keenam anaknya tinggal dua orang saja yang masih bersekolah yakni, si bungsu yang duduk di kelas VI serta kakaknya yang duduk di kelas IX, selebihnya sudah bekerja dan berkeluarga. "Ya, saya mah di sini bisa dikatakan sambil mencari kesadaranlah, supaya tahu pengalaman di sini," ujarnya.

Alasan lain yang membuat Wirjo, Ketua Grup 2 Brebes, ini betah tinggal di Al-Zaytun adalah karena pekerjaan yang selalu ada, khususnya di musim hujan. Maklum, di daerah asalnya, saat musim hujan, pekerjaan justru cukup sulit didapat, karena sawah yang ada biasanya ditanami padi semuanya, sehingga tinggal menunggu panen saja. Pekerjaan baru kembali banyak lagi pada musim kemarau, setelah sawah-sawah dialihfungsikan menjadi lahan bawang. Meski demikian, menurut Wirjo, hal itu tidak banyak berpengaruh

pada dirinya. Ia tetap saja hanya bisa menjadi buruh kasar karena dia sendiri tidak memiliki lahan walau sepetak pun. Sedangkan untuk menyewa, harganya juga, menurutnya, tidak terjangkau karena cukup mahal yakni, mencapai 10 juta per bahu untuk sewa selama satu tahun.

"Kalau masalah kerja, ya senang nggak senang, namanya juga sedang *mburuh*. Tapi saya cukup senang karena di sini makan sudah ditanggung. Paling-paling yang agak berat, di sini dilarang merokok. Jadi kalau kita ingin merokok, ya harus beli sendiri ke luar," ungkapnya. Selanjutnya, menurutnya, dia juga akan melihat hasil pekerjaan mereka nanti, karena mereka memang mencari omset. Jadi, menurutnya, kalau omsetnya bagus mereka akan jalan terus, tapi kalau tidak bagus, dia mungkin berhenti.

Senada dengan Wirjo, Marto dan Salim yang sama-sama berasal dari Brebes juga mengaku merasa senang bisa bekerja di Al-Zaytun. Menurut Marto, Ketua Grup 1 Brebes yang sudah tiga tahun bekerja di lahan Al-Zaytun, dirinya senang bekerja di Al-Zaytun, sebab pembayarannya lancar dan makan juga semuanya sudah ditanggung penuh.

"Kalau masalah penghasilan sih mungkin lebih baik di kampung (Brebes). Tapi namanya juga di kampung sendiri, walaupun penghasilannya besar pengeluarannya juga besar. Kalau di sini ada pemasukan, bisa ditabung. Nanti selesai nanam, bayarannya baru keluar. Jadi di sini uangnya bisa kumpul," katanya. Jadi, bekerja di lahan Al-Zaytun, menurutnya, sip-sip saja, tidak ada masalah.



Pak Marto, ketua grup 1 Brebes



Pak Salim, ketua grup 3 Brebes



Pak Wirjo, ketua grup 2 Brebes



Ibu Tonih, ketua kelompok Gantar



Syaykh Al-Zaytun memeriksa pembuatan saung KTT I

**Menganggap  
keikutsertaannya  
bekerja di Al-  
Zaytun sebagai  
bagian dari  
upaya mencari  
kesadaran dan  
perbaikan diri.**

Karena jauh dari mana-mana, uang hasil jerih payahnya selama bekerja di Al-Zaytun dapat ia tabung. Paling-paling kalau ada pengeluaran hanya buat beli rokok saja, itu pun jumlahnya tak seberapa. Berbeda sekali kalau ia tinggal di Brebes, meski penghasilannya yang didapat bisa lebih besar tetapi pengeluarannya juga jauh lebih besar, sehingga akhirnya habis-habis juga. "Namanya juga di kampung sendiri, walaupun penghasilannya besar pengeluarannya juga besar," ujar pemuda lajang asal Dukuh Angon, Kelurahan kembanghari, Kecamatan Ketanggungan, Brebes itu.

Salim, Ketua Grup 3 Brebes yang sudah kedua kalinya ikut borong

mengerjakan tanam bawang di Al-Zaytun yakni, dari bulan November 2009 sampai bulan Januari 2010, dan dari bulan Februari sampai bulan April 2010, mengaku karena borongan, kerjanya jadi agak lebih mending. "Yang namanya orang kerja nggak ada yang enak. Tapi karena borongan, ya agak mending, anak-anak kerjanya bisa mantap. Terus jika berangkatnya, misalnya, agak telat, juga nggak apa-apa. Kalau harian, kalau bel sudah bunyi 'kan nggak enak," katanya.

Kalau masalah pekerjaan, dia mengatakan ada senang dan tidaknya. Misalnya, jika menarget setengah bulan pekerjaan harus kelar tapi karena ada hujan, pekerjaan jadi tidak kelar. Jadi ngulur hari. Karena borongan, maka kalau dihitung harian bisa dikatakan jadi rugi. Sementara untuk makan, sudah ditanggung. Tapi kalau ingin lebih enak, biasanya mereka urunan bikin bumbu sendiri atau masak-masak sendiri.

Bagi Salim, bekerja di Al-Zaytun ini hanyalah untuk selingan pada musim hujan, karena di Brebes belum musim menanam bawang merah. Nanti kalau musim menanam bawang merah sudah tiba, ia rencananya akan kembali lagi ke Brebes untuk menanam bawang merah, karena Salim sebenarnya memiliki sawah meski hanya seperempat hektare. "Ya, nanti kalau sudah musim bawang ya pulang ke Brebes, di sini mah hanya untuk selingan aja pak, sambil mencari pengalaman," ujarnya.

Ibu Tonih, Ketua Kelompok Gantar yang sudah dua tahun ikut bekerja di Al-Zaytun, dan biasanya mengerjakan nandur, menanam kedelai, jagung, sorgum, ngoret dan lain-lain, juga mengaku senang bisa kerja di Al-Zaytun,



Ibu-ibu pekerja dari kelompok Gantar tengah ngoyos (membersihkan rumput) di salah satu lahan padi milik KTT I yang berada di barat masjid Rahmatan Lil 'Alamin



Salim (kaus hitam) dan anggota grup 2 Brebes lainnya menyiapkan bibit bawang merah yang akan ditanam

bahkan berharap pekerjaan terus ada dan mereka pun terus dilibatkan. Dia dan temannya siap jika dibutuhkan borongan maupun harian. Yang penting bayarannya gampang. Dengan demikian, dia mengaku kerjanya juga akan semangat. "Tapi kalau boleh milih sih enakan borongan, meskipun harus bawa bekal makan sendiri tapi kita kerjanya bisa lebih semangat, selesainya lebih cepat dapat uangnya juga lebih cepat," katanya.

#### Larangan Merokok

Meski secara umum merasa senang, para pekerja luar ini mengaku agak sedikit berat dengan larangan merokok yang berlaku di Al-Zaytun. Menurut Wirjo, untuk yang satu itu mereka belum bisa meninggalkan secara total, paling-paling hanya mengurangi sedikit misalnya dari yang biasanya satu bungkus menjadi setengah bungkus sehari. Untungnya, menurut Wirjo, Syaykh Al-Zaytun sendiri masih

memberikan toleransi. Meski demikian mereka tidak lantas seenaknya saja menghisap rokok di sembarang tempat. Bagaimanapun juga mereka sangat menghormati peraturan itu dan hanya berani merokok di tempat-tempat tertentu saja seperti di mess atau di tengah-tengah sawah yang jauh dari aktivitas pelajar.

"Yang agak berat disini dilarang merokok, jadi kalau kita ingin merokok ya harus beli sendiri ke luar. Tetapi sampai saat ini sih walaupun Syaykh tahu, belum pernah negur kita. Cuma anak-anak ya saling menghargai, kalau ada Syaykh nggak berani atau ngumpet. Terus kalau di dekat gedung-gedung kita juga tidak berani merokok. Jadi menaati peraturan sini," ujar Wirjo.

Lain lagi, menurut Marto, selain rokok, hal lain yang terasa berat adalah lingkungan di Al-Zaytun yang berbeda dengan lingkungan kampung halamannya. Maklum, sebagai seorang pemuda lajang Marto biasa menghabiskan waktu berkumpul dan mencari hiburan bersama kawan-kawannya. Sedangkan di Al-Zaytun, ia tidak bisa leluasa pergi ke mana-mana, selain masih belum familiar dengan lingkungan mess tempat ia dan kawan-kawannya tinggal, juga jauh dari mana-mana. Meski demikian, Wirjo maupun Marto sadar betul keberadaannya di Al-Zaytun adalah untuk bekerja. Jadi, meski tidak persis seperti di kampung halamannya mereka mengaku senang dan enjoy saja. ■ BI/AZ



Grup 1 Brebes sedang melakukan perawatan tanaman bawang merah di lahan KTT I



## Dana Raib via ATM

**Industri perbankan nasional harus segera mengganti kartu debit dari berbasis pita magnetik ke kartu chip untuk mencegah pembobolan ATM yang marak belakangan ini.**

**R**angkaian pembobolan bank papan atas lewat ATM yang terjadi secara bersamaan di Jakarta, Kalimantan Barat, Jawa Timur, dan Bali pada awal tahun ini patut mendapat perhatian yang serius dan kontinu. Sebab, hingga kini kepolisian masih menerima dua ratus lebih laporan dari masyarakat yang dana dalam rekeningnya raib dibobol.

Pihak kepolisian pun masih terus melakukan pengejaran terhadap pelaku pembobolan. Sejauh ini polisi berhasil meringkus 39 orang yang sudah dijadikan tersangka dan 5 orang lagi masih buron. Pembobolan ATM dengan modus *skimmer* ini, oleh para pengamat diduga melibatkan orang dalam. Terlebih setelah polisi menangkap pegawai Bank Danamon dan BCA di Bandung.

Para pelaku cenderung membobol nasabah yang memiliki simpanan dalam jumlah besar. Seperti diketahui enam bank nasional menjadi sasaran yaitu Bank BCA, BRI, BNI, Mandiri, Permata, dan BII. Bank-bank tersebut bisa dijebol menyebabkan kerugian sementara Rp 6 miliar (berdasarkan laporan Polri, 26 Januari 2010).

Kasus pembobolan bank lewat ATM ini mencuat berawal dari laporan nasabah Bank BCA Bali ke kepolisian setempat pada pertengahan Januari lalu. Kepolisian menerima sejumlah laporan dari warga yang mengaku menjadi korban pembobolan rekening bank. Dari pengakuan nasabah, mereka tidak pernah melakukan transaksi sebelumnya.

Dari sejumlah transaksi yang dilakukan, mereka sendiri merasa aneh sebab lokasi penarikan yang dilakukan para pembobol tidak pernah dikunjungi nasabah sebelumnya. Penarikan-penarikannya pun dilakukan dalam jumlah yang bervariasi mulai dari Rp8 juta hingga Rp140 juta lebih. Hal ini tidak hanya dialami warga lokal, warga asing yang datang dari Amerika Serikat, Spanyol, Rusia, dan Belanda yang tinggal di Indonesia juga menjadi incaran pelaku.

Di antara beberapa bank nasional ini, nasabah BCA merupakan korban pelaku yang paling banyak. Sekitar 200 lebih nasabah di berbagai tempat dengan kerugian Rp 5 miliar. Sedangkan BNI diperkirakan mengalami kerugian sekitar Rp 200 juta, BRI dengan kerugian sekitar Rp 48,5 juta. Menanggapi kasus pembobolan bank lewat ATM ini, pihak manajemen BCA langsung mengambil tindakan untuk menyelesaikan persoalan. Kerugian yang dialami oleh para nasabah menjadi tanggung jawab perusahaan. Sembilan puluh persen kerugian nasabah telah diganti perseroan.

Sebenarnya bagaimana cara para pelaku bisa memuluskan aksinya menggondol uang para nasabah tersebut? Ternyata mereka melakukannya dengan cara menggandakan kartu ATM dengan lebih dulu memasang *skimmer* di mesin ATM dan di *electronic data capture* (EDC) seperti yang banyak dijumpai di kasir-kasir. Pelaku juga mengintip *personal identification number* (PIN) pengguna dengan kamera tersembunyi yang ditempatkan

tidak jauh dari mesin ATM atau EDC, biasanya ditempatkan pada kotak surat. Setelah mengetahui nomor PIN dan salinan data *magnetic* dari kartu ATM milik nasabah (di-*skimming*), pelaku kemudian menggandakan kartu ATM lalu menarik sejumlah uang dengan PIN tersebut.

Sebenarnya, metode pembobolan ATM sudah terjadi di mancanegara terutama yang mempergunakan mata uang dolar atau euro. Pakar telematika Roy Suryo, berkeyakinan bahwa pelaku pembobol ATM adalah mafia internasional tapi pelakunya orang Indonesia. Dugaan itupun semakin kuat sebab uang salah satu nasabah berkebangsaan Swedia yang sedang tinggal di Indonesia, raib entah ke mana. Padahal setelah dilakukan konfirmasi dengan pihak bank, diketahui ada transaksi internasional di Bulgaria, Eropa Timur. Tak hanya itu, penarikan juga dilakukan dari Toronto, Kanada. Dan yang paling besar, di Australia dimana pembobolan dilakukan 90 persen dari total dana yang ada.

Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Edward Aritonang mengungkapkan, PIN nasabah pelbagai bank di Indonesia ternyata diperjualbelikan oleh sindikat pembobol rekening via ATM sejak 2008. Setidaknya ada 264.000 PIN nasabah bank-bank di Indonesia yang ditemukan dalam *database* sindikat pembobol rekening via ATM. PIN tersebut diperjualbelikan kepada pihak ketiga dengan harga Rp1.000.000 tiap satu rekening. Pelakunya memang masih warga negara Indonesia, tapi ia tidak menepis ada keterkaitannya dengan jaringan internasional.

Mengingat para pelaku kejahatan perbankan juga selalu mengikuti perkembangan teknologi ATM, para praktisi perbankan sepatutnya mengimplementasikan teknologi chip yang lebih aman menggantikan pita magnetik konvensional, seperti yang sudah diterapkan pada kartu kredit untuk menjamin kenyamanan para nasabah. Tahun ini, PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Bank Permata Tbk, dan PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) sudah menyatakan kesiapannya sebagai *pilot project* dalam penggantian kartu debit dari berbasis pita magnetik ke kartu chip.

Selain itu, para nasabah juga diharapkan berhati-hati dan selalu teliti saat melakukan transaksi via ATM. Nasabah diharapkan senantiasa memperhatikan keadaan sekitar dan memastikan tidak ada benda-benda lain yang mencurigakan yang menempel pada mesin ATM. Nasabah jangan memberi tahu nomor PIN kepada orang lain dan lakukanlah pergantian nomor PIN secara berkala tanpa diketahui siapapun. ■ **BS, LOR**

## BJ Habibie Terima Gelar Doktor Kehormatan dari UI

Prof. Dr. Ing. BJ Habibie tak pernah berhenti menjadi berita. Setelah menyandang sederet gelar, kini ia dianugerahi gelar doktor kehormatan dari Universitas Indonesia akhir Januari lalu. Mantan Presiden RI ketiga ini dianggap berperan dalam memajukan teknologi Indonesia. Rektor UI, Gumilar Rusliwa Somantri yang menyerahkan penghargaan itu secara langsung menyebutkan bahwa Habibie bukan sekadar teknolog, melainkan seorang pemikir atau bahkan filsuf



teknologi Indonesia yang telah mengikutsertakan berbagai pertimbangan filosofis penting dalam merefleksikan peranan teknologi dan peranan manusia sebagai pengendali dalam konteks budaya. Pria bernama lengkap Bacharuddin Jusuf Habibie ini adalah sosok ilmuwan atau teknokrat kreatif dan inovatif. Di samping itu, pidato dan ceramah-ceramah ilmiah Habibie juga sangat menarik minat besar terhadap aspek kemasyarakatan dan aspek etis dari teknologi.

## Boediono Ternyata Romantis

Selama ini Wakil Presiden Boediono dikenal sebagai sosok yang kalem dan serius. Rupanya ada sisi lain dari Boediono yang bisa membuat iri kaum ibu yang suaminya kaku. Demi memberi kejutan kecil untuk merayakan ulang tahun isterinya, Boediono rela meninggalkan kesibukannya. Setelah mengikuti rapat dengan Dirut Pertamina Karen Agustiawan dan Ketua UKP3R Kuntoro Mangkusubroto (15/2), Boediono pulang dengan alasan makan siang di rumah dinas di Jalan Diponegoro, Menteng. Saat itu isterinya, Ny Herawati sedang tidak ada di rumah karena sedang mengikuti acara ibu negara di kompleks istana kepresidenan. Begitu tiba di halaman rumah, mobil dan pengawalannya diperintahkan 'bersembunyi' di Jalan Ki Mangunsarkoro. Boediono pun meminta pada pengawal isterinya un-

tuk tidak memberi tahu kalau dirinya pulang. Ketika sang isteri pulang dari istana dan membuka pintu rumah, dari dalam rumah Boediono keluar memberi *surprise* lalu mencium pipi kanan-kiri dan ucapan selamat ulang tahun kepada isterinya. Tidak lama kemudian, tepuk tangan membahana dan lagu selamat ulang tahun dinyanyikan oleh ibu-ibu pejabat Sekretariat Wapres yang ternyata berdatangan ketika Herawati tengah berada di Istana. Pestanya kecil-kecilan ditemani tumpeng dan kue tart. Setelah memberi ucapan selamat, ibu-ibu pejabat Setwapres segera menyinkingir. Soalnya sebelum acara, Boediono sudah berpesan kalau ia ingin makan siang berdua saja dengan isterinya.



## Dahlan Iskan Numpang Ngetop

Sejumlah pimpinan BUMN seperti Jamsostek, Telkom, PLN, dan Wijaya Karya mendapat panggilan dari Pansus Hak Angket Bank Century untuk diminta keterangan seputar dana perusahaan-perusahaan negara itu yang ada di Bank Century.



Dahlan Iskan yang merupakan orang nomor satu di Perusahaan Listrik Negara (PLN) turut hadir untuk memenuhi panggilan pansus tersebut (10/02). Saat mendapat giliran, dan setelah disumpah, dia pun memberikan keterangan mengenai dana PLN yang ada di Bank Century. Dengan singkat dia pun lalu menjawab, "Setahu kami, dana PLN yang ada di Bank Century jumlahnya sangat sedikit. Itu juga karena ada pelanggan PLN yang membayar tagihan listrik lewat Bank Century. Jadi, bukan direksi PLN yang berinvestasi. Makanya saya juga kaget kok dipanggil Pansus Bank Century," katanya. Seusai memberikan keterangan tersebut, dia pun lalu memohon diizinkan untuk meninggalkan ruang Pansus untuk melanjutkan pekerjaannya. Menanggapi permintaan Dahlan Iskan tersebut, pimpinan rapat yang dipimpin Wakil Ketua Pansus, Yahya Sacawirya buru-buru minta maaf dan mempersilakan Dahlan Iskan untuk meninggalkan ruang Pansus. Dahlan pun segera menimpali, "Terima kasih Pak. Tidak perlu minta maaf. Sebab, kami juga numpang ngetop di sini," ucap Dahlan yang disambut tawa peserta rapat.

## Jimly Asshidiqie 8 Banding 16

Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang dikeluarkan dalam kondisi kegentingan yang memaksa, kerap memunculkan polemik di tengah publik. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimprcs) Jimly Asshidiqie rupanya punya pendapat menarik soal perppu ini. Menurutnya, ke depan, presiden seharusnya tak perlu terlalu sering lagi mengeluarkan aturan setingkat UU tersebut. "Saya tidak terlalu sreg, sebab perppu itu *unfinished legal*

*concept*, tapi apa boleh buat konstitusi masih mengaturnya," ujar Jimly saat rapat dengar pendapat dengan Badan Legislasi DPR, di komplek parlemen, Senayan, Jakarta (16/2). Menurut dia, belum ada perangkat hukum yang memadai hingga saat ini, terkait pengaturan mekanisme dikeluarkannya perppu. Termasuk, kejelasan pencabutan kalau ternyata DPR menolaknya. Yang menarik, dia lantas membandingkan, dikeluarkannya perppu pada saat Orde Baru dan

pemerintahan di bawah Presiden SBY. Selama 32 tahun memerintah, Presiden Soeharto hanya pernah mengeluarkan 8 perppu. Jauh lebih sedikit ketimbang enam tahun terakhir yang sudah mencapai 16 perppu. "Orba yang sering dibilang sangat otoriter, ternyata sangat hemat sekali soal perppu ini," katanya.



# Hukum Masih Pilih Kasih

**Hukum memang harus ditegakkan seadil-adilnya dengan tidak menolerir pelanggaran. Namun penegakan hukum juga perlu melihat rasa keadilan masyarakat.**

**S**emua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Demikian bunyi pasal 27 ayat 1 UUD 1945, tentang hak warga negara dan penduduk. Dasar ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan tidak ada yang kebal terhadap hukum.

Hukum harus ditegakkan di segala lapisan masyarakat tanpa memandang status apakah ia seorang presiden, anggota dewan, pegawai BUMN, masyarakat biasa, petani, nelayan atau buruh. Namun kenyataannya, sering kali hukum itu ditegakkan tanpa rasa keadilan, yang mencederai arti hukum itu sendiri yang sebenarnya diperuntukkan untuk melindungi masyarakat. Ironisnya lagi, penegakan hukum cenderung pilih kasih. Hukum seolah tidak berdaya pada kelompok elit, mereka yang berduit. Orang-orang yang melakukan tindak pidana korupsi dan merugikan negara, misalnya, pada akhirnya memang dihukum namun hukum yang diterapkan pun masih bisa ditawar-tawar (dibeli).

Sebaliknya, hukum diterapkan seefektif mungkin kepada orang-orang yang tidak berdaya. Yang kebanyakan mereka datang dari kalangan miskin, yang sama sekali hampir tidak mengerti hukum. Sehingga menimbulkan pertanyaan, apakah jaringan hukum di negara hukum seperti Indonesia hanya efektif bagi masyarakat kecil?

Pertanyaan itu tidaklah mengada-ada. Sudah banyak kasus yang menimpa masyarakat kecil tanpa memperhatikan faktor rasa keadilan masyarakat. Masih belum lepas dari ingatan kita, kasus seorang nenek warga Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah. Mbok Minah (55) harus menghadapi sidang pesakitan di Pengadilan Negeri Purwokerto pada pertengahan bulan November 2009 silam, hanya karena mengambil tiga buah kakao atau coklat milik perusahaan PT Rumpun Sari Antan, tempat Mbok Minah bekerja. Minah yang mengaku tidak mengerti kasus yang sedang membelitnya, harus rutin mengikuti persidangan yang berjarak 40 kilometer dari rumahnya. Majelis hakim akhirnya menjatuhkan hukuman satu bulan dengan masa percobaan tiga bulan tanpa harus menjalani kurungan tahanan.

Pihak keluarga sendiri hanya bisa pasrah melihat kenyataan yang harus dijalani Mbok Minah yang sudah tua. Sehingga mereka sendiri merasakan, adanya perlakuan yang tidak adil. Mereka menggambarkan banyak kasus para koruptor miliaran rupiah yang tidak jelas penanganan hukumnya. "Masak koruptor miliaran dibiarkan, malah sodara saya yang mengambil 3 biji kakao akan disidang. Dimana keadilan hukum ini," ujar salah satu kerabat Mbok Minah kala itu.

Rasa ketidakadilan juga dialami Rusian alias Ian (33). Pria yang setiap hari menafkahi keluarganya dari menjual bahan bakar eceran jenis premium ini, harus mendekam di penjara. Warga Desa Hantakan RT 3, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Barabai, Kalimantan Selatan itu divonis kurungan dua bulan. Walau lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta terdakwa dipenjara empat bulan dan denda Rp 300 ribu subsider dua bulan kurungan. Rusian sesuai dengan putusan hakim, terbukti telah melakukan pelanggaran, yakni melakukan pengangkutan atau niaga bahan bakar minyak (BBM) yang disubsidi oleh pemerintah. Ia melanggar Pasal 55 UU No 22 Tahun 2001 tentang Migas.

Keluarga melihat hal tersebut sebagai sesuatu yang tidak pantas. "Hukum benar-benar aneh dan pilih kasih. Orang berusaha untuk mencari nafkah keluarga dengan menjual bensin eceran malah dijatuhi hukuman. Bagaimana dengan pengecer lain, apakah aparat berani menindaknya," ujar Lia, kakak Rusian. Ia tak menyangka hanya gara-gara membeli 20 liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium di SPBU Keramat Barabai itu, adiknya dinyatakan bersalah. Padahal, menurut Lia, membeli BBM di SPBU untuk dijual secara eceran merupakan hal yang wajar dan memiliki tujuan mulia, memudahkan masyarakat mendapatkan BBM tanpa harus antre lagi di SPBU.

Hal yang sama juga dialami Suparto (50) pelaku pencurian 5 batang pohon jagung harus sempat menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Situbondo, Jawa Timur (Jatim). Ia akhirnya memang tidak dipenjara. Walaupun unsur-unsur yang didakwakan jaksa penuntut umum sudah memenuhi syarat, majelis hakim melihat kerugian 5 pohon jagung yang diambil terdakwa cukup kecil. Dan sebe-

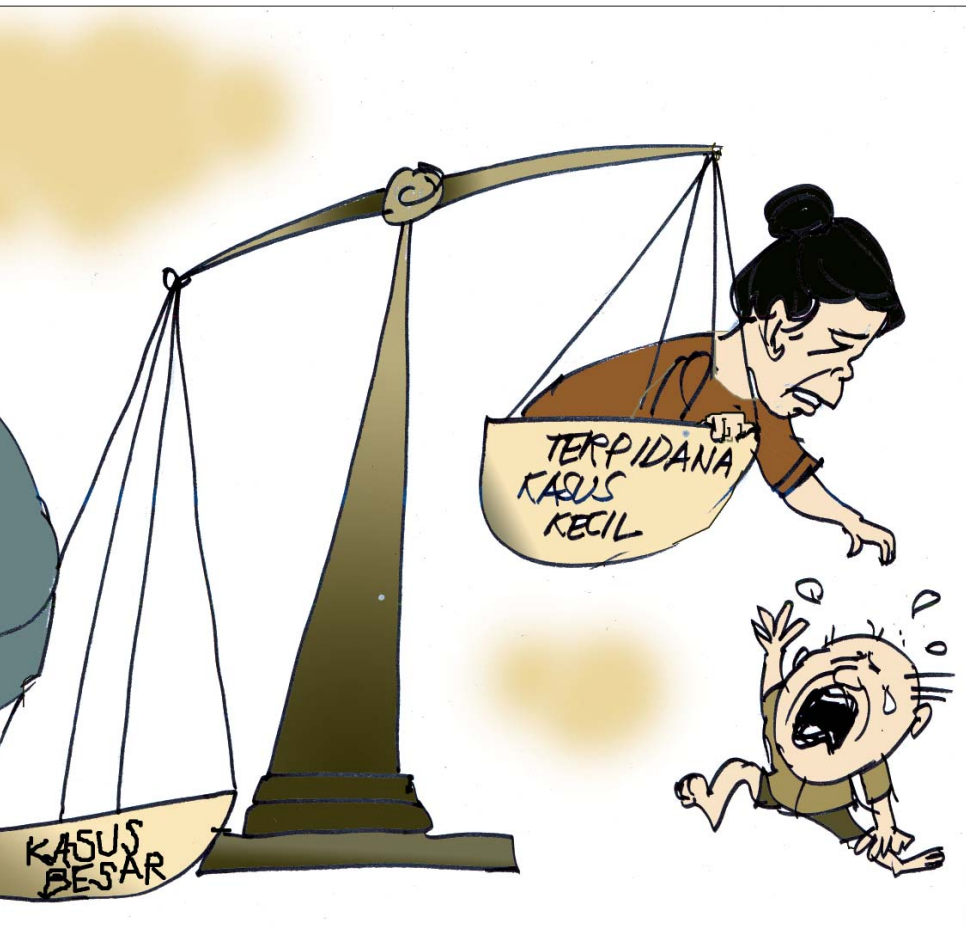


lum diproses hukum, terdakwa telah menyatakan permohonan maaf berulang kali kepada pemilik lahan jagung. Ditambah dengan sikap sopan terdakwa dan tidak pernah dihukum. Dengan pertimbangan itu, hakim memvonis satu bulan penjara dan menetapkan terdakwa Parto tidak menjalani hukuman selama masa percobaan 2 bulan dan tidak terlibat masalah hukum di kemudian hari. "Terimakasih tidak memenjarakan suami saya Pak Hakim," kata Hanik yang meninggalkan bangku sidang dan ikut bersimpuh bersama suaminya di hadapan hakim.

Begitu juga dengan kasus yang menimpa seorang bocah 9 tahun, pelajar kelas III SD Negeri Dr Sutomo VIII Surabaya, Jawa Timur. Gara-gara kasus guyonan sengatan lebah tawon yang ia lakukan kepada temannya, ia harus berurusan dengan hukum. Akibatnya David Dwi Yusuf harus menghadiri persidangan. Pasal yang didakwakan kepada DDY, telah melakukan tindak penganiayaan terhadap sesama teman sekolahnya, Dian (9).

Sebenarnya, peristiwa itu terjadi setahun yang lalu, Maret 2009. Saat itu Da-

ih



vid dan teman-temannya berdiri di sebelah pedagang es. Melihat ada lebah hinggap di dagangan es, David langsung mengambilnya. Secara bergurau lebah itu didekatkan ke pipi Dian. Tapi tanpa disangka, lebah tersebut dengan cepat menyengat pipi teman sekelasnya itu. Sehingga membuat pipi mungil Dian membengkak. Tidak terima atas apa yang dialami Dian, ayah Dian yang seorang aparat polisi berpangkat Kompol Supardi yang bertugas sebagai penyidik Satuan Pidana Tertentu Polda Jatim, melapor ke polisi. Laporan tersebut segera mendapat respon dari kepolisian hingga masuk ke pengadilan.

Dalam pembacaannya, Hakim Sutriadi dalam memutuskan kasus yang menimpa DDD di pengadilan 1/2/2010, menyesalkan perkara anak yang melibatkan DDD sampai ke persidangan. Hal ini tidak akan terjadi jika pihak sekolah cukup tanggap, yang bisa diselesaikan secara damai. Hakim juga menyayangkan orang tua kedua belah pihak yang tidak bijaksana sehingga sidang tetap dilanjutkan. Namun hakim memutuskan mengembalikan DDD

kepada orangtuanya. Yang oleh banyak kalangan dinilai sebagai langkah tepat. Karena DDD melakukan kenakalan anak-anak, pendidikan dan pengawasan dan teguran dari orangtua yang terpenting.

Meski David telah bebas, status vonis bersalah tetaplah sebuah keputusan bagi bocah sembilan tahun tersebut. Hal itu sangat disayangkan Sekretaris Jenderal Komnas Perlindungan Anak (PA), Aris Merdeka Sirait yang melihat vonis bersalah yang dijatuhkan kepada David merupakan tindakan pelanggaran hak anak. Yang seharusnya keputusan majelis hakim dalam perkara ini adalah pembatalan persidangan karena kasus ini tidak layak dijatuhi pasal 351 ayat 1 KUHP tentang tindak kekerasan yang mengakibatkan orang lain kesakitan dan tergelong perbuatan tidak menyenangkan.

Ia menyebutkan salah satu rujukan. Berdasarkan surat keputusan bersama (SKB) lima menteri dan kepolisian pada Desember 2009, jelas bahwa anak usia di bawah 12 tahun yang melakukan tindak pidana ringan (tipiring) atau tidak terbukti melakukan kriminalitas otentik

dikenai keadilan restoratif atau diversi. Dengan pendekatan dimana pelanggar didorong untuk mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka dan memperbaiki kerugian yang telah mereka lakukan, dengan meminta maaf atau melakukan pelayanan masyarakat.

Menurut Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar, tindakan yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur, sebaiknya tidak dihukum dengan hukuman penjara. Sehingga sangat diperlukan rumusan sistem rekonsiliasi, di mana segala perbuatan tak harus diselesaikan di meja hijau. Ia juga memberikan salah satu terobosan contoh hukuman yang memungkinkan diterapkan di Indonesia untuk tindak kriminal kecil, yang disebutnya kejahatan tak prinsipil sehingga pelaku tak perlu dijebloskan ke penjara. Pelaku dibebankan untuk melakukan kerja sosial yang ditempatkan pada tempat-tempat tertentu. Namun untuk melaksanakan semua itu, diperlukan adanya kerja sama dan sinergi penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim. Untuk tindakan pelanggaran yang tidak prinsipil, kalau sudah ditahan 15 hari, tuntutan jaksa juga 15 hari. Yang penting, efek jeranya sampai.

Ketua Komite 1 DPD RI Farouk Muhammad juga mengusulkan model penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan untuk perkara-perkara ringan yang melibatkan warga tak mampu. Menurutnya, warga tak mampu seringkali melakukannya justru karena kebodohan mereka sendiri. Ia mengatakan bahwa proses penghukuman itu bukan proses menguji alat bukti yang faktual, tapi menguji kecerdasan. Sehingga warga tidak mampu cenderung lebih banyak terkena tindakan hukum karena kebodohannya," tuturnya dalam pembukaan seminar hukum di DPD RI, Senin (1/2/2010).

Ia menjelaskan dengan model tersebut, sebelumnya kedua belah pihak dan penyidik harus sudah sama-sama sepakat untuk menghentikan penyidikan atau penuntutan. Sehingga penyelesaian perkara serba ringan di luar sidang pengadilan ini bisa ditempuh dengan penyelesaian secara kekeluargaan pada level komunitas atau membuat kesepakatan di antara kedua pihak dalam bentuk tertulis. Hal itu diungkapkannya bukan berarti memberikan toleransi atas perbuatan kejahatan mereka. Tetap diperlukan tindakan, namun bukan menghukum. Harus ada komitmen untuk tidak mengulangi. Memberikan ganti rugi bila diperlukan.

Dengan demikian, masyarakat diharapkan selalu sadar bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Tindakan sekecil apapun yang bisa mengakibatkan orang lain mengalami kerugian tetaplah sebuah pelanggaran dan hukum mesti ditegakkan. ■ BS, CID

# Angkasa Pura II Peduli Ekonomi Mikro

**Persaingan di era perdagangan bebas semakin tajam dan terbuka. Perhatian BUMN, khususnya AP II ternyata cukup tinggi terhadap perkembangan ekonomi mikro.**

Sebagai salah satu BUMN, Angkasa Pura (AP) II memiliki kepedulian tinggi terhadap kemajuan ekonomi mikro. Perhatian perusahaan yang bergerak di bidang Aeronautika dan non Aeronautika itu cukup menonjol dibanding yang lain. Bantuan modal dan perhatian terhadap manajemen modern, menjadikan perusahaan yang dibantu semakin berpeluang besar untuk tumbuh. Diikuti dalam pameran, baik di dalam maupun luar negeri, merupakan satu bukti.

Pengucuran dana dan kemitraan yang dijalin AP II sejak tahun 1992 terhadap pengusaha kecil merupakan bukti kepedulian AP II untuk turut mengangkat harkat dan martabat ekonomi kerakyatan menjadi usahawan berhasil. Apalagi dengan terbitnya Permen BUMN No. Per. 05/MBU/2007 pengganti Kepmen BUMN No. 236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan BUMN pada aspek usaha kecil, BUMN peduli dan bina lingkungan, selama ini menjadi pedoman.

Didiek Purwosularso, koordinator PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) AP II tingkat pusat mengatakan, bina lingkungan dan BUMN peduli bersifat bantuan. Sementara kemitraan, berupa pinjaman dengan waktu dua tahun dengan bunga 6% per tahun. Sebagai gambaran atas komitmennya, perusahaan ini telah menyalurkan dana sebesar Rp 18,79 miliar kepada 780 mitra binaan/usaha kecil pada tahun 2009.

Dikatakan Didiek, sudah menjadi kewajiban perusahaan untuk membantu dan berusaha membesarkan, baik lewat pemberian modal dan berbagai pelatihan, marketing maupun menyertakan dalam pameran. Baik dalam negeri maupun skala internasional dengan fasilitas dari AP II. Prinsipnya, setiap perusahaan yang dibantu diharapkan berkembang maju.

Kemitraan dan bina lingkungan diarahkan di sekitar kegiatan operasional yang tersebar di 12 bandar udara AP II, semen-

tara BUMN peduli bersifat nasional dan disesuaikan dengan kepentingan nasional. "Turut memajukan usaha kecil dan menciptakan lapangan kerja baru menuju masyarakat makin sejahtera, itu obsesi perusahaan," tutur Didiek.

## Galonggong Jaya

H Adang Kusmawan, salah satu pengusaha yang mendapat bantuan kemitraan dari AP II mengaku bahwa perusahaannya yang bergerak sebagai produsen golok merk Galonggong Jaya, bisa meraih keberhasilan seperti sekarang tidak lepas dari bantuan modal Rp 15 juta yang diterimanya tahun 2002 dari AP II.



PRODUSEN: H. Adang Kusmawan di antara produk goloknya

"Pengalaman saya selama ini, AP II bukan sekadar memberi pinjaman dengan bunga kecil. Tapi ada yang lebih bernilai dan tidak bisa diukur dengan uang yaitu, adanya pelatihan, marketing, seminar dan fasilitas penyertaan pameran, dalam dan luar negeri," katanya.

Menurut pengusaha asal Tasikmalaya yang mengaku tahun 1984 masih bergabung usaha dengan orang tuanya dan baru tahun 1992 mengawali karier secara mandiri ini, usahanya diawali dengan 8 orang pekerja. Kini usahanya telah berkembang jadi 57 orang pekerja, 4 agen

dengan berbagai jaringan penjualan.

Tahun 2008, H Adang juga mengaku mendapat bantuan kedua sebesar Rp 60 juta. Jumlah itu menurutnya senilai satu ton tanduk kerbau buat gagang golok. "Pinjaman dan ilmu manajemen kami peroleh lagi. Dan agar usaha semakin survive, bantuan kedua terwujud setelah pinjaman pertama lunas," katanya.

"Membesarkan mitra binaan, tidak pernah kami dapatkan dari yang lain. Luar biasa perhatian AP II. Diibaratkan, kita diberi kail dan umpan sekaligus. Pembinaan diberikan sampai sekarang," lanjut H. Adang didampingi Haryo koordinator PKBL AP II Bandara Husen Sastranegara Bandung Jawa Barat.

Menurutnya, pengalaman menarik dan sangat berkesan adalah saat mengikuti pameran di Jakarta Convention Centre (JCC). Stand Galonggong Jaya mendapat kehormatan dikunjungi Presiden

SBY, Bu Ani dan rombongan. Bahkan Presiden membeli 3 tiga golok seni sebagai kenang-kenangan. "Dengan fasilitas promosi di JCC yang diberikan AP II, menjadikan usaha berkembang dan dikenal seperti sekarang ini," jelasnya.

Bila bicara kualitas, menurut dia, golok buataannya terbuat dari bahan baku yang berkualitas seperti, ketajaman golok, gagang dari tanduk kerbau, sarung dari kayu julang-Bengkulu. Golok buataannya ada 2 jenis yakni golok tani seharga Rp 70 ribu hingga Rp 100 ribu/golok. Sementara golok koleksi seni mencapai Rp 500 ribu. "Golok Mang Adang, itu sebutan dari konsumen yang tersebar di Jawa Barat dan Jawa Tengah," kata anggota Dekranasda (Dewan kerajinan Daerah) Kabupaten

Tasikmalaya ini.

Berbagai piagam dan penghargaan dari bupati, gubernur, bahkan dari kementerian terpampang di kantornya. Seperti bantuan yang pernah diterima dari Gubernur Jawa Barat berupa mesin senilai Rp 100 juta. Perhatian lain menurut H. Adang adalah promosi yang dilakukan Bupati Tasikmalaya. Dikatakan, jika bupati melakukan kunjungan ke daerah atau ke luar negeri, selalu mempromosikan potensi daerah seperti membawa katalog yang di dalamnya terdapat pula produk Golonggong Jaya. ■ RI



SOSIALISASI: Undang-Undang 33 & 34 tahun 1964 di sebuah angkutan umum

## JR Cabang Jatim Raih 'Cabang Award'

**Pelayanan terbaik merupakan kunci keberhasilan suatu perusahaan. Ketika senyum kepuasan terpancar dari mereka yang terlayani dengan baik, indikator pelayanan publik berhasil dijalankan.**

**B**egitu pula sebuah penghargaan bernama Award, bukan sekadar prestasi yang diukur dari kalangan internal. Perhatian publik dalam bentuk layanan selama kurun satu tahun

telah memberikan kelayakan sebagai penerima penghargaan. Artinya, Award yang diberikan perusahaan kepada pelak-sana tugas sudah mempresentasikan keterwakilan publik.

Menurut Kepala Cabang Jasa Raharja (JR) Jawa Timur Usman Siahaan, Cabang Award merupakan ajang persaingan yang sehat dengan cabang lain untuk menunjukkan prestasinya dan dituntut selalu berkompetisi dengan menunjukkan kinerja terbaiknya. Cara ini menurutnya tepat untuk membangun perusahaan ke arah yang lebih maju.

Sebagai pemenang Cabang Award 2009, JR Cabang Jawa Timur, kata Usman tidak berpuas diri. Sebaliknya, keberhasilan mendapat predikat terbaik, memiliki tanggung jawab dan memberi motivasi sebagai awal kebangkitan JR Cabang Jatim berbuat yang terbaik untuk kemajuan perusahaan.

"Tingkat koordinasi makin diperkuat dalam memberikan pelayanan terbaik kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan sesuai MOU antara JR, Kepolisian dan Dinas Kesehatan, 12 Januari 2010 tentang penanganan terpadu korban kecelakaan lalu lintas. Langkah selanjutnya mengadakan MOU dengan rumah sakit," jelasnya.

Bicara pelayanan klaim, menurut Siahaan, Jasa Raharja Jawa Timur berorientasi kepada kepuasan ahli waris dari korban kecelakaan. Di antaranya memelihara sistem manajemen mutu ISO 9001: 2000 dan memperluas jaringan informasi agar masyarakat dengan mudah memperoleh informasi tentang Jasa Raharja dan sosialisasi UU 33 & 34 tahun 1964.

Maka untuk mempertahankan dan meningkatkan prestasi yang telah dicapai, perlu perubahan dan berorientasi kepada kepuasan klaimen. Di samping itu, memberikan *reward* kepada perwakilan sehingga memacu perwakilan lain untuk memberikan kinerja yang terbaik," jelasnya. ■ RI

## Balik Desa Bangun Desa

Ada slogan menarik dari Gubernur Jawa Tengah, H. Bibit Waluyo soal membangun daerah, "Balik Desa Bangun Desa" (kembali ke desa dan membangun desa).

Namun, melaksanakan slogan itu tidaklah semudah mengucapkannya. Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, terutama kesadaran masyarakat untuk membangun desa, slogan itu mustahil terwujud.

Program 100 hari pemerintah pusat, diantisipasi di daerah, khususnya Jawa Tengah, dengan mempersiapkan berbagai program yang sinkron antara kebijakan pusat dan daerah Jawa Tengah, kata Gubernur Jawa Tengah H. Bibit Waluyo kepada *Berita Indonesia*.

Di antara program 100 hari yang mendapat perhatian khusus menurut Bibit adalah percepatan lalu lintas perekonomian antardaerah di Jawa Tengah dan antarprovinsi. "Seperti jalan tol, jembatan, irigasi, jalur ganda kereta api dan lainnya, tujuannya, diharapkan semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tuturnya.

Seperti pembangunan jalur ganda Tegal-Pekalongan yang menurutnya akan segera selesai. Dimana program pembangunan *double track* KA lintas utara Jawa merupakan salah satu daftar dalam cetak biru (*blueprint*) perkeretaapian nasional. Itu tertuang dalam Tataran Transportasi Wilayah (Tatrawil) Jawa Tengah dan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) 2008-2013 Jawa Tengah.

Maka, dalam rangka mempercepat perkembangan perekonomian Jawa Tengah melalui peningkatan aksesibilitas transportasi, dia mengusulkan agar pembangunan jalur ganda diperpanjang dari Pekalongan sampai Semarang, baik melalui dana APBN atau bantuan luar negeri. "Pembangunan infrastruktur yang memadai dan merata seperti jalan negara, jalan provinsi, kabupaten/kota dan jalur kereta api. Ini didesain terpadu dengan antar-moda transportasi di Provinsi Jawa Tengah. Maka program Balik Desa Bangun Desa cepat terwujud dan berkembang luas," jelasnya.

Soalnya, Semarang sebagai ibukota Propinsi Jawa Tengah, saat ini menjadi tujuan dan pemberangkatan penumpang kereta api ke arah Barat (Jakarta) dan arah timur (Surabaya) maupun ke arah selatan, Gundhi, Solo atau ke Yogyakarta dan Madiun.

Data Daop IV/Semarang menunjukkan, volume penumpang 2005 (3,2 juta orang), tahun 2009 mencapai 4,1 juta penumpang. Tahun 2010 diperkirakan makin meningkat. Soal waktu tempuh Semarang-Jakarta yang mencapai 6,5 jam dinilai kurang kompetitif dibanding moda transportasi lain.



H. Bibit Waluyo

■ RI



## Demi keselamatan, gunakan helm standar secara benar

Siapapun tidak berharap mengalaminya.  
Namun bila hal itu terjadi,  
JASA RAHARJA membantu mengatasinya.  
Untuk korban kecelakaan lalu lintas jalan  
dan penumpang umum



## Patuhi rambu lalu lintas demi keselamatan dalam perjalanan...

### Nilai Santunan

Jenis Santunan	Darat, Laut, Danau Sungai / Penyeberangan	Udara
Meninggal	Rp. 25.000.000,-	Rp. 50.000.000,-
Cacat Tetap (maks)	Rp. 25.000.000,-	Rp. 50.000.000,-
Biaya Rawatan (maks)	Rp. 10.000.000,-	Rp. 25.000.000,-
Biaya Penguburan	Rp. 2.000.000,-	Rp. 2.000.000,-

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 36 & 37/PMK. 010/2008, berlaku 27 Maret 2008

**Rambu Lalu Lintas  
Bukan Hiasan..!**

**Waspada!  
bahaya ada dimana-mana...**



**JASA RAHARJA**  
*Utama dalam perlindungan, prima dalam pelayanan*

Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan  
dan Penumpang Umum

[www.jasaraharja.co.id](http://www.jasaraharja.co.id)



Balai Pengembangan Benih Ikan Wanayasa, Purwakarta

## Purwakarta Berbangga Hati

Purwakarta memiliki satu lagi *brand* yang baru, ikan Nirwana. Dari Wanayasa, Purwakarta, jenis nila asal luar negeri ini kini telah disebar ke berbagai penjuru Nusantara bahkan luar negeri.

Ikan Nirwana, yang berarti ikan Nila Ras Wanayasa yang bernama asli Great Grand Parent Stock/GGPS yang awalnya berasal dari Taiwan ini kini menjadi ikan favorit bagi peternak ikan karena memiliki pertumbuhan yang lebih cepat, daya tahan terhadap penyakit yang tinggi, kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan yang bagus, bentuk tubuh yang tebal, memiliki nilai ekspor tinggi, dan sudah bisa dipanen dalam usia empat bulan dengan ukuran dua ekor per kilogramnya.

Di Jawa Barat, ikan nila sudah mengalami sejarah panjang. Ikan nila pertama kali didatangkan dari Taiwan pada tahun 1969. Dan sejak tahun 2002, Balai Pengembangan Benih Ikan (BPBI) Wanayasa memperoleh famili ikan nila GET (Genetically Enhanced of Tilapia), juga diintroduksi dari Filipina oleh Dinas Perikanan Provinsi Jawa Barat.

Kemampuan ikan nila dalam beradaptasi dengan lingkungan barunya, menjadikan ikan ini mudah menyebar dan menjadi primadona dalam budidaya perairan ta-

war. Penyebaran yang sangat cepat didukung oleh kecepatan bereproduksinya, menjadikan perkembangan ikan ini tidak terkontrol. Dampak negatifnya adalah banyak terjadi silang dalam (*inbreeding*), yang berakibat pada penurunan kualitas genetik ikan yang selanjutnya menyebabkan penurunan performa ikan tersebut, baik pertumbuhan, daya tahan terhadap penyakit, maupun kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungannya.

Untuk mengatasi penurunan kualitas genetik tersebut, Kepala BPBI Wanayasa, Purwakarta Unit Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat Budiman A Pi.MSi kepada wartawan *Berita Indonesia* menyatakan, pada tahun 2004, dibuat program pemulihan dengan sarana akhir mendapatkan induk ikan nila unggul. Salah satu alternatif program pemulihan itu adalah melalui penangkaran selektif (*selective breeding*). Upaya-upaya mendasar yang mengarah kepada penangkaran selektif ikan nila itu telah dimulai oleh BPBI Provinsi Jawa Barat yang berlokasi di Wanayasa, Purwakarta de-

ngan areal 5 ha.

Dalam perkembangannya, telah dibangun kerja sama dengan para pakar perikanan dari Tim Ahli Tilapia Broodstock Center, menyusun dan melaksanakan program pengelolaan seleksi ikan tersebut dengan tujuan untuk memper-tahankan atau bahkan memperbaiki kualitasnya. Sumber genetik seleksi adalah GIFT (Genetic improvement for farmed Tilapia) dan GET (Genetically Enhanced Tilapia). Induk penjenis (Great Grand Parent Stock/GGPS), yang selanjutnya diberi nama Ikan Nila Nirwana (Nila Ras Wanayasa) di-*release* pada bulan November 2006. Penyediaan dan diseminasinya diawasi oleh pemerintah.

Di tempat terpisah, Kadis Peternakan dan Perikanan (Ka Disnakan) Kabupaten Purwakarta Ir.Herry Heryawan kepada *Berita Indonesia* menjelaskan bahwa program unggulan kelas dunia yang dikelola BPBI Jawa Barat yang berlokasi di Cipulus, Wanayasa, Purwakarta, telah ditindaklanjuti Bupati Purwakarta H Dedi Mulyadi SH dengan dibuatnya kerjasama yang saling menguntungkan antara BPBI dengan kelompok peternak ikan Purwakarta, sehingga para peternak ikan mendapat benih unggul yang mudah dijangkau. Menurut Herry, pembudidayaan ikan Nirwana ini selain untuk kebutuhan domestik, juga untuk memenuhi permintaan negara Timur Tengah, Eropa dan Amerika.

Herry menjelaskan, untuk memenuhi pengadaan benih nila Nirwana, saat ini pemerintah telah mengembangkan dua kawasan unit pembenihan. Unit pertama terdapat di desa Nagrok, Cipulus, Wanayasa yang dilakukan oleh BPBI Jawa Barat. Sedangkan unit kedua, terdapat di Desa Cibogogirang, Kecamatan Plered, yang dilakukan oleh Disnakan Purwakarta. Kawasan pembenihan itu sendiri dimaksudkan agar para petani ikan terpusat di satu titik dalam melakukan peredaran, sehingga nantinya bisa melakukan panen dan pemasaran secara bersamaan.

Menurut Herry, benih ini juga telah sukses dikembangkan di Bali. "Purwakarta boleh berbangga dengan kabar itu, karena bagaimanapun, benih Nirwana yang berkembang di Bali itu berasal dari Purwakarta," tandas Herry. ■ BND

## Disambut Baik Kaum Ibu

Pertengahan Februari lalu, kantor keluarga berencana di Desa Huta Gurgur Kec. Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) memberikan pelayanan gratis kepada sekitar 24 warga. Hal ini sesuai dengan program pemerintah untuk mensejahterahkan keluarga yang menjadikan ibu sehat dengan slogan "Ayo Ikut KB 2 Anak Lebih Baik". Ibu Polora Napitupulu selaku Kakan KB Humbahas me-

ngatakan bahwa pelayanan KB nasional yang dilaksanakan di berbagai desa bertujuan mensejahterahkan anak demi masa depan yang lebih baik dan juga menjadikan ibu sehat, hidup rukun, aman dan sejahtera. Ibu Polora mengucapkan terima kasih kepada Kepala Desa Huta Gurgur, Hotmartua Simanullang atas kerjasamanya menyukseskan pelaksanaan pelayanan KB nasional ini bersama-sama dengan kader

kesehatan dan mitra *Berita Indonesia*. Dengan kehadiran program KB di desa itu, Kepdes Huta Gurgur juga mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Ibu Polora Napitupulu bersama rombongan atas kepeduliannya terhadap ibu-ibu di desa tersebut. ■ PM



Polora Napitupulu

# Mengadili Bantuan Sosial



**DITAHAN:** Selesai diperiksa di Kantor Kejaksaan Negeri Tarakan, Ketua Yayasan Marturedo Tarakan, Pdt Aex Ridwan Sinurat, STh. Ce. Ma. dibawa Jaksa ke LP Tarakan

## Perkara Yayasan Marturedo penerima dana bantuan sosial dari Pemkot Tarakan mengundang pertanyaan. Diduga, sebagian besar penerima bantuan membuat laporan fiktif atau palsu. Adakah KPK berniat mengusutnya?

**P**erkara yang kini tengah diadili di Pengadilan Negeri Tarakan, Kalimantan Timur, sebenarnya, hanya satu dari 216 penerima bantuan sosial tahun 2008. Seorang Pendeta, Alex Ridwan Sinurat, S.Th, Ma.Ce (49) Ketua Yayasan Marturedo Tarakan, dituduh melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara, atau perekonomian negara.

Tapi, akibat perkara korupsi itu, kini terjadi "perang dingin". Hakim majelis yang diketuai Soedibiyo Prawiro, SH dengan anggota Harun Yulianto, SH dan I Putu Gede Astawa, SH.MH mengesampingkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), yang mengatakan bahwa kerugian negara sebesar Rp 500 juta. Majelis hakim, mengingatkan bahwa terdakwa Alex Ridwan Sinurat, atas nama Yayasan Marturedo, tidak hanya sekali menerima Rp 500 juta dari Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan.

Dalam persidangan Selasa, (26/01) lalu, saksi Agus Wahyono, SE. MAP Kabag Keuangan Pemkot Tarakan mengatakan, terdakwa Alex Ridwan Sinurat, sudah tiga kali menerima bantuan dana sosial. "Pertama, 19 Desember 2007 Rp 500 juta. Kedua dan ketiga dalam tahun 2008 sebesar Rp 150 juta dan Rp 200 juta," katanya menjawab pertanyaan Penasehat

Hukum Sinurat, Darwis Manurung, SH. MH dan Wilmar Sagala, SH.

Sementara itu, terdakwa Pdt Alex Ridwan Sinurat, S.Th, Ma.Ce pada kesempatan yang diberikan Ketua Majelis Hakim mempertanyakan status dana bantuan yang telah masuk ke dalam rekeningnya. "Tolong pak hakim, apakah uang yang sudah masuk ke dalam rekening kami, boleh dikatakan masih milik negara?" tanya Sinurat. Menurut pembela sidang Gereja Persekutuan Injil Baptis Indonesia (GPIBI) Tarakan ini, dalam hukum, uang yang sudah masuk ke dalam rekening seseorang merupakan hak milik si pemilik rekening.

Sejauh ini, Tim JPU yang terdiri dari Ade Hermawan, SH. Kiki Yonata, SH. Marthin Manahutu, SH. Sutrisno, SH. Dan Eduward WH Naibaho, SH baru menetapkan seorang terdakwa kasus korupsi yakni Ketua Yayasan Marturedo. Dalam dakwaan, yayasan ini menerima dana bantuan sosial dari Pemkot Tarakan sebesar Rp 500 juta pada 19 Desember 2007 lalu. "Dana tersebut seharusnya digunakan untuk operasional yayasan, bukan untuk kepentingan pribadi terdakwa," kata jaksa.

Setelah dana tersebut ditransfer ke rekening Yayasan Marturedo di Bank BPD Kaltim Cabang Tarakan, menurut jaksa, terdakwa secara berturut-turut menarik uang tersebut. Kemudian, dipergunakan

membeli rumah atas nama Ruthami, isteri terdakwa di Jl Flamboyan Gang Bhakti III RT 28 No 4 Kelurahan Karang Anyar Tarakan Barat. Membeli kendaraan roda empat 2 unit seharga Rp 85 juta, atas nama Pdt Alex Ridwan Sinurat, STh. Ma. Ce. serta membeli sebidang tanah seharga Rp 115 juta di Cahaya Baru RT 04 Tarakan Barat.

Kasus korupsi ini cukup mengundang perhatian masyarakat. Sebab, tidak saja dilakukan seorang hamba Tuhan, tetapi juga menyeret sejumlah nama pendeta. Adalah Pdt Willem Adam Mamuaya, STh menjelaskan dalam persidangan bahwa ia sebenarnya dalam akta disebut sebagai pendiri. "Saya tahu sebagai Pembina Yayasan setelah dipanggil jaksa. Selama ini saya tidak pernah dilibatkan. Setelah ada masalah baru diundang rapat," kata Mamuaya.

Sementara itu, saksi Pdt Barnabas, STh dan Pdt Saidi Im Silalahi, STh sangat kecewa atas tindakan Pdt Alex Ridwan Sinurat. "Ini tak pantas dilakukan seorang hamba Tuhan," kata Silalahi kepada SL Pohan dari *Berita Indonesia*. Dalam persidangan, kedua saksi menjelaskan bahwa keterlibatan mereka di Yayasan Marturedo tidak ada sama sekali. Memang, benar terdakwa pernah meminta fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) saksi. Namun, saksi tidak pernah berpikir pada hal-hal yang negatif. "Saya pikir fotokopi KTP itu untuk lembaga gereja. Saya pun tidak tahu kalau undangan selama dua hari kursus pembuatan sabun di Hotel Tarakan Plaza sebagai kegiatan Yayasan Marturedo, karena saya diundang dan spanduk yang ada atas nama lembaga gereja," kata Barnabas.

Ketidakjelasan lainnya adalah soal sumber dana bantuan sosial itu. Sebab, sebelum Yayasan Marturedo didirikan, dana bantuan sudah dibahas di DPRD Tarakan. Belum ada permintaan masuk di Pemkot Tarakan, uangnya sudah dicairkan. Artinya yayasan ini memiliki hak istimewa," kata hakim Harun Yulianto. Menurutnya, siapa orang di balik kemudahan itu membuat yayasan ini punya hak istimewa perlu diusut.

JPU sendiri, seperti dalam dakwaannya hanya memperkarakan dana bantuan sosial untuk tahun 2007 sebesar Rp 500 juta yang diterima oleh Yayasan Marturedo. Sementara dana bantuan sosial sebesar Rp 350 juta – seperti yang disebutkan hakim – sehingga Pdt Alex Ridwan Sinurat tetap saja memegang dana itu, walau nanti sudah divonis. Atau inilah yang dikatakan jika jaksa setengah hati. ■ SLP



Pegolf kelas dunia, Tiger Woods

# Kisah Skandal yang Tak Pernah Putus

**Nama Berlusconi, Tiger Woods, dan John Terry menambah panjang daftar tokoh terkenal yang tidak menghargai nilai kesetiaan dalam pernikahan.**

**M**enjadi orang terkenal, sukses dan kaya merupakan impian semua orang. Namun, setelah berada di puncak kejayaan hidup, banyak yang jatuh terjerembab karena perempuan. Sosok yang telah menjelma jadi idola berakhir menjadi cemoohan.

Sebut saja skandal cinta Perdana Menteri Italia Berlusconi dengan seorang gadis model berusia 18 tahun, Naomi Letizia. Skandal ini makin tersiar setelah Berlusconi lebih memilih menghadiri pesta ulang tahun ke-18 gadis belia tersebut. Sesudah itu, publik Italia semakin dihebohkan pada pertengahan tahun 2009 dimana Berlusconi disebut-sebut bersama dengan wanita panggilan bernama Patrizia D'Addario. Perempuan ini membeberkan permainan cinta mereka dalam sebuah buku kenangannya berjudul 'Enjoy, Prime Minister' yang menggambarkan sebuah pesta yang digelar di Palazzo Grazioli, kediaman mewah Berlusconi di Roma. Berlusconi sendiri tidak tegas membantah bahwa ia telah menghabiskan malam bersama dengan Patrizia D'Addario. Namun, Berlusconi mengakui dirinya bukanlah orang suci.

Skandal tersebut telah membuat hubungan Berlusconi dengan sang isteri tak bisa dipertahankan lagi. Veronica Lario menggugat cerai Berlusconi yang telah 19 tahun mendampinginya. Lario juga meminta uang tunjangan senilai 3,5 juta euro (Rp 45,5 miliar) per bulan. Namun pihak



Berlusconi, PM Italia

Berlusconi hanya menyanggupi tunjangan 200.000 euro (Rp 2,6 miliar) per bulan untuk Lario. "Telah terjadi pertemuan di depan hakim dan perceraian kini tak terelakkan lagi," kata juru bicara Lario seperti dilansir harian Telegraph, awal Februari lalu. Pertemuan itu merupakan yang pertama kalinya antara Berlusconi dan Lario dalam waktu 9 bulan terakhir.

Tak hanya Berlusconi, prahara cinta juga mengguncang pegolf kesohor Tiger Woods yang mencuat pada November 2009. Tiger Woods keturunan Thailand ini, tersangkut skandal cinta dengan Rachel Uchitel. Adalah Ashley Samson seperti dilansir The Sun, mengklaim jika Rachel Uchitel melakukan perselingkuhan dengan Woods, yang pada akhirnya diketahui istrinya, Elin Nordegren. Bahkan, Ashley Samson mengaku tidak mau menerima uang tutup mulut agar skandal ini tidak terungkap. Ia sempat ditawari

uang senilai 150.000 pound atau Rp 2,29 miliar, yang akhirnya ia tolak. Uchitel sendiri sempat membantah perselingkuhan tersebut dengan Woods, namun pada akhirnya meminta maaf pada Elin Nordegren, istri Woods.

Saat mengetahui perselingkuhan suaminya, Elin Nordegren sangat terpukul. Meski demikian, Elin tetap memilih untuk bertahan mendampingi Woods dengan alasan demi kedua buah hati mereka, Sam (2) dan Charlie (1).

Woods yang terus berjuang untuk mengurangi kecanduannya akan seks, akhirnya kembali ke pelukan keluarganya, setelah mengikuti rehabilitasi seks di sebuah klinik selama enam pekan, pertengahan Februari lalu. Elin tetap tabah meski dihianati Woods dengan tetap menyatakan kesediaannya untuk menerima sang suami saat menjemputnya keluar dari klinik tersebut. Woods menyadari kekecewaan dan sakit hati atas ketidaksetiaannya yang telah berdampak pada orang lain, terlebih kepada istri dan anak-anaknya. Dan iapun mengucapkan minta maafnya kepada semua pihak.

Kepada istrinya, Woods hanya mengakui perselingkuhannya dengan tiga perempuan, seorang pekerja klub malam Rachel Uchitel (34 tahun), pelayan bar



John Terry, pemain sepakbola Inggris

Jaimee Grubbs (26), dan seorang perempuan lainnya. Sebelumnya sempat dikabarkan, Woods pernah menjalin hubungan dengan 12 wanita.

Tak hanya menimpa atlet golf, skandal perselingkuhan juga menimpa para pemain sepakbola. Yang teranyar adalah kapten kesebelasan Inggris John Terry harus rela melepaskan ban kapten timnas Inggris atas desakan publik Inggris. John Terry jatuh setelah terkuaknya skandal seks dengan Vanessa Perroncel seorang model. Perempuan ini adalah mantan pacar temannya sesama pemain di Timnas, Wayne Bridge. Wayne Bridge yang mengancam akan mundur dari Timnas karena tak ingin bertemu dengan Terry membuat pelatih Fabio Capello mengambil keputusan sulit. Fabio pada akhirnya memutuskan melalui FA bahwa bek Chelsea tersebut tidak akan lagi memimpin The Three Lions di lapangan hijau. ■ **ABD**

# Memulihkan Haiti



**Untuk membangun kembali Haiti yang porak poranda membutuhkan waktu 10 tahun dengan biaya hingga Rp 130 triliun.**

**G**empa bumi yang terjadi 12 Januari 2010 itu akan menjadi kenangan pahit yang tak terlupakan bagi Haiti, negara kecil di Amerika Latin ini. Sepertiga bangunan di Ibukota negara tersebut, Port au-Prince, luluh lantak baik rumah penduduk, sekolah, hotel, tempat ibadah, kantor PBB termasuk Istana Kepala Negara. Akibat kedahsyatan gempa berkekuatan 7,0 SR itu, korban meninggal mencapai 250.000 orang dengan kerugian hingga \$US14 miliar.

Pasca gempa, mayat-mayat bergelekan di mana-mana. Puluhan ribu jasad korban gempa setiap harinya diangkut ke kuburan massal di Port-au-Prince menggunakan truk-truk dan bulldoser. Pemandangan ini membuat warga yang menjadi saksi hidup trauma. Bahkan banyak warga masih tidur di luar rumah karena gempa susulan masih kerap mengguncang. Setidaknya 54 gempa susulan terjadi. Bila melihat ke belakang, pada tahun 1751, gempa besar pernah menghantam Haiti dan juga negeri tetangganya Republik Dominika.



Gempa yang terjadi hanya dalam hitungan 15 hingga 20 menit tersebut meruntuhkan segala pencapaian yang telah diraih. Haiti harus memulai dari awal lagi setelah sempat mengalami pertumbuhan positif pasca keterpurukan akibat serangkaian bencana topan dan kekacauan politik tahun 2008. Sekarang sekitar 1,5 juta orang kehilangan tempat tinggal dan untuk memulihkannya tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat.

Untuk membangun kembali masa de-

pan Haiti, Inter-American Development Bank (IDB) memperkirakan perbaikan Haiti membutuhkan biaya sebesar Rp 130 triliun atau senilai US\$ 14 miliar. Biaya ini untuk membangun kembali rumah dan sekolah yang roboh, membangun jalan, dan infrastruktur lainnya. Biaya ratusan triliun rupiah tersebut diperhitungkan berdasar jumlah populasi dan kondisi ekonomi negara berpenduduk 9 juta orang ini yang juga merupakan negara termiskin di Benua Amerika, sebelum gempa terjadi.

Perdana Menteri Haiti, Jean-Max Belleville telah meminta bantuan dunia internasional untuk merekonstruksi negaranya. Para tokoh-tokoh internasional berkumpul di Montreal, Kanada. Perdana Menteri Kanada, Stephen Harper, memperkirakan rekonstruksi di Haiti dapat memakan waktu 10 tahun. Dalam pertemuan yang juga dihadiri Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton, Harper mendesak dunia untuk mempercepat rekonstruksi negara di Kepulauan Karibia tersebut. Negara-negara donor sepakat akan mengadakan konferensi internasional untuk membantu Haiti di markas PBB di New York pada bulan Maret untuk membahas upaya bantuan rekonstruksi ke Haiti.

Sebelumnya pemerintah Amerika Serikat telah menunjuk dua mantan presiden AS, Bill Clinton - sebelum jatuh sakit akibat penyempitan pembuluh darah jantung - dan George Herbert Walker Bush. Mereka ditunjuk untuk mengupayakan pemulihan Haiti. Bahkan di bawah pimpinan mantan presiden AS tersebut, telah diresmikan situs web untuk mengumpulkan dana bagi pembangunan kembali Haiti.

China, sebagai negara yang ekonominya mengalami pertumbuhan besar di Asia saat ini, telah menyerahkan sejumlah bantuan dan menyatakan komitmennya untuk ambil bagian dalam pembangunan pasca gempa di Haiti. Melalui Menteri Perdagangan Tiongkok Chen Deming, pemerintah Tiongkok menyerahkan uang sumbangan 2,6 juta dolar Amerika kepada PBB melalui sejumlah lembaga PBB untuk Tiongkok di Beijing.

Sebelumnya pemerintah Cina sejak awal sudah memberikan bantuan darurat kepada Haiti. Mulai dari tim penyelamatan internasional untuk korban, memberikan bantuan barang-barang pertolongan darurat senilai 48 juta yuan atau sekitar 7 juta dolar Amerika serta bantuan tunai senilai 3,6 juta dolar Amerika kepada Haiti. ■ **ABD**



# Nikmatnya TV Digital

**Apakah Anda sudah bosan menggeser-geser antena, menonton siaran TV berbintik, atau pusing melihat gambar TV mobil yang selalu bergoyang? Semuanya itu tidak akan Anda jumpai dalam sistem siaran digital.**

Sampai saat ini, televisi analog masih banyak kita gunakan. Namun, tidak lama lagi, TV konvensional milik kita itu tidak akan mampu lagi menangkap siaran TV. Karena pemerintah akan memamatkan siaran analog dan menggantinya dengan siaran digital.

Salah satu alasan mengapa berpindah ke siaran digital adalah keterbatasan yang dimiliki siaran analog khususnya kanal yang terbatas. Departemen Komunikasi dan Informasi (Depkominfo) sendiri sudah kesulitan menerima permohonan izin pendaftar siaran TV di Indonesia karena frekuensi yang tersedia terbelang sudah penuh.

Selain itu, negara-negara lain sedang dan sudah bermigrasi menggunakan sistem siaran digital. Belanda menjadi yang pertama bersiaran digital total sejak Desember 2006, diikuti Amerika sejak Februari 2009. Jepang pun akan memamatkan siaran analognya pada Juli 2011. Indonesia sendiri sudah memulainya dengan meresmikan siaran TV digital sejak 13 Agustus 2008. Siaran ini melibatkan Konsorsium TV Digital Indonesia ([www.KTDI.tv](http://www.KTDI.tv)) dan TVRI-Telkom.

Bagi Anda yang memiliki penerima TV digital (TV tuner jenis DVB - Digital Video

Broadcasting) sudah dapat menikmati tayangan TV digital dari 6 stasiun populer yakni ANTV, Metro TV, SCTV, TransTV, Trans7 dan TVOne. Tahun lalu, Indosat dengan konsorsium TREN Mobile TV yang beranggotakan sejumlah perusahaan di bawah MNC Group seperti Global TV, RCTI, TPI dan Infokom Elektrindo menjalin kerjasama. Konsorsium ini menyelenggarakan uji coba siaran TV digital hingga akhir tahun 2009. Upaya pengenalan dan uji coba ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana respon masyarakat dimana saat ini jumlah pemirsa di tanah air mencapai 50 juta keluarga dengan perkiraan jumlah TV mencapai sekitar 40 juta.

Agar pengguna TV konvensional bisa menyaksikan siaran digital, mereka harus rela mengeluarkan uang membeli konverter digital ke analog yang disebut Set-Top-Box (STB). Harganya sekitar Rp Rp 300-400 ribuan. Apakah masyarakat sudah siap dan rela membeli televisi yang sudah mendukung siaran digital atau setidaknya membeli STB? Jawabannya tentu tergantung pada sejauh mana mereka mengenal dan merasakan manfaat dari sistem siaran digital ini. Oleh sebab itu, proses migrasi dari analog ke digital memerlukan waktu.

Dari segi teknis, sebenarnya tidak terlalu sulit mengimplementasikan migrasi ini karena peralatan studio TV sebagian besar sudah bersistem digital seperti CD audio, MP3, DVD, kamera video, dan sistem *mixing*. Yang berubah adalah unit pemancarnya yang menjadi digital. Istilah TV digital bukanlah merujuk kepada pesawat TV-nya yang bersistem digital melainkan lebih kepada sinyal yang digunakan (siaran digital/*digital broadcasting*). Format penyiaran ini akan muncul dalam Standard Definition TV (SDTV) ataupun High Definition TV (HDTV).

Di seluruh dunia terdapat beberapa standar siaran TV digital yakni DTV (Digital Television, standar di Amerika), DVB-T (Digital Video Broadcasting-Terrestrial, standar di Eropa dan Australia) dan ISDB-T (Integrated Services Digital Broadcasting Terrestrial, standar di Jepang). Indonesia sendiri melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 07/P/M.KOMINFO/3/2007 tertanggal 21 Maret 2007 telah menetapkan standar DVB-T sebagai standar penyiaran televisi digital terestrial tidak bergerak di Indonesia. Terdapat pula standar siaran digital DVB-H (handheld) yang ditujukan pada perangkat mobile seperti ponsel. Ponsel Nokia N77/96 atau ZTE F19 misalnya sudah bisa menerima siaran digital.

Dibandingkan siaran analog, sinyal digital memiliki beberapa kelebihan di antaranya lebih tahan terhadap *noise* dan interferensi (gangguan atau tubrukan) yang timbul. Artinya, Anda akan mendapatkan tontonan yang jernih dan tidak perlu menggeser-geser antena agar gambar tampil bagus. Sinyalnya pun lebih mudah diperbaiki pada bagian penerima melalui koreksi error. Artinya, meski Anda menonton siaran TV sambil bergerak dalam bis atau mobil, Anda tidak akan mendapatkan gambar yang berbintik atau buray.

Pada sistem siaran analog, semakin jauh dari stasiun pemancar TV, sinyal akan melemah dan penerimaan gambar menjadi buruk. Lain halnya dengan siaran digital yang terus menyampaikan gambar yang jernih hingga pada titik di mana sinyal dalam bentuk kode 1 dan 0 tidak dapat diterima lagi. Singkatnya, siaran TV digital hanya mengenal dua status: Terima (1) atau Tidak (0).

Poin positif lainnya dari siaran digital adalah mendukung display video HD dalam rasio layar 16:9 seperti pada DVD atau layar bioskop. Ini artinya, Anda bisa mendapatkan hiburan visual yang lebih tajam dan halus. Siaran digital pun memungkinkan sebuah kanal diisi hingga beberapa program siaran misalkan berita, olahraga, sinetron dan film – hal ini tidak bisa dilakukan pada siaran analog. ■ ROY



# Belum Tentu DBD

**Bila Anda mengalami penurunan jumlah trombosit yang tidak disertai dengan demam, tidak ada pembesaran limpa, dan tidak meningkatnya kekentalan darah, Anda harus segera memeriksakan diri ke dokter. Kemungkinan besar Anda menderita ITP (Idiopathic Thrombocytopenic Purpura).**

**V**elisia Glori (19 tahun) sudah dua pekan tergolek di salah satu rumah sakit ternama di Jakarta, RSCM (Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo). Ia masuk UGD RSCM pada 15 Januari lalu setelah mendapat rujukan dari rumah sakit lain. Ia mengalami gejala perdarahan di gusi dan terdapat lebam kebiruan di tangan dan kakinya.

Dari raut wajahnya, ia tidak tampak seperti orang sakit. Ia tidak merasa demam, meriang, ataupun pusing. Suhu tubuhnya tetap normal, sehingga ia sama sekali tidak merasakan ada kelainan pada dirinya.

Padaحال menurut hasil pemeriksaan laboratorium, jumlah trombosit Velisia turun menjadi 6.000 per mikroliter darah. Pemeriksaan darah dilakukan beberapa kali dan hasilnya, jumlah trombosit semakin turun, 2.000 per mikroliter darah, bahkan sempat 1.000 per mikroliter (mm<sup>3</sup>) darah.

Turunnya kadar trombosit Velisia ini sempat membuat keluarganya panik. Dari

pengakuan orang tua Velisia, Ny. Osman (55 tahun), dua minggu sebelumnya, anaknya masuk rumah sakit karena mengidap penyakit demam berdarah. Di rumah sakit anaknya mendapatkan perawatan selama empat hari. Dokter kemudian memperbolehkan anaknya pulang setelah trombositnya mengalami kenaikan, mendekati normal 110.000 per mikroliter (normal jumlah trombosit 150 ribu-450 ribu per mikroliter darah).

Setelah melalui rangkaian pemeriksaan dan analisa dokter, Velisia akhirnya didiagnosa menderita ITP (Idiopathic Thrombocytopenic Purpura). Gejala yang timbul seperti gusi berdarah, adanya perdarahan di kulit, dan pada pemeriksaan laboratorium jumlah trombosit menurun, cukup menguatkan dalam menentukan diagnosa penyakit.

Penyebab ITP belum jelas diketahui. Pada penderita ITP terjadi trombositopenia yaitu keadaan dimana jumlah trombosit sangat sedikit dan dapat menyebabkan perdarahan (*purpura*). Seperti diked-

tahui, trombosit atau keping darah adalah sel-sel yang berukuran sangat kecil yang bertugas menutupi daerah tubuh pasca luka atau akibat teriris/terpotong dengan membentuk bekuan darah.

Seseorang dengan keping darah yang terlalu sedikit dalam tubuhnya akan sangat mudah mengalami luka memar bahkan bisa mengalami perdarahan dalam periode cukup lama setelah mengalami trauma luka. Kadang bintik-bintik kecil merah (*petechie*) akibat perdarahan dalam jumlah kecil muncul pada permukaan kulitnya. Perdarahan yang lebih banyak jumlahnya berupa mimisan, gusi berdarah, haid berlebihan pada wanita, darah pada kotoran dan atau perdarahan dalam organ ususnya.

Penyakit ini tergolong penyakit autoimun dimana tubuh membentuk antibodi yang mampu menghancurkan sel-sel trombositnya sendiri. Dalam kondisi normal, antibodi adalah respons tubuh yang sehat terhadap bakteri atau virus yang masuk ke dalam tubuh.

"Pasien ITP dilihat secara fisik biasanya terlihat baik. Contohnya seperti Velisia ini. Dia hanya mengalami sedikit perdarahan pada gusi dan ada lebam kebiruan di tangan juga kakinya. Tapi begitu diperiksa kadar trombositnya sudah sangat rendah dan itu berbahaya," jelas Dr. Shufrie, SpPD, KHOM. Dokter yang merawat Velisia di RSCM ini menambahkan bahwa ITP yang diderita Velisia kemungkinan besar disebabkan oleh infeksi virus demam berdarah yang dialaminya.

ITP dibedakan menjadi akut dan kronik. ITP akut umumnya diderita anak-anak usia 2-6 tahun. Seringkali timbul setelah infeksi virus akut seperti Rubeola, Rubella, Varicella zooster, Epstein Barr virus dan penyakit saluran nafas. Kabar baiknya, ITP akut pada anak ini biasanya *self limiting* atau dapat sembuh spontan. Hal ini terjadi pada 90% pasien dengan waktu penyembuhan 3-6 bulan. Sedangkan ITP kronik diderita dewasa, kebanyakan wanita muda usia 15-40 tahun. ITP bukan penyakit keturunan.

Untuk kasus ITP pada anak bisa dilihat pada pengalaman Akbar yang tiba-tiba mengalami mimisan dalam jumlah banyak. Ibunya sangat kaget melihat darah mengalir deras dari hidung sang anak. Padahal bocah 5 tahun itu tidak sedang demam.

Segera sang ibu membawa Akbar ke dokter. Setelah diatasi perdarahannya, dokter menyarankan agar dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui penyebab perdarahan. Hasilnya jumlah trombosit Akbar hanya 10.000/mm<sup>3</sup>.

Penurunan jumlah trombosit yang tidak disertai dengan demam, tidak ada pembesaran limpa, dan tidak meningkatnya

kekentalan darah/hematokrit cukup untuk menegaskan diagnosa bahwa Akbar menderita ITP.

Kembali ke kasus Velisia, tindakan yang diberikan dokter kepada Velisia dimana jumlah trombosit sangat rendah (1.000/mm<sup>3</sup>) adalah segera memberikan transfusi trombosit (Trombocyt Concentrate/TC). Pemberian TC ini ditujukan untuk meningkatkan jumlah trombosit dalam batasan aman (>50.000/mm<sup>3</sup>), demi mencegah terjadinya perdarahan besar. Perdarahan spontan dapat terjadi bila jumlah trombosit < 50.000/mm<sup>3</sup>, dan bila jumlah trombosit < 10.000/mm<sup>3</sup> akan berisiko terjadi perdarahan dalam kepala (*intracranial*). Komplikasi serius ini mengenai sekitar 1% dari penderita ITP.

Pertama kali Velisia mendapat transfusi 5 kantong trombosit. Setelah melakukan transfusi dilakukan pemeriksaan, hasilnya belum ada peningkatan. Lalu transfusi kedua dilakukan dengan memberikan trombosit sebanyak 10 kantong, jumlah trombositnya mulai mengalami kenaikan menjadi 9.000/mm<sup>3</sup>. Keesokan harinya, kembali dilakukan transfusi 8 kantong trombosit dan jumlah trombosit meningkat menjadi 14.000/mm<sup>3</sup>.

Karena kenaikan dirasa cukup lambat walau 23 kantong sudah ditransfusikan dengan perawatan intensif, dokter meng-  
anjurkan pemeriksaan sumsum tulang

(Bone Marrow Puncture/BMP) untuk mengukur jumlah trombosit normal atau meningkat. Pemeriksaan BMP ini juga untuk mengetahui apakah seseorang menderita penyakit lupus, yang juga memiliki gejala yang sama dengan ITP.

Dalam keadaan normal, umur trombosit sekitar 10 hari, sedangkan pada ITP, umur trombosit memendek menjadi 2-3 hari atau bahkan hanya beberapa menit saja. Memendeknya umur trombosit ini disebabkan karena peningkatan penghancuran trombosit di limpa oleh karena proses imunologi dan meningkatnya kadar antibodi platelet.

Dr. Shufrie, SpPD, KHOM menjelaskan terapi untuk ITP pada prinsipnya adalah pemberian steroid. Steroid yang biasa digunakan ialah prednison (atau methylprednisolone lebih efektif daya kerjanya), dosis 1mg/kg BB/hari (pada orang dewasa sekitar 60-mg/hari), dievaluasi setelah pengobatan 2-4 minggu. Pada penderita yang responsif terhadap terapi steroid, akan terjadi penurunan kadar autoantibodi dan peningkatan trombosit. Setelah jumlah trombosit mencapai sekitar 50.000/mm<sup>3</sup> dosis steroid dapat diturunkan perlahan-lahan (*tapering down*).

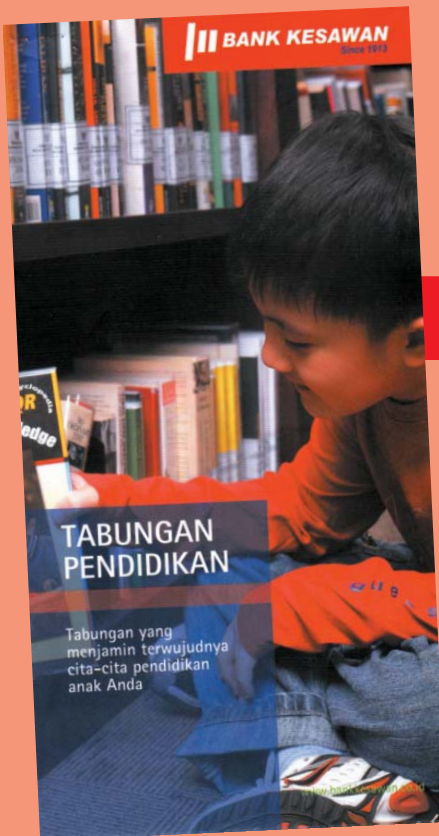
Dan bilamana pengobatan dengan prednisone juga tidak membantu, organ limpa penderita mungkin akan dikeluarkan melalui tindakan operasi. Karena

limpa lah yang memproduksi sebagian besar antibodi yang selama ini menghancurkan sel-sel trombosit dalam darah. Organ ini juga berfungsi untuk menghancurkan sel-sel darah yang tua atau rusak.

Sedangkan bagi anak penderita ITP yang dapat pulih tanpa penanganan medis, tetap disarankan untuk dilakukan observasi ketat dan sangat hati-hati terhadap adanya kemungkinan gejala-gejala perdarahan berulang. Penderita juga dapat dirawat di rumah jika perawatan intensif dan baik dapat dilakukan.

Seperti pada kasus Akbar misalnya, ia diperbolehkan pulang oleh dokter. Ny. Linda, ibunya diberi petunjuk cara mengatasi perdarahan seandainya timbul kembali. Segera tekan hidung selama beberapa menit atau berikan kompres es. Yang juga penting, minum obat secara teratur agar jumlah trombosit meningkat.

Untuk perawatan di rumah, penderita diharuskan untuk mengonsumsi obat prednisone selama beberapa minggu, atau bahkan lebih lama. Pengobatan dengan cara ini bisa saja dihentikan bila jumlah trombosit dalam tubuh penderita rendah kembali. Sehingga konsultasi ke dokter perlu rutin dilakukan. Bila si penderita telah dinyatakan sembuh, penderita harus menghindari pencetus kekambuhan demi menghindari terjadinya pendarahan mendadak. ■ **DGR, HS**



Guna melengkapi kebutuhan nasabah yang kian beragam dalam perencanaan biaya pendidikan, Bank Kesawan meluncurkan produk baru Tabungan Pendidikan. Penandatanganan MOU Kerjasama antara Bank Kesawan dengan Asuransi Mega Life di Jakarta tanggal 21 Juni 2008.

Business Director Bank Kesawan - Entjik S.Djafar menjelaskan, melalui Tabungan Pendidikan diharapkan nasabah dapat **merencanakan biaya pendidikan** anak lebih baik. Jangka waktu yang diberikan sangat fleksibel yaitu mulai dari **1 tahun sampai 20 tahun** dan usia penabung pada saat jatuh tempo adalah 65 tahun, dan setoran rutin setiap bulan besarnya **mulai dari Rp. 100.000,-** atau kelipatannya dengan maksimum sampai dengan **Rp5 juta**. Mudah melakukan setoran rutin karena secara otomatis Bank Kesawan akan mendebet rekening Tabungan atau Giro setiap bulannya.

## Bank Kesawan Luncurkan Tabungan Pendidikan

Selain kemudahan-kemudahan di atas, Tabungan Pendidikan Bank Kesawan juga memberikan perlindungan **asuransi jiwa**. Dalam hal ini apabila penabung meninggal dunia maka setoran rutin bulanannya akan diteruskan oleh Asuransi Mega Life. Jika nasabah mengalami kecelakaan yang mengakibatkan cacat tetap atau meninggal dunia maka ahli waris akan mendapatkan **santunan duka sebesar 250%** dari kumulatif saldo tabungan atau maksimum Rp500 juta, dan manfaat santunan rawat jalan/inap sebesar biaya rumah sakit atau maksimum 25% dari saldo Tabungan Pendidikan.

Sesuai dengan visi Bank Kesawan untuk menjadi Bank terdepan di kelasnya, kini lebih memantapkan posisi dalam kancah persaingan perbankan nasional. Hal ini didukung oleh 32 jaringan layanan yang tersebar di 10 kota di Indonesia dan ATM Kesawan yang siap untuk memberikan pelayanan selama 24 jam sehari serta **bebas biaya transaksi ATM** untuk info saldo, tarik tunai dan transfer antar rekening Bank Kesawan. Akses jaringan ATM Kesawan tersebar di lebih dari **12.000 mesin ATM** yang berlogokan ATM Bersama di seluruh Indonesia.

Informasi lebih lanjut mengenai Tabungan Pendidikan Bank Kesawan, dapat menghubungi Customer Service kami yang terdekat di kota Anda:

JAKARTA: 021-350.8888; MEDAN: 061-415.2929; BANDUNG: 022-422.0618; SURABAYA: 031-568.7530; DENPASAR: 0361-233.777; PEKANBARU: 0761-33308; BATAM: 0778-456.112; TANJUNG BALAI: 0623-92688 dan PEMATANG SIANTAR: 0622-29666.

# Meraih Kembali Kejayaan

**Bermimpi menjadi tuan rumah Piala Dunia sah-sah saja. Namun lebih elok bila mimpi itu terwujud sejalan dengan prestasi PSSI yang sudah mampu membuat timnas sepak bola Indonesia menjadi yang terbaik di Asia Tenggara.**

Satu tahun sudah, PSSI (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia) tepatnya 26 Januari 2009 silam, mendaftarkan diri sekaligus mengajukan proposal kepada FIFA untuk menjadi tuan rumah pada Piala Dunia 2022. Bersama dengan sejumlah negara lainnya, Indonesia akan bersaing dengan Inggris, Jepang, Qatar, Rusia, Portugal, dan Spanyol. Serta pesaing lainnya Australia, trio Belgia-Belanda-Luxemburg, Kanada, China, Meksiko, dan Amerika Serikat. Dan pemenangnya secara resmi akan diumumkan FIFA pada Desember 2010.

Salah satu syarat yang dianjurkan oleh FIFA adalah, masing-masing negara harus memiliki stadion berkapasitas lebih dari 80.000 penonton untuk pertandingan pembuka dan final. Dan untuk kapasitas tersebut, Stadion Utama Gelora Bung Karno dapat menampung 88.000 supporter dan telah banyak menggelar pertandingan internasional. Selebihnya, setidaknya kandidatnya tuan rumah juga harus memiliki 12 stadion dengan kapasitas 40.000 orang.

Pengajuan yang dilakukan PSSI ini, dinilai sangat mengejutkan. Sebab Indonesia belum pernah lolos ke putaran final Piala Dunia ditambah lagi prestasinya yang makin anjlok. Mungkin karena alasan sadar diri, pemerintah tidak mengeluarkan memo yang diminta PSSI sebagai bukti dukungan pemerintah atas bidding atau penawaran yang dilakukan oleh PSSI.

Memo dari pemerintah diperlukan karena menjadi tuan rumah penyelenggara Piala Dunia membutuhkan biaya yang tidak kecil. Triliunan rupiah akan dibutuhkan untuk menyelenggarakan event tersebut. Mulai dari pembangunan fasilitas, penginapan hingga pengadaan keamanan mutlak dibutuhkan sesuai dengan standar FIFA demi memberikan rasa aman bagi tim kesebelasan masing-masing negara. Dengan tidak adanya memo dari pemerintah ini, kandas sudah harapan untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia tersebut.

Walau pemerintah tidak secara ekplisit menyatakan ketidaksetujuannya untuk mengeluarkan rekomendasi, kita harus mengakui prestasi sepakbola tanah air belum menunjukkan perkembangan positif seperti yang diharapkan, khususnya bagi insan pengagum sepakbola. Di sisi lain, PSSI sendiri merasa sudah melakukan

upaya maksimal untuk membenahi dan mengangkat prestasi sepakbola nasional. Mulai dari regulasi, mendatangkan pelatih asing, sekaligus mendatangkan pemain asing. Hingga meningkatnya kesejahteraan para pemain yang sudah lebih baik bila dibandingkan pada era kejayaan sepakbola nasional. Namun, hal itu tidaklah cukup untuk dijadikan acuan untuk mengemukakan keberhasilan. Sebab semua melihat skor "prestasi" diukur dari berapa banyak pertandingan yang dimenangkan.

Maka tidak heran bila pemerintah lebih memprioritaskan berbicara mengenai pembenahan prestasi olahraga nasional daripada berbicara menjadi tuan rumah Piala Dunia. Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng ketika menjawab wartawan (8/2/2010) sehari sebelum batas waktu untuk kepastian adanya dukungan dari pemerintah, secara berulang-ulang menegaskan pemerintah lebih menekankan perbaikan prestasi sepak bola dan mengembalikan kejayaan sepak bola seperti dulu. Menurutnya sebelum berbicara Piala Dunia, PSSI harus mampu membuat timnas sepakbola menjadi yang terbaik di Asia Tenggara setidaknya menjadi juara ASEAN. Hingga bisa menjadi sejajar dengan negara sepak bola top Asia dan bisa lolos ke Piala Dunia.

## Masa Jaya

Harus disadari, sejak sepuluh tahun terakhir ini, PSSI yang khusus membidani persepakbolaan Indonesia semakin kesulitan untuk mengangkat prestasi tim sepakbola nasional. Jangankan berbicara di tingkat ASEAN, melawan tim sepakbola Laos saja tim sepakbola Indonesia terbungkuk badan menerima kekalahan. Laos, ibarat bayi yang baru lahir, sanggup membuat tim Garuda yang pernah dideinggunkan sebagai macan Asia, tidak bisa berbuat banyak.

Padahal, sedikit menoleh ke masa lalu, prestasi sepakbola Indonesia menuai begitu banyak prestasi yang menjadi kebanggaan tersendiri di era 60 hingga 80-an. Di antaranya pada tahun 1960 Juara 1, Turnamen Merdeka Games, Kuala Lumpur; tahun 1961 Juara 1, Turnamen Agha Khan Gold Cup, Dhaka; tahun 1961 Juara 1 Sepakbola Asian Games IV, Jakarta; 1962 Juara 2 Turnamen Merdeka Games, Kuala Lumpur; 1962 Juara 1



Tim sepakbola Indonesia (Syamsul Bachri - merah) saat pertandingan Piala Dunia 2010 di Jakarta, 18 November 2009. Indonesia dan Korea Selatan.

Turnamen Agha Khan Gold Cup, Dhaka; 1966 Juara 1 Turnamen Agha Khan Gold Cup, Dhaka; 1967 Juara 1 Turnamen Agha Khan Gold Cup, Dhaka; 1968 Juara 1 Turnamen King's Cup I, Bangkok.

Pada 1968 Juara 1 Turnamen Agha Khan Gold Cup, Dhaka; 1968 Juara 1 Turnamen Merdeka Games, Kuala Lumpur; 1969 Juara 1 Turnamen King's Cup II, Bangkok; 1969 Juara 2 Turnamen Agha Khan Gold Cup, Dhaka; 1970 Juara 2 Turnamen Jakarta Anniversary Cup I, Jakarta; 1970 Juara 3 Turnamen Queen's Cup, Bangkok; 1971 Juara 1 Turnamen President's Cup, Seoul; 1971 Juara 2 Turnamen Merdeka Games, Kuala Lumpur; 1971 Juara 2 Turnamen Jakarta Anniversary Cup II, Jakarta; 1972 Juara 1 Turnamen President's Cup, Seoul; 1972 Juara 2 Pesta Sukan, Singapura; 1972 All Indonesian Final (Indonesia & B).

Bahkan Jepang dan Korea Selatan saat itu masih jauh di bawah Indonesia. Namun telah lebih dulu menapakkan kakinya di pentas Piala Dunia. Padahal fakta sebelumnya membuktikan, Rony Pattiasarani (almarhum) dan kawan-kawan pernah memperlakukan tim kese-



aat bertanding melawan Kuwait (Saleh Alshaik) dalam pertandingan kualifikasi Grup B AFC Asian Cup Kuwait, seri 1-1

belasan kedua negara tersebut. Tak tanggung-tanggung Indonesia menaklukkannya dengan rata-rata 4-0. Tak hanya itu, Taiwan juga pernah dilumat habis 11-1 di turnamen Merdeka Games 1969, pada era Soetjipto Soentoro. Bahkan negara tetangga seperti Thailand, Malaysia, dan Singapura masih jauh ketinggalan dari permainan tim nasional Indonesia. Saat itu Indonesia mampu mensejajarkan dirinya dengan timnas Israel yang waktu itu masih bergabung dengan zona Asia (kini bergabung dengan Eropa), sebagai tim elit yang disegani di kawasan Asia. Tak hanya itu, 4 pemain nasional menjadi pemain di Tim Asian All Stars 1966-1970 termasuk Soetjipto Soentoro (sekaligus bertindak sebagai kapten), Jacob Sihasale, Iswadi Idris dan Abdul Kadir.

Dan pada tahun 1991 di SEA Games di Manila adalah yang terakhir kalinya Indonesia menikmati sebagai jawara sepakbola. Sembilan belas tahun berlalu, prestasi tim sepak bola Indonesia sejak saat itu semakin meredup. Indonesia minus prestasi di berbagai turnamen internasional baik di luar negeri atau ketika menjadi tuan rumah penyelenggaraan

event internasional seperti Piala Asia. Bahkan di kawasan Asia Tenggara pun timnas Indonesia tidak bisa lagi mendominasi sepak bola seperti sedia kala.

Keterpurukan tersebut sangat dirasakan pecinta sepak bola di tanah air karena PSSI yang tak kunjung menuai prestasi. Seperti baru-baru ini di luar dugaan, karena saking kesalnya, saat timnas Indonesia kalah 1-2 melawan Oman di Jakarta (6/01/2010), salah satu pendukung timnas nasional Hendri Mulyadi (20) melompat pagar mencoba menggiring bola dan melepaskan tembakan ke gawang Oman, namun sayang usahanya untuk menunjukkan semangat bagaimana untuk memasukkan bola ke gawang lawan terhenti. Karena kiper Oman tidak mau kalah malu ditaklukkan striker dadakan, sang kiper pun dapat menggagalkan bola tersebut masuk dalam jala pertahanan-nya.

Hendri mungkin hanyalah salah satu maniak pendukung kesebelasan nasional dari sekian banyak orang yang secara spontan mengekspresikan kekesalannya terhadap prestasi sepakbola di tanah air, yang tak kunjung berubah. Seperti dilansir dari Kompas, Hendri mengaku melaku-

kannya karena kecewa dengan tim nasional Indonesia yang tak kunjung menang. "Bukan motivasi saya menerobos ke lapangan, tetapi karena saya sangat kecewa dengan penampilan tim nasional. Enggak tahu kenapa saya bisa melakukan itu. Mungkin masyarakat Indonesia juga kecewa, Indonesia kok enggak pernah menang. Mungkin saya saja yang berani berbuat nekat seperti itu," kata Hendri.

Pembinaan yang tidak berkesenambungan serta manajemen yang tidak rapi ditenggarai sebagai salah satu penyebab merosotnya prestasi sepakbola Indonesia. Walau dari sisi programnya, PSSI beserta dengan fasilitasnya sudah lebih baik dibandingkan saat masa keemasan sepak bola Indonesia ; jam terbang para pemain yang semakin banyak karena kompetisi sepak bola sudah berjalan dengan baik, penggajian atlet yang lebih baik. Namun tidak serta merta membuahkan prestasi yang membanggakan. Termasuk dengan mendatangkan pemain asing, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas para pemain di Indonesia.

Sebaliknya kehadiran pemain asing dinilai belum signifikan memberikan kontribusi bagi pemain Indonesia. Yang didapati para pemain asing justru beradaptasi dengan gaya pemain Indonesia, ikut-ikutan marah dan menghakimi wasit. Bahkan dilihat dari segi kualitas tidak jauh beda dengan para pemain lokal. Sehingga banyak pihak berharap lebih baik mendatangkan pelatih asing yang bagus. Karena yang dibutuhkan ilmu dan strategi membangun sebuah tim yang solid yang dimulai dari dasar, yang memungkinkan lebih berkesinambungan. Dibandingkan dengan cara-cara instan, seperti adanya ide untuk menaturalisasi pemain asing untuk menjadi pemain nasional.

Pemahaman selama ini adalah dengan mendatangkan pemain asing diharapkan dapat menularkan spirit, keahlian dan jadi contoh bagi pemain-pemain klub lokal. Pemahaman ini dinilai sudah tidak tepat. Sebab ada kemungkinan, para pemain malah diminta belajar dari sesama pemain yang belum tentu bagus. Muncul pula kecenderungan dimana para pemain malah bersaing dan bukan saling belajar. Hal ini akan memperburuk mentalitas para pemain. Terlebih PSSI yang mendapat subsidi dari FIFA selalu mendapat potongan hampir separuh dari subsidi akibat para pemain asing yang bermasalah. Padahal dana yang ada bisa lebih dioptimalkan untuk pembinaan sepakbola yang berkelanjutan.

Sebenarnya tidaklah mustahil kalau Indonesia akan mendapat tantangan dari FIFA untuk menjadi penyelenggara Piala Dunia tanpa harus mengajukan penawaran. Tentunya, jika prestasi sepakbola nasional sudah bisa berbicara di tingkat internasional dan faktor keamanan sudah terjamin. ■ SAN, CID

# Nyala Dian tak Kunjung Padam

Dian Sastro memilih jalannya sendiri untuk berbagi.

**B**ola matanya membulat, ketika mendengar sebuah pertanyaan salah seorang wartawan. "Aku akan tetap di jalur ini, seni membuat aku bukan hidup sendiri tapi saya bisa berbagi," katanya.

Beberapa waktu lalu *Berita Indonesia* (BI) menghadiri peluncuran buku *9 dari Nadira* karya Leila S. Chudori, dengan bonus penampilan Dian Sastro (DS) di panggung teater. Kehadiran Dian begitu mencorong, sama nyalanya dengan Leila yang seharusnya menjadi bintang paling bersinar malam itu.

Pemilik nama lengkap Diandra Paramitha Sastrowardoyo menceritakan bagaimana panggung teater itu seperti sebuah pencitraan tertinggi bagi karirnya di dunia akting. "Lihat saja, aku keribangan kayak begini..."

Acara peluncuran buku kali itu, sungguh berbeda dari biasanya. Sepertinya si empunya buku juga mau berbagi panggung bukan sekadar Dian menjadi bintang kedua yang membikin meriah acara.

Dian juga mempersembahkan peluncuran *gawean* barunya yang diberi nama Yayasan Dian Sastro. Dalam yayasan ini Dian menjadi pentolan, penuang ide, dan sekaligus penggerak utama. Bersama sejumlah rekannya, mereka ingin mendedikasikan tenaga dan pikiran bagi orang banyak.

Kali ini dia benar-benar ingin berbagi cerita, tapi kata perempuan kelahiran Jakarta, 16 Maret 1982 ini kemudian, "Aku *enggak* punya berita gosip, mending cerita soal yayasanmu itu..."

"Seperti nyala dian yang menerangi sesama, Dian Sastro dengan yayasannya mencoba berbagi terhadap sesama...", ujar pembaca acara peluncuran buku malam itu. Dari buku acara terselip kartupos kecil yang tersurat semboyan yayasan itu berbunyi: "Kadang kita lupa, tindakan yang kita pilih mampu memberi makna besar bagi sesama".

\*\*\*

**BI: Mengapa penamaan yayasan itu menggunakan nama Anda, bukan nama lain, misalnya Yayasan Indonesia Maju atau Yayasan Peduli Indonesia, apalagi namanya yang lebih terdengar sangat cair dan luas... Atau ada semacam proposal**

**bagi pendana yang mau ikut partisipasi, "Ini loh yayasannya mbak Dian..."**

**DS:** Aku enggak bermaksud apa-apa selain memang ini bagian kerjaku, di mana aku juga kerja di sana bukan sekadar duduk di belakang meja terus terima jadi semua. Aku menikmati sejak awal pendirian yayasan ini, dan aku dedikasikan waktu dan pikiranku di sana.

**Apa yang hendak dicapai dengan kegiatan baru ini?**

Maunya enggak yang muluk-muluk, tapi punya efek yang besar buat masyarakat luas. Aku peduli soal pendidikan, soal anak-anak, misalnya. Terlalu banyak persoalan di sini, niatnya cuma membantu sesama dari yang aku bisa.

**Seperti dalam acara peluncuran buku ini disebut tadi Anda mendapat bantuan sekian untuk pengadaan buku bacaan di sebuah rumah baca. Apa latar belakangnya?**

Aku suka membaca, dari situ saja sih, idenya bukan hal yang besar-besar dan yang kami sendiri enggak tahu apa. Buat apa, misalnya, bikin seminar atau apalah namanya, tapi aku enggak pernah tahu untuk siapa itu. Ini kan yayasan justru untuk pengabdian bukan ngejar untung.

**Apakah boleh dikatakan ini proyek amal Dian untuk menyeimbangkan dunia Anda yang gemerlap sebagai artis?**

Enggak kepikiran ke sana sih, tujuannya hanya untuk berbagi sesama. Ini bentuk kepedulian, lihat saja di sekitar kita bagaimana dunia pendidikan anak kita. Soal perpustakaan sekolah? Siapa yang bisa duduk terdiam melihat itu semua, kalau bukan kita yang bergerak segera.

**Ada apa dengan dunia pendidikan anak kita?**

Aku ingin bisa memberikan andil untuk pendidikan dengan memberikan buku kepada mereka yang membutuhkan. Ini semua bentuk partisipasi saja, banyak dari mereka yang belum dapat kesempatan untuk bersekolah.

**Apakah dalam jangka panjang nantinya yayasan ini menjadi rumah**



**kedua bagi Anda?**

Seniman tetaplah seniman. Aku enggak mungkin jauh-jauh dari dunia yang telah membesarkan namaku. Ada keinginan menjadi produser nantinya. Yayasan ini bentuk lain lagi dari jiwa berbagiku.

**Apakah pemerintah kita belum mengurus dunia pendidikan ini?**

Kalau berhenti sampai di situ kita enggak bakal maju. Ini caraku dan teman-temanku untuk berbagi. Kalau ada pihak-pihak yang mau berpartisipasi, siapapun itu, kami sangat terbuka. Dunia pendidikan anak tidak bisa menunggu.

**Apa arti pendidikan dari kacamata Anda sebagai seorang seniman?**

Jawabannya penting. Sangat penting.

**Siapa pengarang buku yang paling berkesan untuk Anda?**

Haruki Murakami (Jepang). Dua jempol *deh* buat karyanya!

**Anda sendiri akan menulis buku atau apa?**

Sangat ingin! Suatu hari, semoga ya... Tapi dalam waktu dekat ini fokus dengan apa yang ada dulu. Tapi menulis buku itu seperti naik tingkat dalam kehidupan bagiku. ■ CHUS

# TokohINDONESIA



MAJALAH BERBASIS WEBSITE

[www.tokohindonesia.com](http://www.tokohindonesia.com)

# THE EXCELLENT BIOGRAPHY



Al-Zaytun



KARSA



PARAMADIMA



ENSIKLOPEDI

# Nurcholish Madjid

Disunting oleh:

BUDHY MUNAWAR RACHMAN



BUDHY MUNAWAR-RACHMAN

ENSIKLOPEDI

# Nurcholish Madjid



**Untuk Pemesanan  
Hubungi:**

**Mahad Al-Zaytun  
(0234) 742815**

**Majalah Berita Indonesia  
(021) 8292735**